



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan pengaturan untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 087);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
10. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
12. Meta Data Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian atau proses menemukan kembali terhadap Domain Arsitektur SPBE.
13. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengoptimalkan proses bisnis.
14. Interoperabilitas adalah kapabilitas produk atau sistem antar mukanya diungkap sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain kini atau dimasa mendatang tanpa batasan dan akses atau implementasi.
15. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE secara terintegrasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengintegrasian yang terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang meliputi aspek proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. sebagai dasar penyusunan proses bisnis, pengembangan dan pembangunan aplikasi khusus serta dasar pelaksanaan integrasi layanan; dan
 - c. mendukung terwujudnya *smart province*.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arsitektur SPBE;
- b. referensi arsitektur SPBE;
- c. domain arsitektur SPBE;
- d. sistem informasi arsitektur SPBE;
- e. penerapan arsitektur SPBE;
- f. peta rencana SPBE; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun selaras dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur SPBE menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE serta pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelenggaraan SPBE wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE meliputi rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; dan
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi untuk Arsitektur SPBE atau perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Arsitektur SPBE.

BAB III
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 5

- (1) Referensi Arsitektur SPBE bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
 - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
 - e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur aplikasi SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (5) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (6) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (7) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

BAB IV
DOMAIN ARSITEKTUR SPBE
Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Domain Arsitektur SPBE memuat:
- a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Bagian kedua
Proses Bisnis
Pasal 9

- (1) Proses Bisnis arsitektur SPBE merupakan pengelompokkan fungsi bisnis yang menggambarkan kolaborasi serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi.
- (2) Penetapan arsitektur proses bisnis SPBE ditujukan agar pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing PD dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan pemerintahan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK dan mencegah terjadinya duplikasi pembelanjaan dan meningkatkan produktivitas.
- (3) Domain arsitektur proses bisnis SPBE meliputi :
- a. urusan pemerintahan;
 - b. industri;
 - c. perdagangan;
 - d. pertanian;
 - e. perkebunan;
 - f. peternakan;
 - g. BUMD;
 - h. investasi;
 - i. koperasi;
 - j. UMKM;
 - k. pariwisata;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. transmigrasi;
 - n. perikanan;
 - o. perumahan;
 - p. pembangunan daerah/kawasan tertinggal;
 - q. kesehatan;
 - r. sosial;
 - s. pemberdayaan perempuan;

- t. hukum;
 - u. pendidikan;
 - v. ketenagakerjaan;
 - w. pemuda;
 - x. pertambangan dan energi;
 - y. kehutanan;
 - z. kelautan;
 - aa. lingkungan hidup;
 - ab. kebudayaan;
 - ac. olahraga;
 - ad. keuangan;
 - ae. komunikasi dan informasi;
 - af. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - ag. aparatur negara; dan
 - ah. kependudukan.
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur proses bisnis SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

Bagian Ketiga
Domain Arsitektur Data dan Informasi
Pasal 10

- (1) Domain arsitektur data dan informasi SPBE merupakan acuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi data dan untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi.
- (2) Tujuan domain arsitektur data dan informasi SPBE adalah untuk menyediakan data yang terintegrasi, akurat dan berkualitas.
- (3) Struktur domain arsitektur data dan informasi SPBE meliputi :
- a. data pokok yang mengelompokkan data kedalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum; dan
 - b. data tematik yaitu data menyangkut urusan pemerintahan.
- (4) PD wajib menyediakan data dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Arsitektur SPBE yang menggambarkan aspek interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Domain Arsitektur Layanan SPBE
Pasal 11

- (1) Domain arsitektur Layanan SPBE merupakan proses pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis berdasarkan fungsi-fungsi yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang akan menjadi tematik layanan yang terintegrasi.
- (2) Domain arsitektur layanan SPBE bertujuan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi guna menghindari terjadinya duplikasi dan mempercepat terwujudnya transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi yang komprehensif dan terintegrasi.

- (3) Penyusunan domain arsitektur layanan SBE dan proses identifikasi jenis layanan SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan informatika dan Biro Organisasi.
- (4) Substansi domain arsitektur layanan SPBE meliputi :
 - a. layanan administrasi berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah yang meliputi :
 - a. perencanaan, dan penganggaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kepegawaian;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas kinerja;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan/Perangkat Daerah.
- (6) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kesehatan;
 - e. energi;
 - f. perbankan;
 - g. perhubungan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. sumber daya alam;
 - j. pariwisata; dan
 - k. sektor strategis lainnya.

Bagian Kelima

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Domain arsitektur infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas penunjang utama seperti internet dan jaringan untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
- (2) Domain arsitektur Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar pengklasifikasian infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

- (3) Prinsip yang digunakan dalam penyusunan domain arsitektur infrastruktur SPBE adalah :
 - a. mudah beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan;
 - b. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas dan pelaporan;
 - c. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama; dan
 - d. berbasis standar umum (*open standar*).
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur infrastruktur SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
Pasal 13

- (1) Domain arsitektur aplikasi SPBE merupakan kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi dalam membantu identifikasi peluang untuk berbagai pakai, dan atau untuk penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi.
- (2) Domain arsitektur aplikasi SPBE menjadi acuan dalam mengklasifikasi aplikasi dan komponennya.
- (3) Prinsip domain arsitektur Aplikasi SPBE antara lain :
 - a. disusun berdasarkan adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian;
 - b. aplikasi berorientasi pada pelayanan;
 - c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas dan pelaporan; dan
 - d. berbasis standar terbuka (*open source*).
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur aplikasi SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Domain Arsitektur Keamanan SPBE
Pasal 14

- (1) Domain arsitektur Keamanan SPBE merupakan perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang dalam mengelola informasi tersebut.
- (2) Domain arsitektur keamanan SPBE mencakup aspek:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (3) Untuk penyusunan domain arsitektur Keamanan SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Domain arsitektur SPBE Perangkat Daerah disusun berdasarkan Meta Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Perangkat Daerah mengikuti relasi Meta Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2022-2027.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 16

- (1) Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE pada Perangkat Daerah diperlukan pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE yang ada pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan Sistem Informasi Arsitektur SPBE dengan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.

BAB VI

PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 17

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (2) Penerapan Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Penerapan arsitektur SPBE dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. sebagai dasar untuk pengintegrasian penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE untuk pengintegrasian meliputi :
 - a. layanan perencanaan dan anggaran terintegrasi;
 - b. layanan keuangan terintegrasi;
 - c. layanan kepegawaian terintegrasi;
 - d. layanan kearsipan terintegrasi;
 - e. layanan data sektoral terintegrasi;
 - f. layanan SIMDA terintegrasi;
 - g. layanan JDIH terintegrasi;
 - h. layanan perijinan terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT;
 - i. layanan bantuan Pemerintah terintegrasi;
 - j. layanan pengentasan kemiskinan terintegrasi;
 - k. layanan pengelolaan pariwisata terintegrasi;
 - l. layanan penurunan *prevelensi stunting*, gizi buruk, KIA terintegrasi;

- m. layanan pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi; dan
 - n. layanan perberdayaan UMKM terintegrasi.
- (5) Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan sistem informasi Arsitektur SPBE dengan sistem informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.
 - (6) Dinas mengoordinasikan penerapan Arsitektur SPBE pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE
Pasal 18

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE yang terintegrasi dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang memuat arah dan langkah terintegrasi dari program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan arsitektur SPBE pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. hasil pantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi NTT.
- (6) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah melibatkan unit kerja terkait.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim koordinasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap semua Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, meliputi :
- kebijakan Internal SPBE;
 - tata kelola SPBE;
 - manajemen SPBE; dan
 - layanan SPBE.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

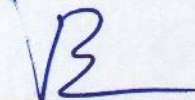
- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT wajib mempedomani arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dalam rangka mewujudkan integrasi Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

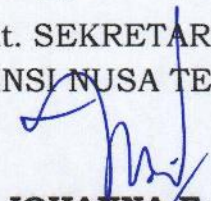
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, #

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 072

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 juni 2022

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	RAB Tingkat 1	RAB Tingkat 2
1	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
2	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.01.02 urusan luar negeri
3	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.02.01 industri
4	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.02.02 perdagangan
5	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.02.03 pertanian
6	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.02.04 perkebunan
7	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.02.05 peternakan
8	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.02.06 perikanan
9	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.02.07 badan usaha milik negara
10		RAB.02.08 investasi
11		RAB.02.09 koperasi
12		RAB.02.10 usaha kecil dan menengah
13		RAB.02.11 pariwisata
14		RAB.03.01 pekerjaan umum
15		RAB.03.02 transmigrasi
16		RAB.03.03 transportasi
17		RAB.03.04 perumahan
18		RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah ter
19		RAB.03.06 pertanahan
20		RAB.03.07 kependudukan
21		RAB.04.01 kesehatan
22		RAB.04.02 sosial
23		RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
24		RAB.05.01 hukum
25		RAB.05.02 keamanan

TABEL 1

26		RAB.05.03 hak asasi manusia
27		RAB.06.01 pendidikan
28		RAB.06.02 ketenagakerjaan
29		RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi
30		RAB.06.04 pemuda
31		RAB.06.05 olahraga
32		RAB.07.01 pertambangan
33		RAB.07.02 energi
34		RAB.07.03 kehutanan
35		RAB.07.04 kelautan
36		RAB.07.05 lingkungan hidup
37		RAB.08.01 agama
38		RAB.08.02 kebudayaan
39		RAB.09.01 dalam negeri
40		RAB.09.02 keuangan
41		RAB.09.03 informasi
42		RAB.09.04 komunikasi
43		RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
44		RAB.09.06 aparaturnegara
45		RAB.09.07 kesekretariatan negara

TABEL 1

RAD Tingkat 1

RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri

RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan

RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAD.08 Informasi Budaya dan agama

RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum

RAD.10 Data Pendukung Umum

RAD Tingkat 2

RAD.01.01 Data pertahanan

RAD.01.02 Data urusan luar negeri

RAD.02.01 Data industri

RAD.02.02 Data perdagangan

RAD.02.03 Data pertanian

RAD.02.04 Data perkebunan

RAD.02.05 Data peternakan

RAD.02.06 Data perikanan

RAD.02.07 Data badan usaha milik negara

RAD.02.08 Data investasi

RAD.02.09 Data koperasi

RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah

RAD.02.11 Data pariwisata

RAD.03.01 Data pekerjaan umum

RAD.03.02 Data transmigrasi

RAD.03.03 Data transportasi

RAD.03.04 Data perumahan

RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

RAD.03.06 Data pertanahan

RAD.03.07 Data kependudukan

RAD.04.01 Data kesehatan

RAD.04.02 Data sosial

RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan

RAD.05.01 Data hukum

RAD.05.02 Data keamanan

RAD.05.03 Data hak asasi manusia

RAD.06.01 Data pendidikan

RAD.06.02 Data ketenagakerjaan

RAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi

RAD.06.04 Data pemuda

RAD.06.05 Data olahraga

RAD.07.01 Data pertambangan

TABEL 1



RAD.07.02 Data energi
RAD.07.03 Data kehutanan
RAD.07.04 Data kelautan
RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08.01 Data agama
RAD.08.02 Data kebudayaan
RAD.09.01 Data dalam negeri
RAD.09.02 Data keuangan
RAD.09.03 Data informasi
RAD.09.04 Data komunikasi
RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional
09.06 _Data aparatur negara
RAD.09.07 Data kesekretariatan negara
RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah
RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan
RAD.10.03 Data Kewilayahan
RAD.10.04 Data Dukung Lainnya

TABEL 1

RAL Tingkat 1	RAL Tingkat 2
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.01 Pertahanan
RAL.01 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.01.02 Urusan Luar Negeri
	RAL.01.03 Kenegaraan
	RAL.01.04 Ekonomi
	RAL.01.05 Industri
	RAL.01.06 Perdagangan
	RAL.01.07 Pertanian
	RAL.01.08 Perkebunan
	RAL.01.09 Peternakan
	RAL.01.10 Perikanan
	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara
	RAL.01.12 Investasi
	RAL.01.13 Koperasi
	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah
	RAL.01.15 Pariwisata
	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
	RAL.01.18 Transmigrasi
	RAL.01.19 Transportasi
	RAL.01.20 Perumahan
	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
	RAL.01.22 Pertanahan
	RAL.01.23 Kependudukan
	RAL.01.24 Pemerintahan daerah
	RAL.01.25 Kesehatan
	RAL.01.26 Sosial
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan
	RAL.01.28 Hukum
	RAL.01.29 Keamanan
	RAL.01.30 Hak Asasi Manusia
	RAL.01.31 Pendidikan
	RAL.01.32 Ketenagakerjaan

TABEL 1

RAL.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAL.01.34 Pemuda
RAL.01.35 Olahraga
RAL.01.36 Pertambangan
RAL.01.37 Energi
RAL.01.38 Kehutanan
RAL.01.39 Kelautan
RAL.01.40 Lingkungan Hidup
RAL.01.41 Agama
RAL.01.42 Kebudayaan
RAL.01.43 Informasi
RAL.01.44 Komunikasi
RAL.02.01 Dalam Negeri
RAL.02.02 Keuangan
RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional
RAL.02.04 Aparatur Negara
RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja
RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola
RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan

TABEL 1

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.01 Aplikasi Pertahanan
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.01.02 Aplikasi Urusan Luar Negeri
	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	RAA.01.01.03 Aplikasi Kenegaraan
	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	RAA.01.01.04 Aplikasi Ekonomi
		RAA.01.01.05 Aplikasi Industri
		RAA.01.01.06 Aplikasi Perdagangan
		RAA.01.01.07 Aplikasi Pertanian
		RAA.01.01.08 Aplikasi Perkebunan
		RAA.01.01.09 Aplikasi Peternakan
		RAA.01.01.10 Aplikasi Perikanan
		RAA.01.01.11 Aplikasi Badan Usaha Milik Negara
		RAA.01.01.12 Aplikasi Investasi
		RAA.01.01.13 Aplikasi Koperasi
		RAA.01.01.14 Aplikasi Usaha Kecil Dan Menengah
		RAA.01.01.15 Aplikasi Pariwisata
		RAA.01.01.16 Aplikasi Perizinan dan Akreditasi
		RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum
		RAA.01.01.18 Aplikasi Transmigrasi
		RAA.01.01.19 Aplikasi Transportasi
		RAA.01.01.20 Aplikasi Perumahan
		RAA.01.01.21 Aplikasi Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
		RAA.01.01.22 Aplikasi Pertanahan
		RAA.01.01.23 Aplikasi Kependudukan
		RAA.01.01.24 Aplikasi Pemerintahan daerah
		RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan
		RAA.01.01.26 Aplikasi Sosial
		RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan
		RAA.01.01.28 Aplikasi Hukum
		RAA.01.01.29 Aplikasi Keamanan
		RAA.01.01.30 Aplikasi Hak Asasi Manusia
		RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan



RAA.01.01.32 Aplikasi Ketenagakerjaan
RAA.01.01.33 Aplikasi Ilmu Pengetahuan
RAA.01.01.34 Aplikasi Teknologi
RAA.01.01.35 Aplikasi Pemuda
RAA.01.01.36 Aplikasi Olahraga
RAA.01.01.37 Aplikasi Pertambangan
RAA.01.01.38 Aplikasi Energi
RAA.01.01.39 Aplikasi Kehutanan
RAA.01.01.40 Aplikasi Kelautan
RAA.01.01.41 Aplikasi Lingkungan Hidup
RAA.01.01.42 Aplikasi Agama
RAA.01.01.43 Aplikasi Kebudayaan
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi
RAA.01.01.45 Aplikasi Komunikasi
RAA.01.02.01 Aplikasi Dalam Negeri
RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Na
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara
RAA.01.02.05 Aplikasi Kesekretariatan Negara
RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi
RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
RAA.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola
RAA.01.02.09 Aplikasi Data dan Informasi Pemerintahan

TABEL 1

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional
RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.01.02 Pusat Kendali	RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat
RAI.03 Platform	RAI.01.03 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan
	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.01.02.01 Network Operation Center
	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.01.02.02 Data Operation Center
		RAI.01.02.03 Command/Operation Center
		RAI.01.02.04 Security Operation Center
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center
		RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm
		RAI.01.03.03 Workstation Farm
		RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
		RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah
		RAI.03.01.01 Server
		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
		RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
		RAI.03.01.05 Peripheral
		RAI.03.01.06 Mobile Device
		RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
		RAI.03.03.01 PaaS
		RAI.03.03.02 IaaS
		RAI.03.03.03 SaaS
		RAI.03.03.04 BaaS

REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

TABEL 2

Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE

Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan Internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
1	2	3	4
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri			
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan		
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.01 pertahanan negara	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.02 pengelolaan instalasi strategis	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.03 potensi pertahanan	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.04 strategi pertahanan	RAB.01.01.04.01 MONITORING BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.04 strategi pertahanan	RAB.01.01.04.02 EVALUASI BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TABEL 2

RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.05 intelejen	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.06 penanggulangan ancaman	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.01 pembinaan pertahanan siber regional
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.01 Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.02 Pengelolaan Sumber Daya TIK Keamanan Informasi
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.03 Melakukan Pengamanan Sistem TIK
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.04 Membangun Pola Hubungan Komunikasi Sandi Melalui <i>Email</i> Sanapati
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan	RAB.01.01.XX usulan referensi IPPD	



TABEL 2

RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.02 urusan luar negeri		
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.02 urusan luar negeri	RAB.01.02.01 hubungan luar negeri	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.02 urusan luar negeri	RAB.01.02.02 politik luar negeri	
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.02 urusan luar negeri	RAB.01.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.02 Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.03 Pengawasan dan Pengendalian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.04 Fasilitas Industri dan Standarisasi Industri
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.05 Pengolahan Data dan Informasi Industri
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.02 penumbuh-kembangan industri dalam negeri	RAB.02.01.02.01 Pembangunan IKM

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.03 ketahanan industri	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.04 pengelolaan struktur industri	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.05 pengelolaan standar nasional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.06 penggunaan produk dalam negeri	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.07 pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.08 pengelolaan iklim usaha	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri	RAB.02.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.01 pembinaan perdagangan regional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.02 pengelolaan perdagangan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAB.02.02.03.01 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAB.02.02.03.02 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.04 ekspor impor	RAB.02.02.04.01 Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.05 pemberdayaan konsumen	RAB.02.02.05.01 Pemberdayaan Konsumen
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu	RAB.02.02.06.01 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.07 perdagangan berjangka	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan	RAB.02.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.01 pembinaan pertanian regional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.01 Peningkatan Produksi Sereal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.02 Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.03 Peningkatan Produksi Hortikultura
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.01 Pengelolaan Lahan dan Air



TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.02 Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.01 Ketersediaan dan Distribusi Pangan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.02 Konsumsi dan keamanan Pangan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.03 Penyuluhan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.05 karantina dan keamanan hayati	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian	RAB.02.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.01 pembinaan perkebunan regional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.02 Peningkatan Produksi Tanaman Semusim
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.03 Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.03 keberlanjutan usaha perkebunan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.04 pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.05 pengembangan bio energi	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan	RAB.02.04.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.02 Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.04 Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan



TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.05 Peningkatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.01 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.02 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.03 Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	RAB.02.05.03.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.04 pascapanen peternakan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.05 produksi pakan dan ternak	RAB.02.05.05.01 Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.06 perikanan budidaya	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan	RAB.02.05.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.02 pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.03 Merencanakan operasional Perikanan Tangkap
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.04 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.05 Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.06 penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.07 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.02 karantina perikanan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan	RAB.02.06.03.01 pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	RAB.02.06.04.01 pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.05 pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan	RAB.02.06.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara		

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.01 koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di kab/kota
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.02 Temu solusi pengelolaan BUMD di 3 zona
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.03 Koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air minum
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.04 Evaluasi pembinaan BUMD provinsi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik negara	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.03 keberlanjutan badan usaha milik negara	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.04 penguatan daya saing	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.05 kesinergian badan usaha milik negara	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara	RAB.02.07.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.01 pembinaan penanaman modal regional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.01 Penyediaan data dan informasi potensi investasi

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.02 Pengembangan potensi investasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.03 Pengembangan promosi penanaman modal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.04 Promosi penanaman modal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.05 Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.06 Pemanfaatan sistem informasi pelayanan perijinan secara elektronik
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.07 Pemantauan dan Pengawasan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.08 Fasilitasi penyelesaian masalah
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.03 manajemen perizinan penanaman modal	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.04 litigasi penanaman modal	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi	RAB.02.08.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi		



TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.01 pembinaan koperasi	RAB.02.09.01.01 Pengembangan kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	RAB.02.09.03.01 Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.04 pengawasan koperasi	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi	RAB.02.09.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01.01 Peningkatan UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01.02 Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM yang berdaya saing

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02.01 Peningkatan kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02.02 Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan & Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Estate
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.XX usulan referensi IPPD	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.01 pembinaan pariwisata regional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.01 Informasi Pemasaran Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.02 Promosi Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.03 Analisa Pasar Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.04 Sarana Prasarana

TABEL 2

RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.05 Pengembangan Atraksi Wisata Alam
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.06 Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan.
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.07 Industri Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.08 Usaha Ekonomi Kreatif
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.09 Jaringan Pemasaran.
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.10 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.11 Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.12 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.04 penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional	
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata	RAB.02.11.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan			



TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum		
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.01 pembinaan pekerjaan umum regional	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan umum dan teknis kegiatan bina marga
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.02 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan laboratorium teknik
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.03 Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.04 Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.05 Pengaturan dan pembinaan penataan ruang
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.06 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.07 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian kegiatan cipta karya
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.08 Penataan Bangunan gedung dan lingkungan

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.09 Penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.03 pembinaan jasa konstruksi	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.02 Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.03 Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sumber daya air
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.04 Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.05 Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.06 Operasi prasarana sumber daya air
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum	RAB.03.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi		



TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.01 pembinaan transmigrasi regional	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .01 Penyiapan Permukiman Transmigrasi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .02 Penempatan Pemindahan dan Sarpras
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .03 Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	3.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	3.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi		
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.01 pembinaan transportasi regional	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan. Provinsi

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.03 Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.04 Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota dantarif kelas ekonomi angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.05 Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.02 pengelolaan transportasi	RAB.03.03.02.06 Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.01 Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.02 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.03 Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.04 Penerbitan : Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.05 Penetapan : Lintas Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.



TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.06 Penerbitan Izin : Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional , Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangn Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi	RAB.03.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan		
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.01 pembinaan transmigrasi regional	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan dan permukiman.

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.02 Penyediaan perumahan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.03 Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal		
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.01 pembinaan pembangunan regional	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.01 VERIFIKASI PEMEKARAN DESA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.02 PENYERASIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMDES & BPD
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.03 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.04 EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

126

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.01 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.02 LOMBA POSYANDU DAN JAMBORE KADER POSYANDU
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.03 Model Dukungan Penguatan Posyandu Kab/Kota Melalui Kader Posyandu
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.04 IDENTIFIKASI & INVENTARISI LEMBAGA ADAT DESA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.05 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.06 PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.07 PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.08 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.09 PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.10 GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.11 DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA



TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.12 PENGEMBANGAN KAPASITAS & PEMBERDAYAAN USAHA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.13 ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.14 PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.15 LOMBA DESA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.01 KOORDINASI PERENCANAAN
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.02 FASILITASI KERJA SAMA
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.03 KOORDINASI PEMBANGUNAN
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.04 KOORDINASI FASILITASI PENEKASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.XX usulan referensi IPPD	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal		

Me

TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.01 pembinaan pertanahan regional
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.04 tata ruang tanah
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.05 litigasi pertanahan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 pertanahan	RAB.03.06.XX usulan referensi IPPD
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.03 keluarga berencana
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat



TABEL 2

RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 kependudukan	RAB.03.07.XX usulan referensi IPPD	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan			
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan		
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.01 pembinaan kesehatan regional	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.02 Penurunan Stunting dan AKI/AKB
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.03 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.01 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.02 Upaya Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.03 Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAB.04.01.05.01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

TABEL 2

RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAB.04.01.05.02 Surveilens dan Imunisasi
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.06 Program Pencegahan	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.08 pengawasan obat dan makanan	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan	RAB.04.01.XX usulan referensi IPPD	
	RAB.04.02 sosial		
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.01 pembinaan sosial regional	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.01 Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orangtua Tunggal
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.02 Layanan Rehabilitasi Sosial
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.03 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.04 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

TABEL 2

RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.05 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.06 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.04 pembangunan manusia	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.05 penanganan fakir miskin	RAB.04.02.05.01 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	RAB.04.02.06.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial	RAB.04.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan		
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02.01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02.02 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

TABEL 2

RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.03 kesetaraan gender	RAB.04.03.03.01 Pengarustamaan Gender
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.03 kesetaraan gender	RAB.04.03.03.02 Kegiatan kemitraan
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.04 perlindungan anak	RAB.04.03.04.01 Pemenuhan hak anak
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.04 perlindungan anak	RAB.04.03.04.01 Perlindungan khusus anak
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAB.04.03.05.01 Pencegahan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAB.04.03.05.02 Penanganan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.06 pertumbuhan dan perkembangan anak	
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan			
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum		

TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.01 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Gubernur
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.02 Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.03 Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.04 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.05 Sengketa dan Bantuan Hukum
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.06 Penyuluhan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.02 pengelolaan masyarakat	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.03 penyelenggaraan keimigrasian	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.04 penyelenggaraan peradilan	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.05 penyelenggaraan penuntutan	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan		

TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .01 operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penegakan ketertiban umum dalam masyarakat
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .02 bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas satgas linmas yang handal
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .03 kegiatan pemetaan rawan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengantisipasi terjadi kebakaran
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.01 Melaksanakan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.02 Melaksanakan kegiatan bela negara dan karakter bangsa
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.03 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi

TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.04 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.05 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketahanan ekonomi, sosbud dan agama
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.06 Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.07 pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.08 pelaksanaan kegiatan penanganan konflik
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.01 pelaksanaan pencegahan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.02 melaksanakan kesiapsiagaan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.03 Melaksanakan kegiatan kedaruratan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.04 pengadaan logistik
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.05 melakukan rehabilitasi

TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.06 melakukan rekonstruksi
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.02 pengayoman masyarakat	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.03 penanggulangan transnasional dan terorisme	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.04 penegakan hukum	RAB.05.02.04.01 penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses hukum.
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.04 penegakan hukum	RAB.05.02.04 .02 pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.04 penegakan hukum	RAB.05.02.04 .03 hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 2

RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia		
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia	RAB.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAB.05.03.01.01 pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia	RAB.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAB.05.03.01.02 penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia	RAB.05.03.02 hak atas kekayaan intelektual	
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia	RAB.05.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja			
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan		
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 pembinaan pendidikan regional	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .01 Perhitungan dan pemetaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .02 Penyediaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .03 Penataan dan Pendistribusian PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB

16

TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .04 Pengembangan Karier PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .05 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .06 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Pendidikan SMA, SMK dan SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.02 pendidikan anak usia dini	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.03 pendidikan dasar	RAB.06.01.03.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/SMA, SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.03 Pengelola Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.04 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.05 Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.06 Penyusunan Silabus Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.07 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB

TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.08 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.09 Pelatihan/Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.12 Proses Izin Operasional SMA/SMK/SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.13 Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.05 pendidikan tinggi	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.06 pendidikan vokasi	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan	RAB.06.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan		
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional	



TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.01 Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.02 Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	RAB.06.02.03.01 Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan	RAB.06.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi		
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.01 penelitian ilmu dasar	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.02 penelitian inter dan multi disiplin	

TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.03 pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.04 pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.06 penginderaan jauh	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.07 teknologi penerbangan dan antariksa	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.08 tenaga nuklir	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.10 pengkordinasian sistem nasional teknologi	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAB.06.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda		
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.01 Pembinaan Atlet PPLP
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.02 Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.03 Pelaksanaan Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi

TABEL 2

RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.04 Pembinaan Atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.04 Pelatihan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit dan Juri
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAB.06.05.01.01 Seleksi Pemuda Berprestasi
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAB.06.05.01.02 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.01 Pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar paskibraka
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.02 Pelatihan Kewirausahaan
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.03 Pelatihan Kewirausahaan (Disabilitas)
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.04 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda	RAB.06.05.XX usulan referensi IPPD	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga		
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.06.01 pembinaan olahraga regional	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.06.01 pembudayaan olahraga	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga	
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 olahraga	RAB.06.06.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam			
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan		
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB.07.01.01 pembinaan pertambangan regional	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB.07.01.02 geologi	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB.07.01.03 mineral dan batubara	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB.07.01.04 minyak dan gas bumi	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB.07.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 pertambangan	RAB... bidang pertambangan	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi		
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.01 Dokumen kebijakan HHBK di provinsi NTT
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.02 rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.03 rekomendasi pengendalian produksi dan produktivitas SDA
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.04 kebijakan pertambangan dan uisaha pemulihan lingkungan hidup

TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.05 pengelolaan konservasi perairan di provinsi NTT
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.01 energi baru dan terbarukan	RAB.07.02.01 .01 Monitoring dan evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.02 ketenagalistrikan	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.03 konservasi energi	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi	RAB.07.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan		
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pembinaan kehutanan regional	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.01 Tata Lingkungan dan Kehutanan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.02 Pengkajian dampak lingkungan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.03 Penggunaan dan Pemanfaatan hutan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.04 pemberdayaan masyarakat
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.05 penyuluhan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.06 bina usaha kehutanan



TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.02 peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.01 Pengamanan dan penegakan hukum
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.02 pengendalian dan pencemaran kerusakan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.03 Konservasi sumber daya alam dan ekosistem
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan	RAB.07.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan		
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.01 pembinaan kelautan regional	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.01 kemaritiman	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.02 tata ruang laut	RAB.07.04.02.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAB.07.04.03.01 pemanfaatan kawasan konservasi perairan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAB.07.04.03.02 pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku



TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.02 Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.03 pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan	RAB.07.04.XX usulan referensi IPPD	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup		
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB.07.05.01.01 pengolahan sampah dan limbah B3
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan daerah aliran sungai
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB.07.05.01.03 rehabilitasi hutan dan lahan
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.03 manajemen iklim dan cuaca	

TABEL 2

RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.04 pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca	
RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup	RAB.07.05.XX usulan referensi IPPD	
RAB.08 Budaya dan agama			
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama		
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.02 pendidikan agama	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.03 pelatihan keagamaan	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.04 penyelenggaraan haji dan umroh	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.05 sertifikasi produk halal	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.01 agama	RAB.08.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan		
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.01 pembinaan kebudayaan regional	



TABEL 2

RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.01 kesejarahan	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .01 Penetapan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02.02 Pendaftaran Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .03 Pengelolaan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .04 Pengelolaan Perlindungan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .05 Pemanfaatan Perlindungan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .06 Pembenahan Dukungan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .07 Pembinaan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .08 Penerbitan Ijin Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .09 Penetapan Warisan Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .10 Pengkajian GHS Cagar Budaya
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.01 Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi budaya secara terpadu
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.02 Pembinaan peningkatan mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.03 Peningkatan pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

TABEL 2

RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.05 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.01 Deposit Bahan Pustaka
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.02 Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.03 Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.04 Layanan Perpustakaan
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.05 Pembinaan Perpustakaan
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.04 pembinaan keputakaan	RAB.08.02.04.06 Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.05 pembinaan keputakaan dan arsip nasional	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.06 pengembangan sastra Indonesia	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.07 pembinaan perfilman nasional	
RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan	RAB.08.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum			



TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.01 pemerintahan dalam negeri	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.03 pembinaan otonomi daerah	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .01 Administrasi Pemerintahan dan Adiministrasi Kewilayahan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .02 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .03 Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .04 Kerja Sama Antar Pemerintah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .05 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sana
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .06 Mental Spiritua
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .07 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .08 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 Fasilitasi Hubungan antar lembaga



TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Koordinasi Forkaapsi & Pemda lainnya
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.04 Peningkatan Komunikasi Tokoh masyarakat, pimpinan, ormas/orsos/keagamaan, dan Pers dan pemerintah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.05 Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.06 Fasilitas TKI dan masyarakat NTT yang bermasalah dan terlanjar di Jabodetabek
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.07 Promosi Budaya dan produk unggulan Daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.08 Fasilitas Kerjasama investasi Daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.09 Pelayanan Pengunjung Anjungan NTT-TMII
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN

NG

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan Provinsi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.04 Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur guna menjamin obyektifitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

pe6

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.05 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.06 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.07 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.08 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.09 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.10 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.05 pembinaan keuangan daerah	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.06 pelaksanaan program prioritas nasional	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.01.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.01 pembinaan dan evaluasi wilayah 1
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.02 pembinaan dan evaluasi wilayah 2
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri	RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.03 pembinaan dan evaluasi wilayah 3
			RAB.09.02.01.01 pembinaan keuangan
			RAB.09.02.01.02 pembinaan pengadaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 Pelayanan Keuangan Pimpinan dan ASN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 penyusunan anggaran bidang pemerintahan

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.02 penyusunan anggaran bidang peerkonomian dan pembangunan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 penyusunan anggaran bidang administrasi umum
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.04 pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.05 pengelolaan kas dan pembinaan bendahara
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.06 akuntansi pendapatan, piutang, dan penerimaan pembiayaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.07 akuntansi belanja aset, hutang, dan pengeluaran pembiayaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.08 akuntansi penyusunan laporan keuangan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 pendataan dan penetapan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.02 layanan dan keberatan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 pembukuan dengan penagihan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.04 kegiatan penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan dan penerimaan dan evaluasi pungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.05 kegiatan penyusunan bahan fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.06 kegiatan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.03 fiskal	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.04 kepabeanan dan cukai	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.05 penganggaran	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.06 perbendaharaan	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.07 manajemen perekonomian	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.01 litigasi pengadaan barang dan jasa
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.02 kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.03 pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.04 pengelolaan SDM pengadaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.03 pengelolaan barang milik negara
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.05 Pelayanan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.01 analisa kebutuhan dan pengadaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.02 penatausahaan aset
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.03 penetapan status dan penilaian aset
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.04 pemanfaatan aset
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.05 pemindahtanganan dan pengamanan aset
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.06 pengamanan dan penyelesaian sengketa aset
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.09 pengelolaan pajak	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.01 Sistem Informasi Pegawai

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.01 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.02 Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Terintegrasi dan Pelayanan Publik Yg Terintegrasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.03 Layanan Pemeliharaan Aplikasi pemerintahan dan publik
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.04 Layanan pengembangan business process re-engineering (BPR)
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.05 Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart prov./city.
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.06 Pengelolaan portal dan website pemerintah prov. dan Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Prov. NTT
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.07 Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.08 Penyediaan sarana dan prasarana publikasi website Prov. NTT
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.09 Perencanaan/MasterPlan dan Arsitektur Infrastruktur TIK
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.10 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi (WAN, MAN,

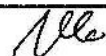


TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.11 Pengelolaan dan pengendalian layanan sarana prasarana TIK, Jaringan, NOC & Server
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.12 Pengelolaan Akses Layanan Insternet dan Manajemen Bandwith
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.13 Pengawasan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.14 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.15 Layanan Hosting dan Colocation Server
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.01 pembinaan pengelolaan informatika instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.01 pembinaan kegiatan statistik instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.02 pengelolaan kegiatan statistik dasar
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.03 pengelolaan kegiatan statistik sektoral
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.01 Pengumpulan dan Penyusunan Updating Data Sektoral
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.02 Pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.03 Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.04 pengelolaan kegiatan statistik khusus

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.05 Pembinaan Kegiatan Statistik Nasional
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.06 Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kependudukan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.04 pengelolaan data geospasial	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi Publik berbasis elektronik
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.02 Meningkatkan peran media informasi dalam penyampaian program-program pemerintah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.03 Layanan Publik Permintaan Informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah.
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.04 Pengelolaan data dan informasi berbasis web
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.06 penyiaran radio publik	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.07 penyiaran televisi publik	
		RAB.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.03.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi		



TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi	RAB.09.04.01 pembinaan komunikasi regional	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik	RAB.09.04.02.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan komunikasi publik berbasis elektronik
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.03 pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.04 serta penyelenggaraan pos	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.01.01 pembinaan perencanaan pembangunan institutional
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.02 pengawasan penyimpangan pembangunan	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.01 pemantauan dan pengendalian inflasi daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.02 sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.03 pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.04 Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.04 kerangka regulasi	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.05 kelembagaan dan pendanaan	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.06 strategi pembangunan nasional	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.01 PERENCANAAN DAN PENDANAAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.02 DATA DAN INFORMASI
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.04 PEMERINTAHAN DAN POLITIK

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.05 PEMBANGUNAN MANUSIA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.06 KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.07 PEREKONOMIAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.08 SUMBER DAYA ALAM
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.09 PARIWISATA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.10 INFRASTRUKTUR
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.11 KEWILAYAHAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.12 TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.13 SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.14 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.15 INOVASI DAN TEKNOLOGI
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara		
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.01 pembinaan kepegawaian instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Legalisasi Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.04 Pengembangan SDM Kesehatan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.01 Sistem Informasi Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Pendidikan Aparatur
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Perencanaan dan Formasi Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.01 Jabatan Struktural
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Penilaian Kompetensi Kinerja

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Fungsional Tertentu
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Perencanaan Budaya Kerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Penerapan Kelompok Budaya Kerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Penempatan Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Pensiun Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Kenaikan Pangkat Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Kesejahteraan Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Displin Pegawai
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Korpri
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 kegiatan kesemaptan satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .02 pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .01 Pelatihan Dasar

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .02 Pelatihan kepemimpinan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .03 Pemerintahan dan sosial kultural
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .04 Kompetensi teknis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .05 Kompetensi fungsional
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .06 Kurikulum dan perangkat
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 pembinaan kelembagaan instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 Penataan Kelembagaan Provinsi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 Penyusunan Uraian Tugas
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.04 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.05 Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.06 Evaluasi Jabatan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 Sertifikasi dan kelembagaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 Sistem Informasi pengembangan kompetensi

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 sarana dan prasarana
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.02 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.03 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.04 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.02 Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.03 Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI)
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.04 Menyelia pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP) terhadap obrik yang diperiksa
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.05 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.06 Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.07 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.08 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.09 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.10 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.11 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.12 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.13 Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.01 pembinaan akuntabilitas kinerja instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.02 Penyusunan RKT
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.03 Penyusunan Perjanjian Kinerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.04 Pengukuran Kinerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.05 Pelaporan Kinerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.06 Evaluasi Kinerja
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 pembinaan pelayanan publik instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.02 Penyusunan dan Penerapan SPP
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.03 Pengelolaan SP4N LAPOR
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.04 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.01 pembinaan SPBE instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.01 Peningkatan Kapasitas Manajemen SPBE
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 Penyusunan Peta Proses Bisnis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.03 Penyusunan SOP-AP
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.04 Evaluasi SOP-AP Perangkat Daerah
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.01 PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.03 PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.01 pembinaan kearsipan instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.01 Pengelolaan Arsip Dinamis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.02 Pengelolaan Arsip Statis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.03 Layanan dan Pemanfaatan Arsip
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.04 Pembinaan Kearsipan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.05 Pembinaan SDM Kearsipan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.05 Pengawasan Kearsipan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.09 pengawasan aparatur negara	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.09 pengawasan aparatur negara	RAB.09.06.09.01 pembinaan pengawasan ASN instansi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.0.XX usulan referensi IPPD	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.. pengelolaan dukungan organisasi	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara		



TABEL 2

RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.03 ketahanan nasional
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.05 pengawasan pemerintahan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.06 pengkajian strategis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 kesekretariatan negara	RAB.09.07.XX usulan referensi IPPD



TABEL 2

Instansi Pengampu	Deskripsi
5	6
	Deskripsi untuk level 1
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, ketahanan nasional, kerjasama internasional pertahanan, pertahanan negara, dan pertahanan siber.
Kemenhan	Penyelenggaraan pertahanan negara secara umum, termasuk di dalamnya keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia dan kemanusiaan, kekuatan pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertahanan, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pertahanan,
Kemenhan	Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan dan instalasi strategis pertahanan.
Kemenhan	Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.
Kemenhan	Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.

TABEL 2

BIN	Penyelenggaraan koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di dalam negeri dan di luar negeri.
BNPT	Penyelenggaraan penangkalan dan penindakan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
BSSN	Penyelenggaraan pertahanan siber yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, pengkoordinasian kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, serta pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional.
semua	

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri, termasuk di dalamnya misi internasional, kerja sama internasional, dan politik luar negeri.
Kemenlu	Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Kemenlu	Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri, termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, peneraan, pelayanan pendapatan negara bukan pajak, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital, dan pengelolaan iklim usaha.
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri.

TABEL 2

Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan di bidang ketahanan industri dan kerja sama.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri.
Kemenperin	Pengelolaan kebijakan nasional serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri.
Kemenparekraf	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk kreatif bidang ekonomi kreatif.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan pengembangan iklim usaha.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen, standarisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.
Semua	
Kemendag	
Kemendag	

116

TABEL 2

Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.
Semua	
Kementan	
Kementan	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.

116

TABEL 2

Kementan	
Kementan	Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan, benih dan bibit tanaman, pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dukungan perkebunan terhadap ketahanan pangan, dan pengembangan bio energi.
Semua	
Kementan	

Ne

TABEL 2

Kementan	
Kementan	
Kementan	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
Semua	Pasal 22 butir d

16

TABEL 2

Kementan	
Kementan	
Kementan	
Kementan	
Kementan	

116

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
Semua	Pasal 19

116

TABEL 2

Kemenlaut	
Kemenlaut	
Kemenlaut	
Kemenlaut	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara, pengembangan bisnis strategis, serta penguatan daya saing dan kesinergian badan usaha milik negara.

N6

TABEL 2

Semua	Pasal 38
KemenBUMN	
KemenBUMN	
KemenBUMN	
KemenBUMN	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, litigasi penanaman modal, dan manajemen perizinan serta akreditasi penanaman modal, termasuk di dalamnya badan usaha, penanaman modal, perekrutan pekerja migran, dan lembaga sertifikasi.
Kemeninves	

126

TABEL 2

Kemeninves	
Kemeninves	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi termasuk di dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.

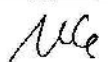
MG

TABEL 2

Semua	Pasal 35
Kemenkop	
Kemenkop	
Kemenkop	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, dukungan dan regulasi pengembangan usaha, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Semua	Pasal 35

TABEL 2

Kemenkop	
Kemenkop	
Kemenkop	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Semua	Pasal 3 dan 29
Kemenpar	



TABEL 2

Kemenpar	
Kemenpar	

NG

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa kontruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.
Semua	Pasal 5
KemenPUPR	

ml

TABEL 2

KemenPUPR	
KemenPUPR	
KemenPUPR	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.

Ng

TABEL 2

Semua	Pasal 12
Kemendes	
Kemendes	
Kemendes	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
Semua	Pasal 3
Kemenhub	

MG

TABEL 2

Kemenhub	

u6

TABEL 2

NC

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.
Semua	Pasal 27
KemenPUPR	
KemenPUPR	
KemenPUPR	
KemenPUPR	

NB

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.

126

TABEL 2

106

TABEL 2

NC

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pengendalian penduduk, pencatatan sipil, keluarga berencana, pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.

16

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengawasan obat dan makanan.

16

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana.

Ng

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

NG

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan masyarakat, penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan keimigrasian.

TABEL 2

[illegible]

TABEL 2

100

TABEL 2

10

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan vokasi, dan pembinaan kepustakaan.

Ng

TABEL 2

U₆

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja.
Semua IPPD	

Handwritten signature

TABEL 2

Kemenaker	
Kemenaker	Perpres 18-2015, Pasal 13
Semua IPPD	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.

Handwritten signature

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Handwritten signature

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan termasuk di dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.



TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan termasuk di dalamnya geologi, pengelolaan sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.

Handwritten signature

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.

Ne

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan termasuk di dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan sumber daya kelautan.

Handwritten signature

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup, manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.

Nb

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama termasuk di dalamnya bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.
Kemenag	
Kemenag	
Kemenag	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya, pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.

TABEL 2

126

TABEL 2

[illegible]

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.

NB

TABEL 2

nee

TABEL 2

116

TABEL 2

Alle

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pajak.

MB

TABEL 2

Me

TABEL 2

LKPP & KPKNL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta pengelolaan aset negara
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penyelesaian terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan

116

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
Semua IPPD	

116

TABEL 2

MLG

TABEL 2

Kemenkominfo	
BPS	diskominfo statistik mengerjakan level 5
BPS	
semua	
BIG, dll	

ml

TABEL 2

semua	

llb

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.
BAPPENAS	

le

TABEL 2

semua	

He

TABEL 2

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
BKN	
semua	

lls

TABEL 2

PANRB	

lls

TABEL 2

PANRB	
semua	

He

TABEL 2

PANRB	
semua	

Me

TABEL 2

lll

TABEL 2

lee

TABEL 2

PANRB	
semua	
PANRB	
semua	

He

TABEL 2

PANRB	
semua	

Ala

TABEL 2

ANRI	
semua	
BPKP	
semua	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat.



TABEL 2

ll

TABEL 3

PETA PROSES BISNIS

No	ID Proses Bisnis	Unit Kerja	Nama Subtansi Probis	RAB Level 1 Nasional	RAB Level 2
1	2	3	4	5	6
P.1.		Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
1.	P.1.1	P.1.1.1	Pembangunan Sumber Daya Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri
		P.1.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri
		P.1.1.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri
2.	P.1.2	P.1.2.1	Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri
		P.1.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri
		P.1.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 industri

Me

TABEL 3

3	P.1.3	P.1.3.1	Pengembangan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan
		P.1.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan
		P.1.3.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan
4	P.1.4	P.1.4.1	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan
		P.1.4.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 perdagangan
1	2	3	4	5	6
P.2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
1	P.2.1	P.2.1.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian



TABEL 3

		P.2.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
		P.2.1.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
1	2	3	4	5	6
2	P.2.2	P.2.2.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
		P.2.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
		P.2.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
3	P.2.3	P.2.3.1	ketahanan Pangan dan Penyuluhan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
		P.2.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian
		P.2.3.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 pertanian



TABEL 3

4	P.2.4	P.2.4.1	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan
		P.2.4.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan
		P.2.4.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 perkebunan
1	2	3	4	5	6
P.3		Dinas Peternakan			
1	P.3.1	P.3.1.1	PENINGKATAN POPULASI PERTUMBUHAN TERNAK	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
		P.3.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan



TABEL 3

		P.3.1.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
1	2	3	4	5	6
2	P.3.2	P.3.2.1	PENINGKATAN PRESENTASE PRASARANA TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
		P.3.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
		P.3.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
3	P.3.3	P.3.3.1	PENINGKATAN JUMLAH TERNAK YANG SEHAT	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan



TABEL 3

		P.3.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
4	P.3.4	P.3.4.1	PENINGKATAN PERTUMBUHAN UNIT USAHA PANGAN ASAL TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
		P.3.4.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 peternakan
1	2	3	4	5	6
P.4		DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
1	P.4.1	P.4.1.1	Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi

TABEL 3

		P.4.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 koperasi
		P.4.1.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah
1	2	3	4	5	6
2	P.4.2	P.4.2.1	Menumbuhkembangkan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah
		P.4.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah
		P.4.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 usaha kecil dan menengah



TABEL 3

3	P.4.3	P.4.3.1	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan
		P.4.3.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan
		P.4.3.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 ketenagakerjaan
1	2	3	4	5	6
4	P.4.4	P.4.4.1	Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi

TABEL 3

		P.4.4.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi
		P.4.4.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi
1	2	3	4	5	6
P.5		Dinas Kelautan dan Perikanan			
1	P.5.1	P.5.1.1	Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan
		P.5.1.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan



TABEL 3

		P.5.1.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan
1	2	3	4	5	6
2	P.5.2	P.5.2.1	Perikanan Tangkap	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
		P.5.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
		P.5.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan



TABEL 3

3	P.5.3	P.5.3.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
		P.5.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
		P.5.3.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
1	2	3	4	5	6
4	P.5.4	P.5.4.1	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan



TABEL 3

		P.5.4.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
		P.5.4.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 perikanan
5	P.5.5	P.5.5.1	Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan
		P.5.5.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan
		P.5.5.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 kelautan
1	2	3	4	5	6
P.6		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

TABEL 3

1	P.6.1	P.6.1.1	Pemasaran Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.1.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
1	2	3	4	5	6
2	P.6.2	P.6.2.1	Destinasi Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.2.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
3	P.6.3	P.6.3.1	Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata

TABEL 3

		P.6.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.3.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
4	P.6.4	P.6.4.1	Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.4.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
		P.6.4.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 pariwisata
1	2	3	4	5	6
P.7		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	P.7.1	P.7.1.1	Bina Marga	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum



TABEL 3

		P.7.1.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.1.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
1	2	3	4	5	6
2	P.7.2	P.7.2.1	Pembangunan Sumber Daya air dan Irigasi	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.2.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.2.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
3	P.7.3	P.7.3.1	Operasi Sumber daya air dan irigasi	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.3.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum

MB

TABEL 3

		P.7.3.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
1	2	3	4	5	6
4	P.7.4	P.7.4.1	Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.4.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.4.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
5	P.7.5	P.7.5.1	Cipta Karya	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.5.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum
		P.7.5.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 pekerjaan umum



TABEL 3

6	P.7.6	P.7.6.1	Perumahan dan Permukiman	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan
		P.7.6.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan
		P.7.6.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan
1	2	3	4	5	6
P.8		Dinas Perhubungan			
1	P.8.1	P.8.1.1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
		P.8.1.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi

Ule

TABEL 3

		P.8.1.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
1	2	3	4	5	6
2	P.8.2	P.8.2.1	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
		P.8.2.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
		P.8.2.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
		P.8.2.4		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi

16

TABEL 3

3	P.8.3	P.8.3.1	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
		P.8.3.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
4	P.8.4	P.8.4.1	PENGELOLAAAN ANGKUTAN PELAYARAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi

TABEL 3

		P.8.4.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
5	P.8.5	P.8.5.1	PENGELOLAAAN KEPELABUHANAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi

Ng

TABEL 3

		P.8.52		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 transportasi
1	2	3	4	5	6
P.9		DINAS KESEHATAN			
1	P.9.1	P.9.1.1	PENYEDIAAN DATA/DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
2	P.9.2	P.9.2.1	PENINGKATAN SDM KESEHATAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.9.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.9.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

TABEL 3

3	P.9.3	P.9.3.1	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
		P.9.3.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
		P.9.3.3		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
1	2	3	4	5	6
4	P.9.4	P.9.4.1	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
		P.9.4.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
5	P.9.5	P.9.5.1	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan

16

TABEL 3

		P.9.5.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
		P.9.5.3		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 kesehatan
1	2	3	4	5	6
P.10		DINAS SOSIAL			
1	P.10.1	P.10.1.1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
		P.10.1.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
2	P.10.2	P.10.2.1	Rehabilitasi Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
3	P.10.3	P.10.3.1	Pemberdayaan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial

TABEL 3

		P.10.3.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
4	P.10.4	P.10.4.1	Penanganan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
5	P.10.5	P.10.5.1	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
6	P.10.6	P.10.6.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 sosial
1	2	3	4	5	6
P.11		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	P.11.1	P.11.1.1	Kelembagaan Gender dan Kemitraan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan

TABEL 3

		P.11.1.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
1	2	3	4	5	6
2	P.11.2	P.11.2.1	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
		P.11.2.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
3	P.11.3	P.11.3.1	Perlindungan Hak Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
		P.11.3.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
4	P.11.4	P.11.4.1	Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan
		P.11.4.2		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan

nc

TABEL 3

P.12		Biro Hukum			
1	2	3	4	5	6
1	P.12.1	P.12.1.1	Peraturan Perundang-undangan Provinsi	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum
		P.12.1.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum
		P.12.1.3		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum
2	P.12.2	P.12.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum
3	P.12.3	P.12.3.1	Bantuan Hukum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum

16

TABEL 3

		P.12.3.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia
		P.12.3.3		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03 hak asasi manusia
		P.12.3.4		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum
1	2	3	4	5	6
P.13		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	P.13.1	P.13.1.1	PENYEDIAAN / PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.1.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.1.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan

NB

TABEL 3

		P.13.1.4		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
1	2	3	4	5	6
2	P.13.2	P.13.2.1	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.2.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.2.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.2.4		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.2.5		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan

NG

TABEL 3

3	P.13.3	P.13.3.1	PEMBINAAN KESISWAAN	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.3.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.3.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.3.4		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.3.5		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan

Me

TABEL 3

4	P.13.4	P.13.4.1	ENGEMBANGAN KURIKULUM	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.4.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.4.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.4.4		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan
		P.13.4.5		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 pendidikan



TABEL 3

5	P.13.5	P.13.5.1	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.2		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.3		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.4		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.5		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.6		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.7		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan



TABEL 3

		P.13.5.8		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
1	2	3	4	5	6
		P.13.5.9		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.10		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.11		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.12		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.13		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.14		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.13.5.15		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan

16

TABEL 3

P.14		BIRO ORGANISASI			
1	2	3	4	5	6
1	P.14.1	P.14.1.1	Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
2	P.14.2	P.14.2.1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
3	P.14.3	P.14.3.1	Pembinaan dan Pengendalian Ketalaksanaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara



TABEL 3

		P.14.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
4	P.14.4	P.14.4.1	Pengembangan Budaya Kerja	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
5	P.14.5	P.14.5.1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.5.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.5.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

TABEL 3

		P.14.5.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.5.5		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
6	P.14.6	P.14.6.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Prima)	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.6.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.6.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
7	P.14.7	P.14.7.1	Reformasi Birokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.7.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.14.7.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

TABEL 3

P.15		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
1	2	3	4	5	6
1	P.15.1	P.15.1.1	PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENDIDIKAN PEGAWAI	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.15.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
2	P.15.2	P.15.2.1	PENGEMBANGAN PEGAWAI	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
3	P.15.3	P.15.3.1	MUTASI DAN PENSIUN PEGAWAI	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara



TABEL 3

		P.15.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
4	P.15.4	P.15.4.1	DISIPLIN DAN KORPRI	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.15.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
P.16		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	P.16.1	P.16.1.1	PEMBERDAYAAN PEMUDA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P16.1.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda

TABEL 3

2	P.16.2	P.16.2.1	PENGEMBANGAN PEMUDA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.2.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.2.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.2.4		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
3	P.16.3	P.16.3.1	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.3.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.3.3		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda

TABEL 3

4	P.16.4	P.16.4.1	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
		P.16.4.2		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 pemuda
1	2	3	4	5	6
P.17		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	P.17.1	P.17.1.1	OPERASI DAN PENGENDALIAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan

Ng.

TABEL 3

2	P.17.2	P.17.2.1	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
3	P.17.3	P.17.3.1	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
4	P.17.4	P.17.4.1	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
5	P.17.5	P.17.5.1	BINA POTENSI, KEWASPADAAN DAN MOBILISASI	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan

TABEL 3

6	P.17.6	P.17.6.1	PENANGGULANGAN KEBAKARAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
7	P.17.7	P.17.7.1	KESAMAPTAAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
8	P.17.8	P.17.8.1	PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS FUNGSIONAL	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
P.18		BIRO UMUM			
1	P.18.1		PELAYANAN KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan

NB

TABEL 3

				RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
1	2	3	4	5	6
P.19		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
1	P.19.1	P.19.1.1	PENGELOLAAN ARSIP	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.19.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.19.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
2	P.19.2	P.19.2.1	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.19.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.19.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

UG

TABEL 3

3	P.19.3	P.19.3.1	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.19.3.2		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.19.3.3		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
4	P.19.4	P.19.4.1	LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.19.4.2		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
		P.19.4.3		RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 kebudayaan
1	2	3	4	5	6
P.20		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

TABEL 3

1	P.20.1	P.20.1.1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi
1	2	3	4	5	6
2	P.20.2	P.20.2.1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Komunikasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.2.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi

TABEL 3

3	P.20.3	P.20.3.1	Peningkatan Pemanfaatan Informasi Dan Data Statistik Sektoral	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
4	P.20.4	P.20.4.1	Pengelolaan Layanan E - Government	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi

TABEL 3

		P.20.4.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
1	2	3	4	5	6
		P.20.4.5		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.4.6		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.4.7		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.4.8		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi

NG

TABEL 3

5	P.20.5	P.20.5.1	Peningkatan Penyediaan Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.5.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.5.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.5.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.5.5		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi



TABEL 3

		P.20.5.6		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
		P.20.5.7		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 informasi
6	P.20.6	P.20.6.1	Peningkatan Keamanan Informasi	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
		P.20.6.2		RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
		P.20.6.3		RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
		P.20.6.4		RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan

TABEL 3

7	P.20.7	P.20.7.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.20.7.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
P.21		BIRO PEMERINTAHAN			
1	P.21.1	P.21.1.1	PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.21.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.21.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri

TABEL 3

2	P.21.2	P.21.2.1	KERJA SAMA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.21.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
3	P.21.3	P.21.3.1	KESEJAHTERAAN RAKYAT	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.21.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.21.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
1	2	3	4	5	6
P.22		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

TABEL 3

1	P.22.1	P.22.1.1	KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.1.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.1.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.1.4		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.1.5		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

N6

TABEL 3

2	P.22.2	P.22.2.1	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.2.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.2.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.2.4		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.2.5		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

NG

TABEL 3

3	P.22.3	P.22.3.1	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.3.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.3.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.3.4		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
4	P.22.4	P.22.4.1	BINA PEMERINTAHAN DESA	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.4.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

NB

TABEL 3

		P.22.4.3		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.4.4		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.22.4.5		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
1	2	3	4	5	6
P.23		BADAN PENGHUBUNG DAERAH			
1	P.23.1	P.23.1.1	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri

No

TABEL 3

2	P.23.2	P.23.2.1	PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
3	P.23.3	P.23.3.1	PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.23.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri

NB

TABEL 3

P.24		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1	2	3	4	5	6
1	P.24.1	P.24.1.1	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
		P.24.1.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
2	P.24.2	P.24.2.1	PROMOSI PENANAMAN MODAL	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
		P.24.2.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
3	P.24.3	P.24.3.1	PELAYANAN TERPADU	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi

TABEL 3

		P.24.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
4	P.24.4	P.24.4.1	PENGENDALIAN	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
		P.24.42		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 investasi
1	2	3	4	5	6
P.25		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
1	P.25.1	P.25.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.25.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional

TABEL 3

		P.25.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.25.1.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
2	P.25.2	P.25.2.1	Pelaksanaan Kebijakan koordinasi Sumber Daya Alam	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi
		P.25.2.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi
		P.25.2.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi
		P.25.2.4		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi

TABEL 3

		P.25.2.5		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi
		P.25.2.6		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.02 energi
3	P.25.3	P.25.3.1	Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi BUMD/BLUD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara
		P.25.3.2		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara
		P.25.3.3		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara
		P.25.3.4		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.07 badan usaha milik negara

126

TABEL 3

4	P.25.4	P.25.4.1	Pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.25.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.25.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
1	2	3	4	5	6
P.26		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	P.26.1	P.26.1.1	IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.26.1.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan

TABEL 3

2	P.26.2	P.26.2.1	POLITIK DALAM NEGERI MELIPUTI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI SERTA FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.26.2.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
3	P.26.3	P.26.3.1	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELIPUTI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.26.3.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan

TABEL 3

4	P.26.4	P.26.4.1	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK MELIPUTI KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SERTA PENANGANAN KONFLIK	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.26.4.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
1	2	3	4	5	6
P.27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	P.27.1	P.27.1.1	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.27.1.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
2	P.27.2	P.27.2.1	KEDARURATAN DAN LOGISTIK	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.27.2.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan

TABEL 3

3	P.27.3	P.27.3.1	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
		P.27.3.2		RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 keamanan
1	2	3	4	5	6
P.28		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH			
1	P.28.1	P.28.1.1	KOMPETENSI MANAJERAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.28.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.28.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
2	P.28.2	P.28.2.1	KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

TABEL 3

		P.28.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.28.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
3	P.28.3	P.28.3.1	SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.28.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.28.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
P.29		BADAN KEUANGAN DAERAH			

μb

TABEL 3

1	P.29.1	P.29.1.1	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD SKPD, SKPKD DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, DAN PEMBANGUNAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
2	P.29.2	P.29.2.1	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan

TABEL 3

3	P.29.3	P.29.3.1	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.29.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
4	P.29.4	P.29.4.1	PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.29.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.29.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
1	2	3	4	5	6
P.30		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			

TABEL 3

1	P.30.1	P.30.1.1	PENATAAN DAN PEMANFATAN TATA LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN, PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.1.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.1.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
2	P.30.2	P.30.2.1	PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.2.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.2.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan

TABEL 3

3	P.30.3	P.30.3.1	PEMBINAAN	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup
		P.30.3.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup
		P.30.3.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 lingkungan hidup
4	P.30.4	P.30.4.1	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN SOSIAL	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.4.2		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
		P.30.4.3		RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.03 kehutanan
1	2	3	4	5	6
P.31		INSPEKTORAT DAERAH			



TABEL 3

1	P.31.1	P.31.1.1	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri



TABEL 3

		P.31.1.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.5		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.6		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri

Ne

TABEL 3

		P.31.1.7		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.8		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
		P.31.1.9		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri



TABEL 3

		P.31.1.10		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 dalam negeri
2	P.31.2	P.31.2.1	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara



TABEL 3

		P.31.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.4		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.5		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

Handwritten signature

TABEL 3

		P.31.2.6		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.7		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.8		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.9		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

TABEL 3

		P.31.2.10		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.11		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.31.2.12		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

llb

TABEL 3

		P.31.2.13		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
1	2	3	4	5	6
P.32		BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
1	P.32.1	P.32.1.1	PENDATAAN DAN PENETAPAN, PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN SERTA LAYANAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan



TABEL 3

		P.32.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
2	P.32.2	P.32.2.1	PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SESUAI UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PENDATAN ASLI DAERAH.	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.33.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan

TABEL 3

3	P.32.3	P.32.3.1	ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MELIPUTI ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN, PENATAUSAHAAN SERTA PENETAPAN STATUS DAN PENILAIAN ASET	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
4	P.32.4	P.32.4.1	PENGELOLAAN ASET DAERAH MELIPUTI PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan
		P.32.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan

TABEL 3

P.33		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
1	2	3	4	5	6
1	P.33.1	P.33.1.1	KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA MELIPUTI KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.33.1.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
2	P.33.2	P.33.2.1	KOORDINASI PELAKSANAAN MELIPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN SERTA KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		P.33.2.2		RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

TABEL 3

3	P.33.3	P.33.3.1	MONITORING DAN EVALUASI WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
		P.33.3.2		RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 pertahanan
1	2	3	4	5	6
P.34		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
1	P.34.1	P.34.1.1	PERENCANAAN , PENGENDAIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional

TABEL 3

		P.34.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
2	P.34.2	P.34.2.1	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
3	P.34.3	P.34.3.1	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional



TABEL 3

4	P.34.4	P.34.4.1	INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.4.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.4.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
1	2	3	4	5	6
5	P.34.5	P.34.5.1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.5.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional
		P.34.5.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional

Handwritten signature

TABEL 3

P.35		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1	2	3	4	5	6
1	P.35.1	P.35.1.1	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.35.1.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.35.1.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
2	P.35.2	P.35.2.1	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.35.2.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara



TABEL 3

		P.35.2.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
3	P.35.3	P.35.3.1	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.35.3.2		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara
		P.35.3.3		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara

Ne

TABEL 3

RAB Level 3	RAB Level 4	ID Domain Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan
7	8	9	10
RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	DAB-P-01.01	Pembangunan Sumber Daya Industri
RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.02 Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi	DAB-P-01.02	Pembangunan Sumber Daya Industri
RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.03 Pengawasan dan Pe	DAB-P-01.03	Pembangunan Sumber Daya Industri
RAB.02.01.02 penumbuh-kembangan industri dalam negeri	RAB.02.01.02.01 Pembangunan IKM	DAB-P-01.04	Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri
RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.02.01.01.04Pembangunan IKM	DAB-P-01.05	Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri
RAB.02.01.01 pembinaan industri regional	RAB.02.01.01.05 Pengolahan Data dan Informasi Industri	DAB-P01.06	Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri

TABEL 3

RAB.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAB.02.02.03.01 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	DAB-P-01.07	Pengembangan Perdagangan
RAB.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAB.02.02.03.02 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DAB-P01.08	Pengembangan Perdagangan
RAB.02.02.04 ekspor impor	RAB.02.02.04.01 Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	DAB-P-01.09	Pengembangan Perdagangan
RAB.02.02.05 pemberdayaan konsumen	RAB.02.02.05.01 Pemberdayaan Konsumen	DAB-P-01.10	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
RAB.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu	RAB.02.02.06.01 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur	DAB-P-01.11	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
7	8	9	10
RAB.02-03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.01 Peningkatan Produksi Serealia	DAB-P-01.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura



TABEL 3

RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.02 Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi- Umbian	DAB-P-01.02	
RAB.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAB.02.03.02.03 Peningkatan Produksi Hortikultura	DAB-P-01.03	
7	8	9	10
RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.01 Pengelolaan Lahan dan Air	DAB-P-01.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.02 Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan	DAB-P-01.05	
RAB.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAB.02.03.03.03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	DAB-P-01.06	
RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.01 Ketersediaan dan Distribusi Pangan	DAB-P-01.07	ketahanan Pangan dan Penyuluhan
RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.02 Konsumsi dan keamanan Pangan	DAB-P-01.08	
RAB.02.03.04 ketahanan pangan	RAB.02.03.04.03 Penyuluhan	DAB-P-01.09	

TABEL 3

RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan	DAB-P-01.10	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.02 Peningkatan Produksi Tanaman Semusim	DAB-P-01.11	
RAB.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAB.02.04.02.03 Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar	DAB-P-01.12	
7	8	9	10
RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.01 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	DAB-P-01.01	PENINGKATAN POPULASI PERTUMBUHAN TERNAK
RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.02 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	DAB-P-01.02	

TABEL 3

RAB.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAB.02.05.02.03 Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DAB-P-01.03	
7	8	9	10
RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	DAB-P-01.04	PENINGKATAN PRESENTASE PRASARANA TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR
RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.02 Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	DAB-P-01.05	
RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	DAB-P-01.06	
RAB.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	RAB.02.05.03.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	DAB-P-01.07	PENINGKATAN JUMLAH TERNAK YANG SEHAT



TABEL 3

RAB.02.05.05 produksi pakan dan ternak	RAB.02.05.05.01 Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	DAB-P-01.08	
RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.04 Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	DAB-P-01.09	PENINGKATAN PERTUMBUHAN UNIT USAHA PANGAN ASAL TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR
RAB.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAB.02.05.01.05 Peningkatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	DAB-P-01.10	
7	8	9	10
RAB.02.09.01 pembinaan koperasi	RAB.02.09.01.01 Pengembangan kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing	DAB-P.01.01	Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing

TABEL 3

RAB.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	RAB.02.09.03.01 Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi	DAB-P.01.02	
RAB.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02.01 Peningkatan kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi	DAB-P.01.02	
7	8	9	10
RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01.01 Peningkatan UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi	DAB-P.01.03	Menumbuhkembangkan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing
RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02.02 Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Penguatan Kelembagaan & Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Estate	DAB-P.01.04	
RAB.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01.02 Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM yang berdaya saing	DAB-P.01.05	

NB

TABEL 3

RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.01 Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	DAB-P.01.06	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
RAB.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01.02 Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis	DAB-P.01.07	
RAB.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	RAB.06.02.03.01 Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum	DAB-P.01.08	
7	8	9	10
RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .01 Penyiapan Permukiman Transmigrasi	DAB-P.01.09	Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat

TABEL 3

RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .02 Penempatan Pemindahan dan Sarpras	DAB-P.01.09	
RAB.03.02.02 bidang transmigrasi	RAB.03.02.02 .03 Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya	DAB-P.01.10	
7	8	9	10
RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	DAB-P.01.01	Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya
RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.02 Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	DAB-P.01.02	



TABEL 3

RAB.07.04.04 sumber daya kelautan	RAB.07.04.04.03 pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku	DAB-P.01.03	
7	8	9	10
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan	DAB-P.01.04	Perikanan Tangkap
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.02 pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur	DAB-P.01.05	
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.03 Merencanakan operasional Perikanan Tangkap	DAB-P.01.06	



TABEL 3

RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.04 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	DAB-P.01.07	Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.05 Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	DAB-P.01.08	
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.06 penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku	DAB-P.01.09	
7	8	9	10
RAB.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAB.02.06.01.07 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha	DAB-P.01.10	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan



TABEL 3

RAB.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan	RAB.02.06.03.01 pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan	DAB-P.01.11	
RAB.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	RAB.02.06.04.01 pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal	DAB-P.01.12	
RAB.07.04.02 tata ruang laut	RAB.07.04.02.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	DAB-P.01.13	Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
RAB.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAB.07.04.03.01 pemanfaatan kawasan konservasi perairan	DAB-P.01.14	
RAB.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAB.07.04.03.02 pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku	DAB-P.01.15	
7	8	9	10



TABEL 3

RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.01 Informasi Pemasaran Pariwisata	DAB-P.01.01	Pemasaran Pariwisata
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.02 Promosi Pariwisata	DAB-P.01.02	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.03 Analisa Pasar Pariwisata	DAB-P.01.03	
7	8	9	10
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.04 Sarana Prasarana	DAB-P.01.04	Destinasi Pariwisata
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.05 Pengembangan Atraksi Wisata Alam	DAB-P.01.05	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.06 Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan.	DAB-P.01.06	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.07 Industri Pariwisata	DAB-P.01.07	Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TABEL 3

RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.08 Usaha Ekonomi Kreatif	DAB-P.01.08	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.09 Jaringan Pemasaran.	DAB-P.01.09	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.10 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	DAB-P.01.10	Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.11 Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DAB-P.01.11	
RAB.02.11.02 kepariwisataan	RAB.02.11.02.12 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	DAB-P.01.12	
7	8	9	10
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan umum dan teknis kegiatan bina marga	DAB-P.01.01	Bina Marga



TABEL 3

RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.02 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan laboratorium teknik	DAB-P.01.02	
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.03 Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan	DAB-P.01.03	
7	8	9	10
RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi	DAB-P.01.04	Pembangunan Sumber Daya air dan Irigasi
RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.02 Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi	DAB-P.01.05	
RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.03 Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sumber daya air	DAB-P.01.06	
RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.04 Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi	DAB-P.01.07	Operasi Sumber daya air dan irigasi
RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.05 Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air	DAB-P.01.08	



TABEL 3

RAB.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAB.03.01.05.06 Operasi prasarana sumber daya air	DAB-P.01.09	
7	8	9	10
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.04 Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	DAB-P.01.10	Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.05 Pengaturan dan pembinaan penataan ruang	DAB-P.01.11	
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.06 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang	DAB-P.01.12	
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.07 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian kegiatan cipta karya	DAB-P.01.13	Cipta Karya
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.08 Penataan Bangunan gedung dan lingkungan	DAB-P.01.14	
RAB.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAB.03.01.02.09 Penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan	DAB-P.01.15	

TABEL 3

RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan dan permukiman.	DAB-P.01.16	Perumahan dan Permukiman
RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.02 Penyediaan perumahan	DAB-P.01.17	
RAB.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAB.03.04.05.03 Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan	DAB-P.01.18	
7	8	9	10
RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	DAB-P.01.01	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN
RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan provinsi	DAB-P.01.02	

NG

TABEL 3

RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.03 Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan	DAB-P.01.03	
7	8	9	10
RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.04 Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota dantarif kelas ekonomi angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi	DAB-P.01.04	Penyelenggaraan angkutan jalan
RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.05 Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	DAB-P.01.05	
RAB.03.03.02 pengelolaan tra	RAB.03.03.02.06 Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT	DAB-P.01.06	
RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.01 Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan	DAB-P.01.07	



TABEL 3

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.02 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi	DAB-P.01.08	Pengelolaan perkeretaapian
RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.03 Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi	DAB-P.01.09	
RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.04 Penerbitan : Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	DAB-P.01.10	Pengelolaan angkutan pelayaran

TABEL 3

RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.05 Penetapan : Lintas Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.	DAB-P.01.11	
RAB.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAB.03.03.03.06 Penerbitan Izin : Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.	DAB-P.01.12	Pengelolaan kepelabuhan



TABEL 3

RAB.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	RAB.03.03.04 Pembangunan : Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Kab. Kota Dalam Provinsi.	DAB-P.01.13	
7	8	9	10
RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.06 Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kependudukan	DAB-P.01.01	PENYEDIAAN DATA/DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	DAB-P.01.02	PENINGKATAN SDM KESEHATAN
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Legalisasi Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat	DAB-P.01.03	
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.04 Pengembangan SDM Kesehatan	DAB-P.01.04	

TABEL 3

RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DAB-P.01.05	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.02 Penurunan Stunting dan AKI/AKB	DAB-P.01.06	
RAB.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03.03 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAB-P.01.07	
7	8	9	10
RAB.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAB.04.01.05.01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAB-P.01.08	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
RAB.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAB.04.01.05.02 Surveilans dan Imunisasi	DAB-P.01.09	
RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.01 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan	DAB-P.01.10	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN



TABEL 3

RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.02 Upaya Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	DAB-P.01.11	
RAB.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAB.04.01.04.03 Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan	DAB-P.01.12	
7	8	9	10
RAB.04.02.05 penanganan fakir miskin	RAB.04.02.05.01 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	DAB-P.01.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial
RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.02 Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orangtua Tunggal	DAB-P.01.02	
RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.03 Layanan Rehabilitasi Sosial	DAB-P.01.03	Rehabilitasi Sosial
RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.04 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DAB-P.01.04	Pemberdayaan Sosial

TABEL 3

RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.05 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	DAB-P.01.05	
RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	RAB.04.02.06.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	DAB-P.01.06	Penanganan Bencana
RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.06 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	DAB-P.01.07	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
RAB.04.02.03 manajemen sosial	RAB.04.02.03.07 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	DAB-P.01.08	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
7	8	9	10
RAB.04.03.03 kesetaraan gender	RAB.04.03.03.01 Pengarustamaan Gender	DAB-P.01.01	Kelembagaan Gender dan Kemitraan

TABEL 3

RAB.04.03.03 kesetaraan gender	RAB.04.03.03.02 Kegiatan kemitraan	DAB-P.01.02	
7	8	9	10
RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02.01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	DAB-P.01.03	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02.02 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	DAB-P.01.04	
RAB.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAB.04.03.05.01 Pencegahan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang	DAB-P.01.05	Perlindungan Hak Perempuan
RAB.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAB.04.03.05.02 Penanganan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang	DAB-P.01.06	
RAB.04.03.04 perlindungan anak	RAB.04.03.04.01 Pemenuhan hak anak	DAB-P.01.07	Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
RAB.04.03.04 perlindungan anak	RAB.04.03.04.01 Perlindungan khusus anak	DAB-P.01.08	



TABEL 3

7	8	9	10
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.01 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Gubernur	DAB-P.01.01	Peraturan Perundang-undangan Provinsi
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.02 Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur	DAB-P.01.02	
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.03 Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum	DAB-P.01.03	
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.04 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	DAB-P.01.04	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.05 Sengketa dan Bantuan Hukum	DAB-P.01.05	Bantuan Hukum

16

TABEL 3

RAB.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAB.05.03.01.01 pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM	DAB-P.01.06	
RAB.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAB.05.03.01.02 penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah	DAB-P.01.07	
RAB.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAB.05.01.01.06 Penyuluhan	DAB-P.01.08	
7	8	9	10
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.01	PENYEDIAAN / PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.12 Proses Izin Operasional SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.02	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.13 Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB	DAB-P.01.03	

16

TABEL 3

RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .06 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Pendidikan SMA, SMK dan SLB	DAB-P.01.04	
7	8	9	10
RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .01 Perhitungan dan pemetaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.05	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .02 Penyediaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.06	
RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .03 Penataan dan Pendistribusian PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.07	
RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .04 Pengembangan Karier PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.08	
RAB.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAB.06.01.01 .05 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.09	



TABEL 3

RAB.06.01.03 pendidikan dasar	RAB.06.01.03.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	DAB-P.01.10	PEMBINAAN KESISWAAN
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/SMA.SMK/SLB	DAB-P.01.11	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.12	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.03 Pengelola Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.13	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.04 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.14	

NB

TABEL 3

RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.05 Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.15	PENGEMBANGAN KURIKULUM
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.06 Penyusunan Silabus Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.16	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.07 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.17	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.08 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.18	
RAB.06.01.04 pendidikan menengah	RAB.06.01.04.09 Pelatihan/Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB	DAB-P.01.19	

TABEL 3

RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.01 Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi budaya secara terpadu	DAB-P.01.20	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.02 Pembinaan peningkatan mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia	DAB-P.01.21	
RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.03 Peningkatan pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	DAB-P.01.22	
RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan	DAB-P.01.23	
RAB.08.02.03 manajemen budaya	RAB.08.02.03.05 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DAB-P.01.24	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .01 Penetapan Cagar Budaya	DAB-P.01.25	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02.02 Pendaftaran Cagar Budaya	DAB-P.01.26	

TABEL 3

RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .03 Pengelolaan Cagar Budaya	DAB-P.01.27	
7	8	9	10
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .04 Pengelolaan Perlindungan Cagar Budaya	DAB-P.01.28	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .05 Pemanfaatan Perlindungan Cagar Budaya	DAB-P.01.29	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .06 Pembenahan Dukungan Cagar Budaya	DAB-P.01.30	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .07 Pembinaan Cagar Budaya	DAB-P.01.31	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .08 Penerbitan Ijin Cagar Budaya	DAB-P.01.32	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .09 Penetapan Warisan Cagar Budaya	DAB-P.01.33	
RAB.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAB.08.02.02 .10 Pengkajian GHS Cagar Budaya	DAB-P.01.34	

16

TABEL 3

7	8	9	10
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 Penataan Kelembagaan Provinsi	DAB-P.01.01	Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 Penyusunan Uraian Tugas	DAB-P.01.02	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.04 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	DAB-P.01.03	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.05 Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan	DAB-P.01.04	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.06 Evaluasi Jabatan	DAB-P.01.05	
RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 Penyusunan Peta Proses Bisnis	DAB-P.01.06	Pembinaan dan Pengendalian Ketalaksanaan

TABEL 3

RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.03 Penyusunan SOP-AP	DAB-P.01.07	
RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.04 Evaluasi SOP-AP Perangkat Daerah	DAB-P.01.08	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Perencanaan Budaya Kerja	DAB-P.01.09	Pengembangan Budaya Kerja
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Penerapan Kelompok Budaya Kerja	DAB-P.01.10	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	DAB-P.01.11	
7	8	9	10
RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.02 Penyusunan RKT	DAB-P.01.12	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.03 Penyusunan Perjanjian Kinerja	DAB-P.01.13	
RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.04 Pengukuran Kinerja	DAB-P.01.14	

TABEL 3

RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.05 Pelaporan Kinerja	DAB-P.01.15	
RAB.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAB.09.06.05.06 Evaluasi Kinerja	DAB-P.01.16	
7	8	9	10
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.02 Penyusunan dan Penerapan SPP	DAB-P.01.17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Prima)
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.03 Pengelolaan SP4N LAPOR	DAB-P.01.18	
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.04 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DAB-P.01.19	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.02 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	DAB-P.01.20	Reformasi Birokrasi
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.03 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM	DAB-P.01.21	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.04 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DAB-P.01.22	

TABEL 3

7	8	9	10
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.01 Sistem Informasi Pegawai	DAB-P.01.01	PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENDIDIKAN PEGAWAI
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Pendidikan Aparatur	DAB-P.01.02	
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Perencanaan dan Formasi Pegawai	DAB-P.01.03	
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.01 Jabatan Struktural	DAB-P.01.04	PENGEMBANGAN PEGAWAI
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.02 Penilaian Kompetensi Kinerja	DAB-P.01.05	
RAB.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAB.09.06.01.03 Fungsional Tertentu	DAB-P.01.06	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Penempatan Pegawai	DAB-P.01.07	MUTASI DAN Pensiun Pegawai

TABEL 3

RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Pensiun Pegawai	DAB-P.01.08	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Kenaikan Pangkat Pegawai	DAB-P.01.09	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 Kesejahteraan Pegawai	DAB-P.01.10	DISIPLIN DAN KORPRI
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.02 Displin Pegawai	DAB-P.01.11	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.03 Korpri	DAB-P.01.12	
7	8	9	10
RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAB.06.05.01.01 Seleksi Pemuda Berprestasi	DAB-D.01.01	PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAB.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAB.06.05.01.02 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	DAB-P.01.02	



TABEL 3

RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.01 Pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar paskibraka	DAB-P.01.03	PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.02 Pelatihan Kewirausahaan	DAB-P.01.04	
RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.03 Pelatihan Kewirausahaan (Disabilitas)	DAB-P.01.05	
RAB.06.05.02 pengembangan pemuda	RAB.06.05.02.04 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DAB-P.01.06	
RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.01 Pembinaan Atlet PPLP	DAB-P.01.07	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.02 Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah	DAB-P.01.08	
RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.03 Pelaksanaan Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi	DAB-P.01.09	

TABEL 3

RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.04 Pembinaan Atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional	DAB-P.01.10	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAB.06.05.01.04 Pelatihan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit dan Juri	DAB-P.01.11	
7	8	9	10
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .01 operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penegakan ketertiban umum dalam masyarakat	DAB.P.01.01	OPERASI DAN PENGENDALIAN



TABEL 3

RAB.05.02.04 penegakan huk	RAB.05.02.04 .03 hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan	DAB.P.01.02	HUBUNGAN KELEMBAGAAN
RAB.05.02.04 penegakan huk	RAB.05.02.04.01 penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses hukum.	DAB.P.01.03	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
RAB.05.02.04 penegakan huk	RAB.05.02.04 .02 pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data	DAB.P.01.04	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .02 bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas satgas linmas yang handal	DAB.P.01.05	BINA POTENSI, KEWASPADAAN DAN MOBILISASI

N6

TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01 .03 kegiatan pemetaan rawan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengantisipasi terjadi kebakaran	DAB.P.01.06	PENANGGULANGAN KEBAKARAN
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.01 kegiatan kesempataan satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur	DAB.P.01.07	KESAMAPTAAN
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .02 pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur	DAB.P.01.08	PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS FUNGSIONAL
7	8	9	10
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 Pelayanan Keuangan Pimpinan dan ASN	DAB.P.01.01	PELAYANAN KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH

TABEL 3

RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.05 Pelayanan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT	DAB.P.01.02	
7	8	9	10
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.01 Pengelolaan Arsip Dinamis	DAB.P.01.01	PENGELOLAAN ARSIP
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.02 Pengelolaan Arsip Statis	DAB.P.01.02	
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.03 Layanan dan Pemanfaatan Arsip	DAB.P.01.03	
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.04 Pembinaan Kearsipan	DAB.P.01.04	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.05 Pembinaan SDM Kearsipan	DAB.P.01.05	
RAB.09.06.08 kearsipan nasional	RAB.09.06.08.05 Pengawasan Kearsipan	DAB.P.01.06	



TABEL 3

RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.01 Deposit Bahan Pustaka	DAB.P.01.07	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA
RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.02 Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka	DAB.P.01.08	
RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.03 Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka	DAB.P.01.09	
RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.04 Layanan Perpustakaan	DAB.P.01.10	LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.05 Pembinaan Perpustakaan	DAB.P.01.11	
RAB.08.02.04 pembinaan ke pustakaan	RAB.08.02.04.06 Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan	DAB.P.01.12	
7	8	9	10



TABEL 3

RAB.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik	RAB.09.04.02.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan komunikasi publik berbasis elektronik	DAB.P.01.01	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Informasi Publik
7	8	9	10
RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi Publik berbasis elektronik	DAB.P.01.02	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Komunikasi Publik
RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.02 Meningkatkan peran media informasi dalam penyampaian program-program pemerintah	DAB.P.01.03	
RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.03 Layanan Publik Permintaan Informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah.	DAB.P01.04	
RAB.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAB.09.03.05.04 Pengelolaan data dan informasi berbasis web	DAB.P.01.05	



TABEL 3

RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.01 Pengumpulan dan Penyusunan Updating Data Sektoral	DAB.P.01.06	Peningkatan Pemanfaatan Informasi Dan Data Statistik Sektoral
RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.02 Pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral	DAB.P.01.07	
RAB.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAB.09.03.03.03 Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral	DAB.P.01.08	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.01 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen	DAB.P.09	Pengelolaan Layanan E - Government
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.02 Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Terintegrasi dan Pelayanan Publik Yg Terintegrasi	DAB.P.10	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.03 Layanan Pemeliharaan Aplikasi pemerintahan dan publik	DAB.P.01.11	



TABEL 3

RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.04 Layanan pengembangan business process re-engineering (BPR)	DAB.P.01.12	
7	8	9	10
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.05 Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart prov./city.	DAB.P.01.13	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.06 Pengelolaan portal dan website pemerintah prov. dan Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Prov. NTT	DAB.P.01.14	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.07 Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara	DAB.P.01.15	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.08 Penyediaan sarana dan prasarana publikasi website Prov. NTT	DAB.P.01.16	

Ng

TABEL 3

RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.09 Perencanaan/MasterPlan dan Arsitektur Infrastruktur TIK	DAB.P.01.17	Peningkatan Penyediaan Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.10 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi (WAN, MAN,	DAB.P.01.18	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.11 Pengelolaan dan pengendalian layanan sarana prasarana TIK, Jaringan, NOC & Server	DAB.P.01.19	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.12 Pengelolaan Akses Layanan Internet dan Manajemen Bandwith	DAB.P.01.20	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.13 Pengawasan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK	DAB.P.01.21	

TABEL 3

RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.14 Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Pasif	DAB.P.01.22	
RAB.09.03.01 pengelolaan informatika	RAB.09.03.01.15 Layanan Hosting dan Colocation Server	DAB.P.01.23	
RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.01 Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi	DAB.P.01.24	Peningkatan Keamanan Informasi
RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.02 Pengelolaan Sumber Daya TIK Keamanan Informasi	DAB.P.01.25	
RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.03 Melakukan Pengamanan Sistem TIK	DAB.P.01.26	
RAB.01.01.07 pertahanan siber	RAB.01.01.07.04 Membangun Pola Hubungan Komunikasi Sandi Melalui <i>Email</i> Sanapati	DAB.P.01.27	

N6

TABEL 3

RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.01 Peningkatan Kapasitas Manajemen SPBE	DAB.P.01.28	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	DAB.P.01.29	
7	8	9	10
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .01 Administrasi Pemerintahan dan Adiministrasi Kewilayahan	DAB.P.01.01	PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .02 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	DAB.P.01.02	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .03 Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	DAB.P.01.03	



TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .04 Kerja Sama Antar Pemerintah	DAB.P.01.04	KERJA SAMA
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .05 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	DAB.P.01.05	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .06 Mental Spiritua	DAB.P.01.06	KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .07 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	DAB.P.01.07	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04 .08 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	DAB.P.01.08	
7	8	9	10



TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.01 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	DAB.P.01.01	KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.02 LOMBA POSYANDU DAN JAMBORE KADER POSYANDU	DAB.P.01.02	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.03 Model Dukungan Penguatan Posyandu Kab/Kota Melalui Kader Posyandu	DAB.P.01.03	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.04 IDENTIFIKASI & INVENTARISI LEMBAGA ADAT DESA	DAB.P.01.04	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.05 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA	DAB.P.01.05	



TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.06 PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG	DAB.P.01.06	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.07 PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS	DAB.P.01.07	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.08 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG	DAB.P.01.08	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.09 PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK	DAB.P.01.09	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.10 GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	DAB.P.01.10	

16

TABEL 3

RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.11 DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA	DAB.P.01.11	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.12 PENGEMBANGAN KAPASITAS & PEMBERDAYAAN USAHA	DAB.P.01.12	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.13 ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES	DAB.P.01.13	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.14 PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE	DAB.P.01.14	
RAB.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAB.03.05.04.15 LOMBA DESA	DAB.P.01.15	BINA PEMERINTAHAN DESA
RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.01 VERIFIKASI PEMEKARAN DESA	DAB.P.01.16	



TABEL 3

RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.02 PENYERASIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMDES & BPD	DAB.P.01.17	
RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.03 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	DAB.P.01.18	
RAB.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAB.03.05.03.04 EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	DAB.P.01.19	
7	8	9	10
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 Fasilitasi Hubungan antar lembaga	DAB.P.01.01	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Koordinasi Forkaapsi & Pemda lainnya	DAB.P.01.02	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah	DAB.P.01.03	

No

TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.04 Peningkatan Komunikasi Tokoh masyarakat, pimpinan, ormas/orsos/keagamaan, dan Pers dan pemerintah	DAB.P.01.04	PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.05 Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	DAB.P.01.05+	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.06 Fasilitasi TKI dan masyarakat NTT yang bermasalah dan terlantar di Jabodetabek	DAB.P.01.06	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.07 Promosi Budaya dan produk unggulan Daerah	DAB.P.01.07	PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.08 Fasilitasi Kerjasama investasi Daerah	DAB.P.01.08	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.09 Pelayanan Pengunjung Anjungan NTT-TMII	DAB.P.01.09	

NG

TABEL 3

7	8	9	10
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.01 Penyediaan data dan informasi potensi investasi	DAB.P.01.01	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.02 Pengembangan potensi investasi	DAB.P.01.02	
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.03 Pengembangan promosi penanaman modal	DAB.P.01.03	PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.04 Promosi penanaman modal	DAB.P.01.04	
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.05 Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan	DAB.P.01.05	PELAYANAN TERPADU



TABEL 3

RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.06 Pemanfaatan sistem informasi pelayanan perijinan secara elektronik	DAB.P.01.06	
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.07 Pemantauan dan Pengawasan	DAB.P.01.07	PENGENDALIAN
RAB.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAB.02.08.02.08 Fasilitas penyelesaian masalah	DAB.P.01.08	
7	8	9	10
RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.01 pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	DAB.P.01.01	Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro
RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.02 sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT	DAB.P.01.02	



TABEL 3

RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.03 pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR	DAB.P.01.03	
RAB.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAB.09.05.03.04 Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi	DAB.P.01.04	
RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.01 Dokumen kebijakan HHBK di provinsi NTT	DAB.P.01.05	Pelaksanaan Kebijakan koordinasi Sumber Daya Alam
RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.02 rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah	DAB.P.01.06	
RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.03 rekomendasi pengendalian produksi dan produktivitas SDA	DAB.P.01.07	
RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.04 kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan lingkungan hidup	DAB.P.01.08	

TABEL 3

RAB.07.02.01 pembinaan energi regional	RAB.07.02.01.05 pengelolaan konservasi perairan di provinsi NTT	DAB.P.01.09	
RAB.07.02.01 energi baru dan terbarukan	RAB.07.02.01 .01 Monitoring dan evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA	DAB.P.01.10	
RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.01 koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di kab/kota	DAB.P.01.11	Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi BUMD/BLUD
RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.02 Temu solusi pengelolaan BUMD di 3 zona	DAB.P.01.12	
RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.03 Koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air minum	DAB.P.01.13	
RAB.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAB.02.07.01.04 Evaluasi pembinaan BUMD provinsi	DAB.P.01.14	

TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	DAB.P.01.15	Pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	DAB.P.01.16	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN	DAB.P.01.17	
7	8	9	10
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.01 Melaksanakan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan	DAB.P.01.01	IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.02 Melaksanakan kegiatan bela negara dan karakter bangsa	DAB.P.01.02	



TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.03 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	DAB.P.01.03	POLITIK DALAM NEGERI MELIPUTI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI SERTA FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.04 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik	DAB.P.01.04	
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.05 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketahanan ekonomi, sosbud dan agama	DAB.P.01.05	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELIPUTI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.06 Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan	DAB.P.01.06	



TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.07 pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	DAB.P.01.07	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK MELIPUTI KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SERTA PENANGANAN KONFLIK
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.08 pelaksanaan kegiatan penanganan konflik	DAB.P.01.08	
7	8	9	10
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.01 pelaksanaan pencegahan	DAB.P01.01	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.02 melaksanakan kesiapsiagaan	DAB.P.01.02	
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.03 Melaksanakan kegiatan kedaruratan	DAB.P.01.03	KEDARURATAN DAN LOGISTIK
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.04 pengadaan logistik	DAB.P.01.04	

TABEL 3

RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.05 melakukan rehabilitasi	DAB.P.01.05	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAB.05.02.01.06 melakukan rekonstruksi	DAB.P.01.06	
7	8	9	10
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .01 Pelatihan Dasar	DAB.P.01.01	KOMPETENSI MANAJERAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .02 Pelatihan kepemimpinan	DAB.P.01.01	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .03 Pemerintahan dan sosial kultural	DAB.P.01.01	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .04 Kompetensi teknis	DAB.P.01.01	KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL



TABEL 3

RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02 .05 Kompetensi fungsional	DAB.P.01.01	
RAB.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAB.09.06.02.06 Kurikulum dan perangkat	DAB.P.01.01	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 Sertifikasi dan kelembagaan	DAB.P.01.01	SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 Sistem Informasi pengembangan kompetensi	DAB.P.01.01	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 sarana dan prasarana	DAB.P.01.01	
7	8	9	10



TABEL 3

RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 penyusunan anggaran bidang pemerintahan	DAB-P.01.01	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD SKPD, SKPKD DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, DAN PEMBANGUNAN
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.02 penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan	DAB-P.01.02	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 penyusunan anggaran bidang administrasi umum	DAB-P.01.03	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum	DAB-P.01.04	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.04 pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan	DAB-P.01.05	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.05 pengelolaan kas dan pembinaan bendahara	DAB-P.01.06	

TABEL 3

RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.06 akuntansi pendapatan, piutang, dan penerimaan pembiayaan	DAB-P.01.07	AKUNTANSI DAN PELAPORAN
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.07 akuntansi belanja aset, hutang, dan pengeluaran pembiayaan	DAB-P.01.08	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.08 akuntansi penyusunan laporan keuangan	DAB-P.01.09	
RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.01 pembinaan dan evaluasi wilayah 1	DAB-P.01.10	PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.02 pembinaan dan evaluasi wilayah 2	DAB-P.01.11	
RAB.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAB.09.02.01.03 pembinaan dan evaluasi wilayah 3	DAB-P.01.12	
7	8	9	10

TABEL 3

RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.01 Tata Lingkungan dan Kehutanan	DAB-P.01.01	PENATAAN DAN PEMANFATAN TATA LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN, PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.02 Pengkajian dampak lingkungan	DAB-P.01.02	
RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.03 Penggunaan dan Pemanfaatan hutan	DAB-P.01.03	
RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.01 Pengamanan dan penegakan hukum	DAB-P.01.04	PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN
RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.02 pengendalian dan pencemaran kerusakan	DAB-P.01.05	
RAB.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAB.07.03.03.03 Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	DAB-P.01.06	

TABEL 3

RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB.07.05.01.01 pengolahan sampah dan limbah B3	DAB-P.01.07	PEMBINAAN
RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan daerah aliran sungai	DAB-P.01.08	
RAB.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAB.07.05.01.03 rehabilitasi hutan dan lahan	DAB-P.01.09	
RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.04 pemberdayaan masyarakat	DAB-P.01.10	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN SOSIAL
RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.05 penyuluhan	DAB-P.01.10	
RAB.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAB.07.03.01.06 bina usaha kehutanan	DAB-P.01.13	
7	8	9	10

TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan	DAB-P.01.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.02 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku	DAB-P.01.02	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.03 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan Provinsi	DAB-P.01.03	

TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.04 Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, revidi sesuai ketentuan dan prosedur guna menjamin obyektivitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	DAB-P.01.04	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.05 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas	DAB-P.01.05	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.06 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya	DAB-P.01.06	



TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.07 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	DAB-P.01.07	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.08 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa	DAB-P.01.08	
RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.09 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut	DAB-P.01.09	



TABEL 3

RAB.09.01.04 pemerintahan daerah	RAB.09.01.04.10 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	DAB-P.01.10	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan	DAB-P.01.11	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.02 Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku	DAB-P.01.12	



TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.03 Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI)	DAB-P.01.13	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.04 Menyelia pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP) terhadap obrik yang diperiksa	DAB-P.01.14	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.05 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota	DAB-P.01.15	

Vle

TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.06 Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku	DAB-P.01.16	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.07 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas	DAB-P.01.17	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.08 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	DAB-P.01.18	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.09 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa	DAB-P.01.19	

TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.10 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut	DAB-P.01.20	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.11 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	DAB-P.01.21	
RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.12 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya	DAB-P.01.22	



TABEL 3

RAB.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAB.09.06.04.13 Menyampaikan saran/ masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan melalui nota dinas dan latta telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan	DAB-P.01.23	
7	8	9	10
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.01 pendataan dan penetapan	DAB-P.01.01	PENDATAAN DAN PENETAPAN, PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN SERTA LAYANAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH.
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.02 layanan dan keberatan	DAB-P.01.02	



TABEL 3

RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.03 pembukuan dengan penagihan	DAB-P.01.03	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.04 kegiatan penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan dan penerimaan dan evaluasi pungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	DAB-P.01.04	PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SESUAI UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PENDATAN ASLI DAERAH.
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.05 kegiatan penyusunan bahan fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	DAB-P.01.05	
RAB.09.02.02 keuangan negara	RAB.09.02.02.06 kegiatan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan pegendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.	DAB-P.01.06	

TABEL 3

RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.01 analisa kebutuhan dan pengadaan	DAB-P.01.07	ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MELIPUTI ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN, PENATAUSAHAAN SERTA PENETAPAN STATUS DAN PENILAIAN ASET TERMASUK SIPKD MODUL ASET
RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.02 penatausahaan aset	DAB-P.01.08	
RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.03 penetapan status dan penilaian aset	DAB-P.01.09	
RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.04 pemanfaatan aset	DAB-P.01.10	PENGELOLAAN ASET DAERAH MELIPUTI PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET
RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.05 pemindahtanganan dan pengamanan aset	DAB-P.01.11	
RAB.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAB.09.02.08.06 pengamanan dan penyelesaian sengketa aset	DAB-P.01.12	



TABEL 3

7	8	9	10
RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.01 KOORDINASI PERENCANAAN	DAB-P.01.01	KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA MELIPUTI KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.02 FASILITASI KERJA SAMA	DAB-P.01.02	
RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.03 KOORDINASI PEMBANGUNAN	DAB-P.01.03	KOORDINASI PELAKSANAAN MELIPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN SERTA KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAB.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAB.03.05.05.04 KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	DAB-P.01.04	

TABEL 3

RAB.01.01.04 strategi pertahanan	RAB.01.01.04.01 MONITORING BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	DAB-P.01.05	MONITORING DAN EVALUASI WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAB.01.01.04 strategi pertahanan	RAB.01.01.04.02 EVALUASI BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	DAB-P01.06	
7	8	9	10
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.01 PERENCANAAN DAN PENDANAAN	DAB-P.01.01	PERENCANAAN ,PENGENDAIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.02 DATA DAN INFORMASI	DAB-P.01.02	



TABEL 3

RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DAB-P.01.03	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.04 PEMERINTAHAN DAN POLITIK	DAB-P.01.04	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.05 PEMBANGUNAN MANUSIA	DAB-P.01.05	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.06 KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	DAB-P.01.06	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.07 PEREKONOMIAN	DAB-P.01.07	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.08 SUMBER DAYA ALAM	DAB-P.01.08	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.09 PARIWISATA	DAB-P.01.09	



TABEL 3

RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.10 INFRASTRUKTUR	DAB-P.01.10	INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.11 KEWILAYAHAN	DAB-P.01.11	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.12 TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DAB-P.01.12	
7	8	9	10
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.13 SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	DAB-P.01.13	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.14 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DAB-P.01.14	
RAB.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAB.09.05.07.15 INOVASI DAN TEKNOLOGI	DAB-P.01.15	

Me

TABEL 3

7	8	9	10
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.01	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.02	
RAB.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAB.09.06.06.01 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.03	
RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.01 PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	DAB-P.01.04	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.02 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	DAB-P.01.05	

TABEL 3

RAB.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAB.09.06.07.03 PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.06	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.01 PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.07	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.02 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.08	
RAB.09.06.03 kelembagaan	RAB.09.06.03.03 PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAB-P.01.09	

TABEL 3

Uraian Bisnis/Urusan	Unit Kerja	Kode Model Referensi	ID metadata terkait
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yang menangani Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi dan Sumber Daya Alam dan Pengawasan dan Pengendalian.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.1
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.2
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.3
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri yang menangani Pembangunan IKM, Pembangunan IKM dan Pengolahan Data dan Informasi Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.4
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.5
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.01	DAD-P.6

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Perdagangan yang menangani Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengembangan perdagangan luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.02	DAD-P.7
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.02	DAD-P.8
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.02	DAD-P.9
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang menangani Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.02	DAD-P.10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02.02	DAD-P.11
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani Peningkatan Produksi Serealia, Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian dan Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.12

Me

TABEL 3

	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.13
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.14
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang menangani Pengelolaan Lahan dan Air, Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.15
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.16
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.17
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang menangani Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan dan Penyuluhan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.18
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.19
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.03	DAD-P.20

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang menangani Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.04	DAD-P.21
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.04	DAD-P.22
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02.04	DAD-P.23
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan populasi pertumbuhan ternak yang menangani : 1. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan. 2. Pengendalian dan pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. 3. Serta Pakan serta Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.24
	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.25

TABEL 3

	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.26
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan presentase prasarana ternak yang memnuhi standar yang menangani Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung, dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.27
	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.28
	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.29
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan jumlah ternak yang sehat yang menangani Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.30

TABEL 3

	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.31
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar yang menangani Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.32
	Dinas Peternakan	RAB.02.05	DAD-P.33
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing yang menangani Pengembangan kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing, Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi dan kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.09	DAD-P.34

TABEL 3

	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.09	DAD-P.35
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.10	DAD-P.36
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Menumbuhkembangkan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing yang menangani UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.10	DAD-P.37
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.10	DAD-P.38
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.02.10	DAD-P.39



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja yang menangani pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dan Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06.02	DAD-P.40
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06.02	DAD-P.41
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06.02	DAD-P.42
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang menangani Penyiapan Permukiman Transmigrasi, Penempatan Pemindahan dan Sarpras dan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.03.02	DAD-P.43



TABEL 3

	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.03.02	DAD-P.44
	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.03.02	DAD-P.45
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya , Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya .	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.46
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.47

TABEL 3

	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.48
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap yang menangani kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Merencanakan operasional Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.49
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.50
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.51

VB

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan dan penegakan hukum perikanan dan kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.52
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.53
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.54
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan dan pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.55

TABEL 3

	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.56
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.02.06	DAD-P.57
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang menangani kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.58
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.59
	Dinas Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04	DAD-P.60
11	12	13	14

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pemasaran Pariwisata yang menangani Informasi Pemasaran Pariwisata, Promosi Pariwisata dan Analisa Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.61
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.62
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.63
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Destinasi Pariwisata yang menangani Sarana Prasarana, Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.64
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.65
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.66
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Industri Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif dan Jaringan Pemasaran.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.67



TABEL 3

	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.68
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.69
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.70
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.71
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11	DAD-P.72
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga yang menangani perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan umum dan teknis kegiatan bina marga , kegiatan pembangunan dan laboratorium teknik dan Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.73

TABEL 3

	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.74
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.75
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Sumber Daya air dan Irigasi yang menangani pelaksanaan Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi, Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi dan Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.76
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.77
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.78
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Operasi Sumber daya air dan irigasi yang menangani Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi, Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan Operasi prasarana sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.79
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.80

TABEL 3

	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.81
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah yang menangani Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, Pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan Pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.82
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.83
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.84
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Cipta Karya yang menangani perencanaan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian kegiatan cipta karya, Penataan Bangunan gedung dan lingkungan dan Penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.85
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.86
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.01	DAD-P.87



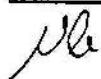
TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman yang menangani Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan dan permukiman, Penyediaan perumahan dan Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.04	DAD-P.88
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.04	DAD-P.89
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RAB.03.04	DAD-P.90
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan yang menangani Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi, Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan provinsi dan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.91
	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.92

Me

TABEL 3

	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.93
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan angkutan jalan yang menangani Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota dan tarif kelas ekonomi angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi, Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.94
	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.95
	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.96
	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.97



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan perkeretaapian jalan yang menangani Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi, Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi.	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.98
	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.99
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan angkutan pelayaran yang menangani Penerbitan : Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal, dan Penetapan : Lintas Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.100

TABEL 3

	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.101
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan kepelabuhan yang menangani Penerbitan Izin : Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional , Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangn Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pembangunan : Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Kab. Kota Dalam Provinsi..	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.102

TABEL 3

	Dinas Perhubungan	RAB.03.03	DAD-P.103
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang penyediaan data/dokumen kependudukan dan catatan sipil yang menangani Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kependudukan.	Dinas Kesehatan	RAB.09.03	DAD-P.104
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang peningkatan sdm kesehatan yang menangani Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dan Legalisasi Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat dan Pengembangan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAB.09.06	DAD-P.105
	Dinas Kesehatan	RAB.09.06	DAD-P.106
	Dinas Kesehatan	RAB.09.06	DAD-P.107



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat yang menangani Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penurunan Stunting dan AKI/AKB, dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.108
	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.109
	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.110
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang menangani Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dan Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.111
	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.112
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan yang menangani Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Upaya Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional dan Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.113

TABEL 3

	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.114
	Dinas Kesehatan	RAB.04.01	DAD-P.115
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menangani Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, dan Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.116
	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.117
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani Layanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.118
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial yang menangani Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.119

TABEL 3

	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.120
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Bencana yang menangani Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.121
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menangani Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.122
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang menangani engelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dinas Sosial	RAB.04.02	DAD-P.123
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan yang menangani Pengarustamaan Gender dan Kegiatan kemitraan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.124



TABEL 3

	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.125
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga yang menangani Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.126
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.127
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Hak Perempuan yang menangani Pencegahan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang dan Penanganan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.128
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.129
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang menangani Pemenuhan hak anak dan Perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.130
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04.03	DAD-P.131



TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi yang menangani Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Gubernur, Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur dan Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum	Biro Hukum	RAB.05.01	DAD-P.132
	Biro Hukum	RAB.05.01	DAD-P.133
	Biro Hukum	RAB.05.01	DAD-P.134
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang menangani Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Biro Hukum	RAB.05.01	DAD-P.135
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Bantuan Hukum yang menangani Sengketa dan Bantuan Hukum, pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM, penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah, dan Penyuluhan	Biro Hukum	RAB.05.01	DAD-P.136



TABEL 3

	Biro Hukum	RAB.05.03	DAD-P.137
	Biro Hukum	RAB.05.03	DAD-P.138
	Biro Hukum	RAB.05.03	DAD-P.139
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana yang menangani Pembangunan, Rehabilitasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB, Proses Izin Operasional SMA/SMK/SLB, Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB dan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.140
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.141
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.142



TABEL 3

	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.143
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang menangani Perhitungan dan pemetaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB, Penyediaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB, Penataan dan Pendistribusian PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB, dan Pengembangan Karier PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.144
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.145
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.146
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.147
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.148



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembinaan kesiswaan yang menangani Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/SMA.SMK/SLB; Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB; Pengelola Dana BOS SD, SMP,SMA/SMK/SLB; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.149
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.150
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.151
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.152
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.153



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kurikulum yang menangani Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB, Penyusunan Silabus Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB, Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB, Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB dan Pelatihan/Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.154
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.155
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.156
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.157
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06.01	DAD-P.158

NB

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang menangani Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi budaya secara terpadu, Pembinaan peningkatan mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.159
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.160
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.161
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.162
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang menangani Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, Penetapan Cagar Budaya, Pendaftaran Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, Pengelolaan Perlindungan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.163
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.164
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.165

TABEL 3

	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.166
11	12	13	14
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.167
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pemajuan kebudayaan yang menangani Pemanfaatan Perlindungan Cagar Budaya, Pembenahan Dukungan Cagar Budaya, Pembinaan Cagar Budaya, Penerbitan Ijin Cagar Budaya, Penetapan Warisan Cagar Budaya, Pengkajian GHS Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.168
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.169
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.170
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.171
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.172
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08.02	DAD-P.173

TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pPenataan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menangani Penataan Kelembagaan Provinsi, Penyusunan Uraian Tugas, dan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.174
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.175
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.176
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menangani Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.177
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.178
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengendalian Ketalaksanaan yang menangani Penyusunan Peta Proses Bisnis, Penyusunan SOP-AP, dan Evaluasi SOP-AP Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.179



TABEL 3

	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.180
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.181
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Budaya Kerja yang menangani Perencanaan Budaya Kerja, Penerapan Kelompok Budaya Kerja, dan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.182
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.183
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.184
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menangani Penyusunan RKT, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.185
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.186
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.187

126

TABEL 3

	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.188
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.189
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Prima) yang menangani Penyusunan dan Penerapan SPP, Pengelolaan SP4N LAPOR dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.190
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.191
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.192
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Reformasi Birokrasi yang menangani Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.193
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.194
	BIRO ORGANISASI	RAB.09.06	DAD-P.195

TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, sistem informasi pegawai dan pendidikan pegawai yang menangani Sistem Informasi Pegawai, Pendidikan Aparatur, dan Perencanaan dan Formasi Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.03	DAD-P.196
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.197
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.198
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengembangan pegawai yang menangani Jabatan Struktural, Penilaian Kompetensi Kinerja, dan Fungsional Tertentu	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.199
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.200
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.201
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang mutasi dan pensiun pegawai yang menangani Penempatan Pegawai, Pensiun Pegawai dan Kenaikan Pangkat Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.202

TABEL 3

	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.203
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.204
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang disiplin dan KORPRI yang menangani Kesejahteraan Pegawai, Displin Pegawai dan Korpri	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.205
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.206
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.207
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda yang menangani Seleksi Pemuda Berprestasi, dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.208
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.209

pk

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda yang menangani Pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar paskibraka, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Kewirausahaan (disabilitas), Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.210
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.211
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.212
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.213
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembudayaan pemuda yang menangani Pembinaan Atlet PPLP, Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah dan Pelaksanaan Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.214
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.215
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.216



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang peningkatan prestasi olahraga yang menangani pembinaan Atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional, Pelatihan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit dan Juri.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.217
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	RAB.06.04	DAD-P.218
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang operasi dan pengendalian yang menangani operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawasan pejabat daerah dan tamu daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penegakan ketertiban umum dalam masyarakat,	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.219

nb

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang hubungan kelembagaan yang menangani hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.220
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang penyelidikan dan penyidikan yang menangani penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses hukum.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.221
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang menangani pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.222
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang BINA POTENSI, KEWASPADAAN DAN MOBILISASI yang menangani bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas satgas linmas yang handal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.223

pb

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENANGGULANGAN KEBAKARAN yang menangani kegiatan pemetaan rawan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengantisipasi terjadi kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.05.02	DAD-P.224
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kesamaptaan yang menangani kegiatan kegiatan kesemaptaan satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.09.06	DAD-P.225
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS FUNGSIONAL yang menangani pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RAB.09.06	DAD-P.226
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan keuangan dan aset sekretariat daerah yang menangani Pelayanan Keuangan Pimpinan dan ASN dan Pelayanan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT	BIRO UMUM	RAB.09.02	DAD-P.227

TABEL 3

	BIRO UMUM	RAB.09.02	DAD-P.228
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan arsip yang menangani Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis dan Layanan dan Pemanfaatan Arsip	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.229
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.230
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.231
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan yang menangani Pembinaan Kearsipan, Pembinaan SDM Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.232
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.233
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.09.06	DAD-P.234



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pelestarian bahan pustaka yang menangani Deposit Bahan Pustaka, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka, dan Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.235
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.236
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.237
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang layanan dan pembinaan perpustakaan yang menangani Layanan Perpustakaan, Pembinaan Perpustakaan dan Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.238
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.239
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAB.08.02	DAD-P.240
11	12	13	14

uk

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Informasi Publik yang menangani Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan komunikasi publik berbasis elektronik,	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.04	DAD-P.241
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Komunikasi Publik yang menangani Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi Publik berbasis elektronik, Meningkatkan peran media informasi dalam penyampaian program-program pemerintah, Layanan Publik Permintaan Informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah dan Pengelolaan data dan informasi berbasis web	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.242
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.243
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.244
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.245



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Pemanfaatan Informasi Dan Data Statistik Sektoral yang menangani Pengumpulan dan Penyusunan Updating Data Sektoral, Pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral dan Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.246
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.247
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.248
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Layanan E - Government yang menangani Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen, Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Terintegrasi dan Pelayanan Publik Yg Terintegrasi , Layanan Pemeliharaan Aplikasi pemerintahan dan publik, Layanan pengembangan business process re-engineering (BPR)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.249
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.250
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.251



TABEL 3

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.252
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Layanan E - Government yang menangani Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart prov./city., Pengelolaan portal dan website pemerintah prov. dan Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Prov. NTT, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara, dan Penyediaan sarana dan prasarana publikasi website Prov. NTT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.253
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.254
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.255
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.256



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Penyediaan Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi yang menangani Perencanaan/MasterPlan dan Arsitektur Infrastruktur TIK , Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi (WAN, MAN), Peng, elolaan dan pengendalian layanan sarana prasarana TIK, Jaringan, NOC & Server, Pengelolaan Akses Layanan Insternet dan Manajemen Bandwith	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.257
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.258
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.259
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.260
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Penyediaan Jaringan Infrastruktur TIK Terintegrasi yang menangani Pengawasan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif, dan Layanan Hosting dan Colocation Server	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.261

pk

TABEL 3

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.262
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.03	DAD-P.263
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Keamanan Informasi yang menangani Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya TIK Keamanan Informasi, Melakukan Pengamanan Sistem TIK, dan Membangun Pola Hubungan Komunikasi Sandi Melalui Email Sanapati	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.01.01	DAD-P.264
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.01.01 pertahanan	DAD-P.265
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.01.01 pertahanan	DAD-P.266
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.01.01 pertahanan	DAD-P.267



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menangani Peningkatan Kapasitas Manajemen SPBE dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.06	DAD-P.268
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAB.09.06	DAD-P.269
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang menangani Administrasi Pemerintahan dan Adiministrasi Kewilayahan, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.270
	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.271
	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.272

Handwritten signature

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kerja sama yang menangani Kerja Sama Antar Pemerintah, dan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.273
	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.274
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat yang menangani Mental Spiritua, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.275
	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.276
	BIRO PEMERINTAHAN	RAB.09.01	DAD-P.277
11	12	13	14

He

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat yang menangani BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT, LOMBA POSYANDU DAN JAMBORE KADER POSYANDU, Model Dukungan Penguatan Posyandu Kab/Kota Melalui Kader Posyandu, IDENTIFIKASI & INVENTARISI LEMBAGA ADAT DESA dan PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.278
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.279
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.280
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.281
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.282



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENGEMBANGAN POTENSI DESA yang menangani PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG, PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS, PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG, PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK dan GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.283
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.284
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.285
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.286
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.287



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT yang menangani DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA, PENGEMBANGAN KAPASITAS & PEMBERDAYAAN USAHA, ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES DAN PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.288
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.289
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.290
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.291
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang BINA PEMERINTAHAN DESA yang menangani LOMBA DESA, VERIFIKASI PEMEKARAN DESA, PENYERASIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMDES & BPD, PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.292
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.293



TABEL 3

	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.294
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.295
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RAB.03.05	DAD-P.296
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga yang menangani Fasilitasi Hubungan antar lembaga, Koordinasi Forkaapsi & Pemda lainnya dan Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.297
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.298
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.299

Nke

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan kehumasan yang menangani Peningkatan Komunikasi Tokoh masyarakat, pimpinan, ormas/orsos/keagamaan, dan Pers dan pemerintah, Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos dan Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.300
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.301
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.302
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama investasi yang menangani Promosi Budaya dan produk unggulan Daerah, Fasilitasi Kerjasama investasi Daerah dan Pelayanan Pengunjung Anjungan NTT-TMII	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.303
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.304
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.305



TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menangani Penyediaan data dan informasi potensi investasi, dan Pengembangan potensi investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.306
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.307
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal yang menangani Pengembangan promosi penanaman modal dan Promosi penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.308
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.309
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu yang menangani Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan dan Pemanfaatan sistem informasi pelayanan perijinan secara elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.310

Nle

TABEL 3

	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.311
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengendalian yang menangani Pemantauan dan Pengawasan dan Fasilitasi penyelesaian masalah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.312
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAB.02.08	DAD-P.313
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang menangani pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT, pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR dan Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.05	DAD-P.314
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.05	DAD-P.315

Nke

TABEL 3

	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.05	DAD-P.316
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.05	DAD-P.317
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pelaksanaan Kebijakan koordinasi Sumber Daya Alam yang menangani Dokumen kebijakan HHBK di provinsi NTT, rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah, rekomendasi pengendalian produksi dan produktivitas SDA, kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan, pengelolaan konservasi perairan di provinsi NTT lingkungan hidup , dan Monitoring dan evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.318
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.319
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.320
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.321

Nke

TABEL 3

	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.322
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.07.02	DAD-P.323
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi BUMD/BLUD yang menangani koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di kab/kota, Temu solusi pengelolaan BUMD di 3 zona , Koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air minum dan Evaluasi pembinaan BUMD provinsi	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.02.07	DAD-P.324
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.02.07	DAD-P.325
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.02.07	DAD-P.326
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.02.07	DAD-P.327



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan yang menangani pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.01	DAD-P.328
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.01	DAD-P.329
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RAB.09.01	DAD-P.330
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA yang menangani kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, kegiatan bela negara dan karakter bangsa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.331
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.332



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang POLITIK DALAM NEGERI MELIPUTI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI SERTA FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK yang menangani Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.333
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.334
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELIPUTI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN yang menangani perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi, sosbud dan agama, Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.335
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.336

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK MELIPUTI KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SERTA PENANGANAN KONFLIK yang menangani pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen , dan kegiatan penanganan konflik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.337
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RAB.05.02	DAD-P.338
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN yang menangani pelaksanaan pencegahan dan melaksanakan kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.339
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.340
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KEDARURATAN DAN LOGISTIK yang menangani kegiatan kedaruratan, dan pengadaan logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.341
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.342

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.343
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAB.05.02	DAD-P.344
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL yang menangani Pelatihan Dasar, Pelatihan kepemimpinan dan Pemerintahan dan sosial kultural	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.345
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.346
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.347
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL yang menangani Kompetensi teknis, Kompetensi fungsional dan Kurikulum dan perangkat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.348

Nke

TABEL 3

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.349
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.350
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN yang menangani Sertifikasi dan kelembagaan, Sistem Informasi pengembangan kompetensi dan sarana dan prasarana	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.351
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.352
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.353
11	12	13	14

ple

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD SKPD, SKPKD DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, DAN PEMBANGUNAN yang menangani penyusunan anggaran bidang pemerintahan, penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan dan penyusunan anggaran bidang administrasi umum	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.354
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.355
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.356
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN yang menangani pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan dan pengelolaan kas dan pembinaan bendahara	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.357
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.358
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.359

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang AKUNTANSI DAN PELAPORAN yang menangani akuntansi pendapatan, piutang, dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja aset, hutang, dan pengeluaran pembiayaan dan akuntansi penyusunan laporan keuangan	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.360
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.361
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.362
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA yang menangani pembinaan dan evaluasi wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.363
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.364
	BADAN KEUANGAN DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.365
11	12	13	14

NG

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENATAAN DAN PEMANFATAN TATA LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN, PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN yang menangani Tata Lingkungan dan Kehutanan, Pengkajian dampak lingkungan dan Penggunaan dan Pemanfaatan hutan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.366
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.367
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.368
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN yang menangani Pengamanan dan penegakan hukum, pengendalian dan pencemaran kerusakan dan pengolahan sampah dan limbah B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.369
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.370
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.371

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN yang menangani pengolahan sampah dan limbah B3, rehabilitasi hutan dan lahan dan rehabilitasi hutan dan lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.05	DAD-P.372
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.05	DAD-P.373
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.05	DAD-P.374
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN SOSIAL yang menangani pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan bina usaha kehutanan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.375
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.376
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	RAB.07.03	DAD-P.377
11	12	13	14

NB

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMEDA DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.378
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.379
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.380

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMEDA DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil, evaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.381
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.382
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.383



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMEDA DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa , Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa dan Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.384
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.385
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.386

Ne

TABEL 3

	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.01	DAD-P.387
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Menyelia program dan kegiatan , Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan, Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan , Menyelia pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP) terhadap obrik yang diperiksa	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.388
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.389

N6

TABEL 3

	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.390
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.391
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil. Inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan, Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.392

NC

TABEL 3

	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.393
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.394
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.395
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.396

U6

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA yang menangani Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa, Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian, Mengevaluasi pelaksanaan tugassesuai hasil yang dilaksanakan, dan Menyampaikan saran/ masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.397
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.398
	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.399

Ne

TABEL 3

	INSPEKTORAT DAERAH	RAB.09.06	DAD-P.400
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pendataan dan penetapan, Pembukuan dan penagihan Serta layanan dan keberatan pajak ranmor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang menangani pendataan dan penetapan, layanan dan keberatan dan pembukuan dengan penagihan	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.401
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.402

NC

TABEL 3

	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.403
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain - lain pendapatan yang sah, dana perimbangan lain - lain pendapatan yang sah yang menangani kegiatan penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan dan penerimaan dan evaluasi pungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyusunan bahan fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan retribusi dan lain-lain, dan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan dana perimbangan dan lain-lain.	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.404
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.405
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.406

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset yang menangani analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan aset dan penetapan status dan penilaian aset	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.407
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.408
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.409
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENGELOLAAN ASET DAERAH MELIPUTI PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET yang menangani pemanfaatan aset, pemindahtanganan dan pengamanan aset dan pengamanan dan penyelesaian sengketa aset	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.410
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.411
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RAB.09.02	DAD-P.412

TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA MELIPUTI KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN yang menangani KOORDINASI PERENCANAAN, FASILITASI KERJA SAMA	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.03.05	DAD-P.413
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.03.05	DAD-P.414
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang KOORDINASI PELAKSANAAN MELIPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN SERTA KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN yang menangani KOORDINASI PEMBANGUNAN dan KOORDINASI FASILITASI PENEGASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.03.05	DAD-P.415
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.03.05	DAD-P.416

TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang MONITORING DAN EVALUASI WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN yang menangani MONITORING BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN dan VALUASI BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.01.01	DAD-P.417
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	RAB.01.01	DAD-P.418
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PERENCANAAN, PENGENDAIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH yang menangani PERENCANAAN DAN PENDANAAN, DATA DAN INFORMASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.419
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.420



TABEL 3

	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.421
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA yang menangani PEMERINTAHAN DAN POLITIK, PEMBANGUNAN MANUSIA dan KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.422
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.423
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.424
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM yang menangani PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, dan PARIWISATA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.425
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.426
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.427



TABEL 3

Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN yang menangani INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, DAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.428
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.429
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.430
11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang menangani SOSIAL DAN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.431
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.432
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAB.09.05	DAD-P.433

NG

TABEL 3

11	12	13	14
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA yang menangani PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.434
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.435
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.436
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK yang menangani PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.437
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.438

TABEL 3

	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.439
Proses bisnis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA yang menangani PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.440
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.441
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAB.09.06	DAD-P.442

REFERENSI ARSITEKTUR DATA

TABEL 4

Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE

Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan Internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
1	2	3	4
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri			
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan		
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.01 pertahanan negara	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.02 pengelolaan instalasi strategis	

TABEL 4

RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.03 potensi pertahanan	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.04 strategi pertahanan	RAD.01.01.04.01 MONITORING BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.04 strategi pertahanan	RAD.01.01.04.02 EVALUASI BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.05 intelejen	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.06 penanggulangan ancaman	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	RAD.01.01.07.01 pembinaan pertahanan siber regional

TABEL 4

RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	RAD.01.01.07.01 Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	RAD.01.01.07.02 Pengelolaan Sumber Daya TIK Keamanan Informasi
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	RAD.01.01.07.03 Melakukan Pengamanan Sistem TIK
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.07 pertahanan siber	RAD.01.01.07.04 Membangun Pola Hubungan Komunikasi Sandi Melalui Email Sanapati
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 pertahanan	RAD.01.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.02 urusan luar negeri		
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.02 urusan luar negeri	RAD.01.02.01 hubungan luar negeri	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.02 urusan luar negeri	RAD.01.02.02 politik luar negeri	
RAD.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.02 urusan luar negeri	RAD.01.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri			

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.01 pembinaan industri regional	RAD.02.01.01.01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.01 pembinaan industri regional	RAD.02.01.01.02 Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.01 pembinaan industri regional	RAD.02.01.01.03 Pengawasan dan Pengendalian
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.01 pembinaan industri regional	RAD.02.01.01.04 Fasilitas Industri dan Standarisasi Industri
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.01 pembinaan industri regional	RAD.02.01.01.05 Pengolahan Data dan Informasi Industri
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.02 penumbuh-kembangan industri dalam negeri	RAD.02.01.02.01 Pembangunan IKM
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.03 ketahanan industri	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.04 pengelolaan struktur industri	

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.05 pengelolaan standar nasional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.06 penggunaan produk dalam negeri	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.07 pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.08 pengelolaan iklim usaha	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 industri	RAD.02.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.01 pembinaan perdagangan regional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAD.02.02.03.01 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.03 perdagangan dalam negeri	RAD.02.02.03.02 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.04 ekspor impor	RAD.02.02.04.01 Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.05 pemberdayaan konsumen	RAD.02.02.05.01 Pemberdayaan Konsumen
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu	RAD.02.02.06.01 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.07 perdagangan berjangka	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 perdagangan	RAD.02.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.01 pembinaan pertanian regional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.02.01 Peningkatan Produksi Sereal
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.02.02 Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian	RAD.02.03.02.03 Peningkatan Produksi Hortikultura

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAD.02.03.03.01 Pengelolaan Lahan dan Air
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAD.02.03.03.02 Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	RAD.02.03.03.03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.04 ketahanan pangan	RAD.02.03.04.01 Ketersediaan dan Distribusi Pangan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.04 ketahanan pangan	RAD.02.03.04.02 Konsumsi dan keamanan Pangan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.04 ketahanan pangan	RAD.02.03.04.03 Penyuluhan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.05 karantina dan keamanan hayati	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 pertanian	RAD.02.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan		

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.01 pembinaan perkebunan regional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAD.02.04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAD.02.04.02.02 Peningkatan Produksi Tanaman Semusim
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan	RAD.02.04.02.03 Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.03 keberlanjutan usaha perkebunan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.04 pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.05 pengembangan bio energi	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 perkebunan	RAD.02.04.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan		

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAD.02.05.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAD.02.05.01.02 Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAD.02.05.01.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAD.02.05.01.04 Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional	RAD.02.05.01.05 Peningkatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAD.02.05.02.01 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAD.02.05.02.02 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.02 benih dan bibit ternak	RAD.02.05.02.03 Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	RAD.02.05.03.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.04 pascapanen peternakan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.05 produksi pakan dan ternak	RAD.02.05.05.01 Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.06 perikanan budidaya	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 peternakan	RAD.02.05.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.02 pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.03 Merencanakan operasional Perikanan Tangkap
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.04 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.05 Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.06 penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional	RAD.02.06.01.07 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.02 karantina perikanan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan	RAD.02.06.03.01 pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	RAD.02.06.04.01 pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.05 pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 perikanan	RAD.02.06.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAD.02.07.01.01 koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di kab/kota
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAD.02.07.01.02 Temu solusi pengelolaan BUMD di 3 zona
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAD.02.07.01.03 Koordinasi, optimalisasi pengelolaan BUMD air minum
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.01 pembinaan badan usaha regional	RAD.02.07.01.04 Evaluasi pembinaan BUMD provinsi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik negara	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.03 keberlanjutan badan usaha milik negara	

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.04 penguatan daya saing	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.05 kesinergian badan usaha milik negara	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.07 badan usaha milik negara	RAD.02.07.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.01 pembinaan penanaman modal regional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.01 Penyediaan data dan informasi potensi investasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.02 Pengembangan potensi investasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.03 Pengembangan promosi penanaman modal
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.04 Promosi penanaman modal
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.05 Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.06 Pemanfaatan sistem informasi pelayanan perijinan secara elektronik
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.07 Pemantauan dan Pengawasan
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.02 manajemen penanaman modal	RAD.02.08.02.08 Fasilitas penyelesaian masalah
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.03 manajemen perizinan penanaman modal	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.04 litigasi penanaman modal	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 investasi	RAD.02.08.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.01 pembinaan koperasi	RAD.02.09.01.01 Pengembangan kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	RAD.02.09.03.01 Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.04 pengawasan koperasi	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 koperasi	RAD.02.09.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.01.01 Peningkatan UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.01.02 Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM yang berdaya saing

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.01 Peningkatan kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.02 Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan & Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Estate
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.XX usulan referensi IPPD	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata		
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.01 pembinaan pariwisata regional	

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.01 Informasi Pemasaran Pariwisata
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.02 Promosi Pariwisata
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.03 Analisa Pasar Pa
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.04 Sarana Prasaran
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.05 Pengembangan Atraksi Wisata Alam
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.06 Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan.
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.07 Industri Pariwisata
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.08 Usaha Ekonomi I
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.09 Jaringan Pemas
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.10 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.11 Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.02 kepariwisataan	RAD.02.11.02.12 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

TABEL 4

RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.04 penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional	
RAD.02 Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 pariwisata	RAD.02.11.XX usulan referensi IPPD	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan			
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.01 pembinaan pekerjaan umum regional	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan umum dan teknis kegiatan bina marga
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.02 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan laboratorium teknik
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.03 Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.04 Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.05 Pengaturan dan pembinaan penataan ruang
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.06 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.07 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian kegiatan cipta karya
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.08 Penataan Bangunan gedung dan lingkungan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	RAD.03.01.02.09 Penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.03 pembinaan jasa kontruksi	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik	

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.01 Merencanakan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.02 Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.03 Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sumber daya air
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.04 Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.05 Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	RAD.03.01.05.06 Operasi prasarana sumber daya air
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 pekerjaan umum	RAD.03.01.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	RAD.03.02.01 pembinaan transmigrasi regional	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.02 .01 Penyiapan Permukiman Transmigrasi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.02 .02 Penempatan Pemindahan dan Sarpras
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.02 .03 Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 transmigrasi	RAD.03.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional	

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan. Provinsi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.03 Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.04 Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota dantarif kelas ekonomi angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.05 Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.02 pengelolaan transpor	RAD.03.03.02.06 Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.01 Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.02 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.03 Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.04 Penerbitan : Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.05 Penetapan : Lintas Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.
--------------------------------	------------------------	--	--

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi	RAD.03.03.03.06 Penerbitan Izin : Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional , Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangn Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.01 pembinaan transmigrasi regional	

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAD.03.04.05.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan dan permukiman.
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAD.03.04.05.02 Penyediaan perumahan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	RAD.03.04.05.03 Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 perumahan	RAD.03.04.XX usulan referensi IPPD	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal		

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.01 pembinaan pembangunan regional	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.01 VERIFIKASI PEMEKARAN DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.02 PENYERASIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMDES & BPD
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.03 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.04 EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.01 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.02 LOMBA POSYANDU DAN JAMBORE KADER POSYANDU
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.03 Model Dukungan Penguatan Posyandu Kab/Kota Melalui Kader Posyandu
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.04 IDENTIFIKASI & INVENTARISI LEMBAGA ADAT DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.05 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.06 PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.07 PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.08 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.09 PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.10 GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.11 DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.12 PENGEMBANGAN KAPASITAS & PEMBERDAYAAN USAHA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.13 ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.14 PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.15 LOMBA DESA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAD.03.05.05.01 KOORDINASI PERENCANAAN

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAD.03.05.05.02 FASILITASI KERJA SAMA
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAD.03.05.05.03 KOORDINASI PEMBANGUNAN
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.05 pengembangan daerah tertentu	RAD.03.05.05.04 KOORDINASI FASILITASI PENEKASAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.XX usulan referensi IPPD	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan		
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.01 pembinaan pertanahan regional	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan	

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.04 tata ruang tanah
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.05 litigasi pertanahan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 pertanahan	RAD.03.06.XX usulan referensi IPPD
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	RAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	RAD.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	RAD.03.07.03 keluarga berencana

TABEL 4

RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	RAD.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat	
RAD.03 Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 kependudukan	RAD.03.07.XX usulan referensi IPPD	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan			
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan		
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.01 pembinaan kesehatan regional	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAD.04.01.03.01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAD.04.01.03.02 Penurunan Stunting dan AKI/AKB
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.03 kesehatan masyarakat	RAD.04.01.03.03 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAD.04.01.04.01 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAD.04.01.04.02 Upaya Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

TABEL 4

RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.04 pelayanan kesehatan	RAD.04.01.04.03 Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAD.04.01.05.01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	RAD.04.01.05.02 Surveilans dan Imunisasi
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.06 Program Pencegahan	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.08 pengawasan obat dan makanan	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 kesehatan	RAD.04.01.XX usulan referensi IPPD	
p	RAD.04.02 sosial		
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.01 pembinaan sosial regional	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.01 Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orangtua Tunggal

TABEL 4

RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.02 Layanan Rehabilitasi Sosial
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.03 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.04 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.05 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.03 manajemen sosial	RAD.04.02.03.06 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.04 pembangunan manusia	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.05 penanganan fakir miskin	RAD.04.02.05.01 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

TABEL 4

RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.06 penanggulangan bencana	RAD.04.02.06.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 sosial	RAD.04.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan		
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02.01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.02.02 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.03 kesetaraan gender	RAD.04.03.03.01 Pengarustamaan Gender
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.03 kesetaraan gender	RAD.04.03.03.02 Kegiatan kemitraan
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.04 perlindungan anak	RAD.04.03.04.01 Pemenuhan hak anak
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.04 perlindungan anak	RAD.04.03.04.01 Perlindungan khusus anak
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAD.04.03.05.01 Pencegahan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.05 perlindungan hak perempuan	RAD.04.03.05.02 Penanganan kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang

TABEL 4

RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.06 pertumbuhan dan perkembangan anak	
RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 pemberdayaan perempuan	RAD.04.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan			
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum		
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.01 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Gubernur
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.02 Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.03 Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.04 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.05 Sengketa dan Bantuan Hukum
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan	RAD.05.01.01.06 Penyuluhan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.02 pengelolaan masyarakat	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.03 penyelenggaraan keimigrasian	

TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.04 penyelenggaraan peradilan	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.05 penyelenggaraan penuntutan	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 hukum	RAD.05.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan		
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01 .01 operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penegakan ketertiban umum dalam masyarakat
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01 .02 bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas satgas linmas yang handal

TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01 .03 kegiatan pemetaan rawan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengantisipasi terjadi kebakaran
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.01 Melaksanakan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.02 Melaksanakan kegiatan bela negara dan karakter bangsa
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.03 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.04 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.05 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketahanan ekonomi, sosbud dan agama

TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.06 Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.07 pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.08 pelaksanaan kegiatan penanganan konflik
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.01 pelaksanaan pencegahan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.02 melaksanakan kesiapsiagaan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.03 Melaksanakan kegiatan kedaruratan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.04 pengadaan logistik
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.05 melakukan rehabilitasi
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	RAD.05.02.01.06 melakukukan rekonstruksi
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.02 pengayoman masyarakat	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.03 penanggulangan transnasional dan terorisme	

TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum	RAD.05.02.04.01 penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses hukum.
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum	RAD.05.02.04 .02 pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.04 penegakan hukum	RAD.05.02.04 .03 hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 keamanan	RAD.05.02.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 4

RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.03 hak asasi manusia		
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.03 hak asasi manusia	RAD.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAD.05.03.01.01 pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.03 hak asasi manusia	RAD.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia	RAD.05.03.01.02 penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.03 hak asasi manusia	RAD.05.03.02 hak atas kekayaan intelektual	
RAD.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.03 hak asasi manusia	RAD.05.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja			
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan		
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .01 Perhitungan dan pemetaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .02 Penyediaan PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .03 Penataan dan Pendistribusian PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .04 Pengembangan Karier PTK satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .05 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan	RAD.06.01.01 .06 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Pendidikan SMA, SMK dan SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.03 pendidikan dasar	RAD.06.01.03.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.01 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/SMA.SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.03 Pengelola Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.04 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD, SMP, SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.05 Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.06 Penyusunan Silabus Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.07 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.08 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.09 Pelatihan/Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.12 Proses Izin Operasional SMA/SMK/SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.04 pendidikan menengah	RAD.06.01.04.13 Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.05 pendidikan tinggi	-
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.06 pendidikan vokasi	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 pendidikan	RAD.06.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan		
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAD.06.02.01.01 Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	RAD.06.02.01.02 Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	RAD.06.02.03.01 Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 ketenagakerjaan	RAD.06.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi		
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.01 penelitian ilmu dasar	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.02 penelitian inter dan multi disiplin	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.03 pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.04 pengkoordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.06 penginderaan jauh	

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.07 teknologi penerbangan dan antariksa	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.08 tenaga nuklir	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.10 pengkordinasian sistem nasional teknologi	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 ilmu pengetahuan dan teknologi	RAD.06.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda		
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAD.06.05.01.01 Pembinaan Atlet PPLP
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAD.06.05.01.02 Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAD.06.05.01.03 Pelaksanaan Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAD.06.05.01.04 Pembinaan Atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional	RAD.06.05.01.04 Pelatihan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Instruktur, Wasit dan Juri
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAD.06.05.01.01 Seleksi Pemuda Berprestasi
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.01 pemberdayaan pemuda	RAD.06.05.01.02 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

TABEL 4

RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.02 pengembangan pemuda	RAD.06.05.02.01 Pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar paskibraka
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.02 pengembangan pemuda	RAD.06.05.02.02 Pelatihan Kewirausahaan
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.02 pengembangan pemuda	RAD.06.05.02.03 Pelatihan Kewirausahaan (Disabilitas)
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.02 pengembangan pemuda	RAD.06.05.02.04 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04 pemuda	RAD.06.05.XX usulan referensi IPPD	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 olahraga		
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 olahraga	RAD.06.06.01 pembinaan olahraga regional	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 olahraga	RAD.06.06.01 pembudayaan olahraga	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 olahraga	RAD.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga	
RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 olahraga	RAD.06.06.XX usulan referensi IPPD	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam			
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan		

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD.07.01.01 pembinaan pertambangan regional	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD.07.01.02 geologi	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD.07.01.03 mineral dan batubara	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD.07.01.04 minyak dan gas bumi	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD.07.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 pertambangan	RAD... bidang pertambangan	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi		
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 pembinaan energi regional	RAD.07.02.01.01 Dokumen kebijakan HHBK di provinsi NTT
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 pembinaan energi regional	RAD.07.02.01.02 rekomendasi sentra komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 pembinaan energi regional	RAD.07.02.01.03 rekomendasi pengendalian produksi dan produktivitas SDA

Vle

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 pembinaan energi regional	RAD.07.02.01.04 kebijakan pertambangan dan uisaha pemulihan lingkungan hidup
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 pembinaan energi regional	RAD.07.02.01.05 pengelolaan konservasi perairan di provinsi NTT
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.01 energi baru dan terbarukan	RAD.07.02.01 .01 Monitoring dan evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.02 ketenagalistrikan	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.03 konservasi energi	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.02 energi	RAD.07.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan		
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pembinaan kehutanan regional	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.01 Tata Lingkungan dan Kehutanan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.02 Pengkajian dampak lingkugan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.03 Penggunaan dan Pemanfaatan hutan

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.04 pemberdayaan masyarakat
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.05 penyuluhan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya	RAD.07.03.01.06 bina usaha kehutanan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.02 peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAD.07.03.03.01 Pengamanan dan penegakan hukum
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAD.07.03.03.02 pengendalian dan pencemaran kerusakan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.03 perlindungan kawasan hutan	RAD.07.03.03.03 Konservasi sumber daya alam dan ekosistem
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.03 kehutanan	RAD.07.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan		

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.01 pembinaan kelautan regional	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.01 kemaritiman	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.02 tata ruang laut	RAD.07.04.02.01 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAD.07.04.03.01 pemanfaatan kawasan konservasi perairan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan	RAD.07.04.03.02 pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.04 sumber daya kelautan	RAD.07.04.04.01 mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.04 sumber daya kelautan	RAD.07.04.04.02 Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Vb

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.04 sumber daya kelautan	RAD.07.04.04.03 pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.04 kelautan	RAD.07.04.XX usulan referensi IPPD	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup		
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAD.07.05.01.01 pengolahan sampah dan limbah B3
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RA.02 B.07.05.01 pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan daerah aliran sungai
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	RAD.07.05.01.03 rehabilitasi hutan dan lahan
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.03 manajemen iklim dan cuaca	

TABEL 4

RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.04 pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca	
RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 lingkungan hidup	RAD.07.05.XX usulan referensi IPPD	
RAD.08 Budaya dan agama			
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama		
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.02 pendidikan agama	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.03 pelatihan keagamaan	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.04 penyelenggaraan haji dan umroh	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.05 sertifikasi produk halal	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.01 agama	RAD.08.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan		
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.01 pembinaan kebudayaan regional	

TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.01 kesejarahan	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .01 Penetapan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02.02 Pendaftaran Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .03 Pengelolaan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .04 Pengelolaan Perlindungan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .05 Pemanfaatan Perlindungan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .06 Pembenahan Dukungan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .07 Pembinaan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .08 Penerbitan Ijin Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .09 Penetapan Warisan Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya	RAD.08.02.02 .10 Pengkajian GHS Cagar Budaya
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya	RAD.08.02.03.01 Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi budaya secara terpadu

TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya	RAD.08.02.03.02 Pembinaan peningkatan mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya	RAD.08.02.03.03 Peningkatan pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya	RAD.08.02.03.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.03 manajemen budaya	RAD.08.02.03.05 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.01 Deposit Bahan Pustaka
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.02 Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.03 Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.04 Layanan Perpustakaan
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.05 Pembinaan Perpustakaan
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.04 pembinaan kepastakaan	RAD.08.02.04.06 Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.05 pembinaan kepastakaan dan arsip nasional	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.06 pengembangan sastra Indonesia	

TABEL 4

RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.07 pembinaan perfilman nasional	
RAD.08 Budaya dan agama	RAD.08.02 kebudayaan	RAD.08.02.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum			
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.01 pemerintahan dalam negeri	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.03 pembinaan otonomi daerah	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .01 Administrasi Pemerintahan dan Adiministrasi Kewilayahan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .02 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .03 Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .04 Kerja Sama Antar Pemerintah

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .05 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .06 Mental Spiritua
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .07 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04 .08 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.01 Fasilitas Hubungan antar lembaga
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.02 Koordinasi Forkaapsi & Pemda lainnya
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.03 Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.04 Peningkatan Komunikasi Tokoh masyarakat, pimpinan, ormas/orsos/keagamaan, dan Pers dan pemerintah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.05 Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.06 Fasilitas TKI dan masyarakat NTT yang bermasalah dan terlanjar di Jabodetabek
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.07 Promosi Budaya dan produk unggulan Daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.08 Fasilitas Kerjasama investasi Daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.09 Pelayanan Pengunjung Anjungan NTT-TMII
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.01 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.02 pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.03 penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN

1/6

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.02 Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.03 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan Provinsi

VL

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.04 Mengkoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, revidu sesuai ketentuan dan prosedur guna menjamin obyektifitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.05 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.06 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.07 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.08 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.09 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut



TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.04 pemerintahan daerah	RAD.09.01.04.10 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.05 pembinaan keuangan daerah	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.06 pelaksanaan program prioritas nasional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.01.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAD.09.02.01.01 pembinaan dan evaluasi wilayah 1
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAD.09.02.01.02 pembinaan dan evaluasi wilayah 2

Vb

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.01 dalam negeri	RAD.09.02.01 pembinaan keuangan instansi	RAD.09.02.01.03 pembinaan dan evaluasi wilayah 3
			RAD.09.02.01.01 pembinaan keuangan
			RAD.09.02.01.02 pembinaan pengadaan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.01 Pelayanan Keuangan Pimpinan dan ASN
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.01 penyusunan anggaran bidang pemerintahan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.02 penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.03 penyusunan anggaran bidang administrasi umum
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.03 pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.04 pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.05 pengelolaan kas dan pembinaan bendahara
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.06 akuntansi pendapatan, piutang, dan penerimaan pembiayaan

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.07 akuntansi belanja aset, hutang, dan pengeluaran pembiayaan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.08 akuntansi penyusunan laporan keuangan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.01 pendataan dan penetapan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.02 layanan dan keberatan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.03 pembukuan dengan penagihan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.04 kegiatan penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitas pendataan dan penerimaan dan evaluasi pungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.05 kegiatan penyusunan bahan fasilitas pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Vb

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	RAD.09.02.02.06 kegiatan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan mencakup pungutan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.03 fiskal	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.04 kepabeanan dan cukai	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.05 penganggaran	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.06 perbendaharaan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.07 manajemen perekonomian	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.01 litigasi pengadaan barang dan jasa
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.02 kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan

1/6

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.03 pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.04 pengelolaan SDM pengadaan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.03 pengelolaan barang milik negara
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.05 Pelayanan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.01 analisa kebutuhan dan pengadaan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.02 penatausahaan aset
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.03 penetapan status dan penilaian aset
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.04 pemanfaatan aset
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.05 pemindahtanganan dan pengamanan aset
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	RAD.09.02.08.06 pengamanan dan penyelesaian sengketa aset
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.09 pengelolaan pajak	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.02 keuangan	RAD.09.02.XX usulan referensi IPPD	

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.01 Sistem Informasi Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.01 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.02 Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Terintegrasi dan Pelayanan Publik Yg Terintegrasi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.03 Layanan Pemeliharaan Aplikasi pemerintahan dan publik
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.04 Layanan pengembangan business process re-engineering (BPR)
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.05 Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart prov./city.
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.06 Pengelolaan portal dan website pemerintah prov. dan Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Prov. NTT

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.07 Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.08 Penyediaan sarana dan prasarana publikasi website Prov. NTT
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.09 Perencanaan/MasterPlan dan Arsitektur Infrastruktur TIK
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.10 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi (WAN, MAN,
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.11 Pengelolaan dan pengendalian layanan sarana prasarana TIK, Jaringan, NOC & Server
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.12 Pengelolaan Akses Layanan Insternet dan Manajemen Bandwith
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.13 Pengawasan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.14 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.15 Layanan Hosting dan Colocation Server

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.01 pengelolaan informatika	RAD.09.03.01.01 pembinaan pengelolaan informatika instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.01 pembinaan kegiatan statistik instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.02 pengelolaan kegiatan statistik dasar
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.03 pengelolaan kegiatan statistik sektoral
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.01 Pengumpulan dan Penyusunan Updating Data Sektoral
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.02 Pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.03 Monitoring dan Evaluasi Data Sektoral
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.04 pengelolaan kegiatan statistik khusus
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.05 Pembinaan Kegiatan Statistik Nasional
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.03 pengelolaan data statistik	RAD.09.03.03.06 Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kependudukan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.04 pengelolaan data geospasial	

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi Publik berbasis elektronik
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.02 Meningkatkan peran media informasi dalam penyampaian program-program pemerintah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.03 Layanan Publik Permintaan Informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah.
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.04 Pengelolaan data dan informasi berbasis web
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.06 penyiaran radio publik	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.07 penyiaran televisi publik	
		RAD.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.03.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi		

Vle

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.03 informasi	RAD.09.04.01 pembinaan komunikasi regional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi	RAD.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik	RAD.09.04.02.01 Peningkatan Kualitas dan kuantitas layanan komunikasi publik berbasis elektronik
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi	RAD.09.04.03 pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi	RAD.09.04.04 serta penyelenggaraan pos	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi	RAD.09.04.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.04 komunikasi		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01.01 pembinaan perencanaan pembangunan institutional

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.02 pengawasan penyimpangan pembangunan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAD.09.05.03.01 pemantauan dan pengendalian inflasi daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAD.09.05.03.02 sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAD.09.05.03.03 pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.03 manajemen ekonomi makro	RAD.09.05.03.04 Pelaksanaan koordinas, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.04 kerangka regulasi	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.05 kelembagaan dan pendanaan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.06 strategi pembangunan nasional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.01 PERENCANAAN DAN PENDANAAN

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.02 DATA DAN INFORMASI
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.04 PEMERINTAHAN DAN POLITIK
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.05 PEMBANGUNAN MANUSIA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.06 KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.07 PEREKONOMIAN
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.08 SUMBER DAYA ALAM
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.09 PARIWISATA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.10 INFRASTRUKTUR
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.11 KEWILAYAHAN

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.12 TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.13 SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.14 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	RAD.09.05.07.15 INOVASI DAN TEKNOLOGI
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.01 pembinaan kepegawaian instansi

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.02 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.03 Legalisasi Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.04 Pengembangan SDM Kesehatan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.01 Sistem Informasi Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.02 Pendidikan Aparatur
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.03 Perencanaan dan Formasi Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.01 Jabatan Struktural
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.02 Penilaian Kompetensi Kinerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.03 Fungsional Tertentu
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.01 Perencanaan Budaya Kerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.02 Penerapan Kelompok Budaya Kerja

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.03 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.01 Penempatan Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.02 Pensiun Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.03 Kenaikan Pangkat Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.01 Kesejahteraan Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.02 Displin Pegawai
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.03 Korpri
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02.01 kegiatan kesemaptan satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .02 pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan sumber daya aparatur
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .01 Pelatihan Dasar
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .02 Pelatihan kepemimpinan

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .03 Pemerintahan dan sosial kultural
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .04 Kompetensi teknis
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .05 Kompetensi fungsional
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	RAD.09.06.02 .06 Kurikulum dan perangkat
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.01 pembinaan kelembagaan instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.02 Penataan Kelembagaan Provinsi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.03 Penyusunan Uraian Tugas
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.04 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.05 Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.06 Evaluasi Jabatan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.01 Sertifikasi dan kelembagaan

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.02 Sistem Informasi pengembangan kompetensi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.03 sarana dan prasarana
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.01 PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.02 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.03 kelembagaan	RAD.09.06.03.03 PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.02 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.03 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.04 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.01 Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.02 Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.03 Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI)
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.04 Menyelia pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP) terhadap obrik yang diperiksa

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.05 Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.06 Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.07 Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan hasil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas

VRe

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.08 Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.09 Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada instansi yang diperiksa
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.10 Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan segera melakukan tindak lanjut
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.11 Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.12 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.13 Menyampaikan saran/ masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan melalui nota dinas dan latta telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.01 pembinaan akuntabilitas kinerja instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.02 Penyusunan RKT
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.03 Penyusunan Perjanjian Kinerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.04 Pengukuran Kinerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.05 Pelaporan Kinerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.06 Evaluasi Kinerja
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.01 pembinaan pelayanan publik instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.02 Penyusunan dan Penerapan SPP
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.03 Pengelolaan SP4N LAPOR
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.04 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.01 PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.01 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik	RAD.09.06.06.01 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.01 pembinaan SPBE instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.01 Peningkatan Kapasitas Manajemen SPBE

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.02 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.02 Penyusunan Peta Proses Bisnis
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.03 Penyusunan SOP-AP
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.04 Evaluasi SOP-AP Perangkat Daerah
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.01 PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.02 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	RAD.09.06.07.03 PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.01 pembinaan kearsipan instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.01 Pengelolaan Arsip Dinamis
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.02 Pengelolaan Arsip Statis
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.03 Layanan dan Pemanfaatan Arsip

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.04 Pembinaan Kearsipan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.05 Pembinaan SDM Kearsipan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.05 Pengawasan Kearsipan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara	RAD.09.06.09.01 pembinaan pengawasan ASN instansi
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.0.XX usulan referensi IPPD	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.06 aparatur negara	RAD.. pengelolaan dukungan organisasi	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara		
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.01 kerumahtanggaan kepresidenan	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.03 ketahanan nasional	
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi	

TABEL 4

RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.05 pengawasan pemerintahan
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.06 pengkajian strategis
RAD.09 Pemerintahan Umum	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan
RAD.09 Pemerintahan Umum -	RAD.09.07 kesekretariatan negara	RAD.09.07.XX usulan referensi IPPD

11/6

TABEL 4

Instansi Pengampu	Deskripsi
5	6
	Deskripsi untuk level1
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, ketahanan nasional, kerjasama internasional pertahanan, pertahanan negara, dan pertahanan siber.
Kemenhan	Penyelenggaraan pertahanan negara secara umum, termasuk di dalamnya keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia dan kemanusiaan, kekuatan pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertahanan, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pertahanan,
Kemenhan	Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan dan instalasi strategis pertahanan.

TABEL 4

Kemenhan	Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.
Kemenhan	Perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.
BIN	Penyelenggaraan koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di dalam negeri dan di luar negeri.
BNPT	Penyelenggaraan penangkalan dan penindakan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
BSSN	Penyelenggaraan pertahanan siber yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, pengkoordinasian kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, serta pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional.
semua	



TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri, termasuk di dalamnya misi internasional, kerja sama internasional, dan politik luar negeri.
Kemenlu	Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Kemenlu	Perumusan, penetapan, dan pengelolaan kebijakan di bidang politik luar negeri.

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri, termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, peneraan, pelayanan pendapatan negara bukan pajak, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital, dan pengelolaan iklim usaha.
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan di bidang ketahanan industri dan kerja sama.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri.



TABEL 4

Kemenperin	Pengelolaan kebijakan nasional serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri.
Kemenparekraf	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk kreatif bidang ekonomi kreatif.
Kemenperin	Perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan pengembangan iklim usaha.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.
Semua	
Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	

TABEL 4

Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	
Kemendag	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.
Semua	
Kementan	

Ule

TABEL 4

Kementan	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.
Kementan	
Kementan	Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan, benih dan bibit tanaman, pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dukungan perkebunan terhadap ketahanan pangan, dan pengembangan bio energi.

TABEL 4

Semua	
Kementan	
Kementan	
Kementan	
Kementan	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.

UG

TABEL 4

Semua	Pasal 22 butir d

VB

TABEL 4

Kementan	
Kementan	
Kementan	
Kementan	

UB

TABEL 4

Kementan	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
Semua	Pasal 19

Ubr

TABEL 4

Kemenlaut	
Kemenlaut	
Kemenlaut	

U6

TABEL 4

Kemenlaut	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara, pengembangan bisnis strategis, serta penguatan daya saing dan kesinergian badan usaha milik negara.
Semua	Pasal 38
KemenBUMN	
KemenBUMN	

116

TABEL 4

KemenBUMN	
KemenBUMN	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, litigasi penanaman modal, dan manajemen perizinan serta akreditasi penanaman modal, termasuk di dalamnya badan usaha, penanaman modal, perekrutan pekerja migran, dan lembaga sertifikasi.
Kemeninves	

TABEL 4

Kemeninves	
Kemeninves	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi termasuk di dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.
Semua	Pasal 35

TABEL 4

Kemenkop	
Kemenkop	
Kemenkop	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, dukungan dan regulasi pengembangan usaha, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Semua	Pasal 35

Uk

TABEL 4

Kemenkop	
Kemenkop	
Kemenkop	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Semua	Pasal 3 dan 29

TABEL 4

Kemenpar	
ata	
riwisata	
ia	
la	
Kreatif	
aran.	

16

TABEL 4

Kemenpar	
Kemenpar	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa kontruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.
Semua	Pasal 5
KemenPUPR	

10

TABEL 4

KemenPUPR	
KemenPUPR	

18

TABEL 4

KemenPUPR	

10

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.
Semua	Pasal 12
Kemendes	
Kemendes	
Kemendes	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
Semua	Pasal 3

TABEL 4

Kemenhub	

TABEL 4

Kemenhub	

116

TABEL 4

--	--

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.
Semua	Pasal 27

116

TABEL 4

KemenPUPR	
KemenPUPR	
KemenPUPR	
KemenPUPR	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.

U6

TABEL 4

186

TABEL 4

10

TABEL 4

16

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.

16

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pengendalian penduduk, pencatatan sipil, keluarga berencana, pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengawasan obat dan makanan.

Ue

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana.

Ug

TABEL 4

16

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan masyarakat, penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan keimigrasian.

10

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan termasuk di dalamnya ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan transnasional dan terorisme, penegakan hukum, intelejen keamanan, dan pengelolaan lalu lintas.

TABEL 4

TABEL 4

116

TABEL 4

186

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan vokasi, dan pembinaan kepustakaan.

TABEL 4

100

TABEL 4

14e

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja.
Semua IPPD	
Kemenaker	

TABEL 4

Kemenaker	Perpres 18-2015, Pasal 13
Semua IPPD	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan termasuk di dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan termasuk di dalamnya geologi, pengelolaan sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi.

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.

U₂

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.

Ule

TABEL 4

[illegible]

TABEL 4

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup, manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama termasuk di dalamnya bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.
Kemenag	
Kemenag	
Kemenag	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya, pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.

Ue

TABEL 4

Ue

TABEL 4

116

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.

16

TABEL 4

145

TABEL 4

26

TABEL 4

116

TABEL 4

Vle

TABEL 4

Vle

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pajak.

TABEL 4

He

TABEL 4

Vle

TABEL 4

LKPP & KPKNL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta pengelolaan aset negara
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penyelesaian terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Ue

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
Semua IPPD	

Ule

TABEL 4

Ule

TABEL 4

Kemenkominfo	
BPS	diskominfo statistik mengerjakan level 5
BPS	
semua	
BIG, dll	
semua	

Ue

TABEL 4

1/6

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.
BAPPENAS	
semua	

TABEL 4

He

TABEL 4

VB

TABEL 4

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
BKN	
semua	

TABEL 4

PANRB	

176

TABEL 4

PANRB	
semua	

16

TABEL 4

PANRB	
semua	

166

TABEL 4

18

TABEL 4

16

TABEL 4

16

TABEL 4

PANRB	
semua	
PANRB	

16

TABEL 4

semua	
PANRB	
semua	

VL

TABEL 4

ANRI	
semua	

116

TABEL 4

BPKP	
semua	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Nle

TABEL 4

VL

TABEL 5

Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data
11	12	13	14
Terdiri dari data Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani Peningkatan Produksi Serealia, Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian dan Peningkatan Produksi Hortikultura	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang menangani Pengelolaan Lahan dan Air, Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pengelolaan ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang menangani Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan dan Penyuluhan	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
	Pengelolaan Data Pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.03 pertanian	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang menangani Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar	Pengelolaan Data Perkebunan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.04 perkebunan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perkebunan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.04 perkebunan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perkebunan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.04 perkebunan	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Pembangunan Sumber Daya Industri yang menangani Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi dan Sumber Daya Alam dan Pengawasan dan Pengendalian.	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas
	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas
Terdiri dari data Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri yang menangani Pembangunan IKM, Pembangunan IKM dan Pengolahan Data dan Informasi Industri	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas
	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas
	Pengelolaan Data Industri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.01 industri	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Pengembangan Perdagangan yang menangani Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengembangan perdagangan luar negeri	Pengelolaan Data Perdagangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.02 perdagangan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perdagangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.02 perdagangan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perdagangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.02 perdagangan	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang menangani Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur	Pengelolaan Data Perdagangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.02 perdagangan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perdagangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.02 perdagangan	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan populasi pertumbuhan ternak yang menangani : 1. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan. 2. Pengendalian dan pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. 3. Serta Pakan serta Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengelolaan Data Peternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
	Pengelolaan Data Pternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Peningkatan presentase prasarana ternak yang memnuhi standar yang menangani Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung, dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pengelolaan Data Pternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
	Pengelolaan Data Pternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
	Pengelolaan Data Pternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Peningkatan jumlah ternak yang sehat yang menangani Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Pengelolaan Data Peternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
	Pengelolaan Data Peternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar yang menangani Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pengelolaan Data Peternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Peternakan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.05 peternakan	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing yang menangani Pengembangan kompetensi dan kualitas koperasi perempuan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing, Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM Koperasi dan kelembagaan Koperasi Aktif berdigitalisasi melalui pengembangan Usaha dan Peran SDM Koperasi	Pengelolaan Data Koperasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.09 koperasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Koperasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.09 koperasi	Terbatas
	Pengelolaan Data UKM yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pengembangan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing yang menangani UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM	Pengelolaan Data UKM yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data UKM yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	Terbatas
	Pengelolaan Data UKM yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.10 usaha kecil dan menengah	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja yang menangani pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dan Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum	Pengelolaan Data Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.06.02 ketenagakerjaan	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.06.02 ketenagakerjaan	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.06.02 ketenagakerjaan	Terbatas
Terdiri dari data Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang menangani Penyiapan Permukiman Transmigrasi, Penempatan Pemindahan dan Sarpras dan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya	Pengelolaan Data Transmigrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.02 transmigrasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transmigrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.02 transmigrasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transmigrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.02 transmigrasi	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya , Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya .	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas

TABEL 5

11	12	13	14
	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Perikanan Tangkap yang menangani kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Merencanakan operasional Perikanan Tangkap	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
11	12	13	14

TABEL 5

Terdiri dari data Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan dan penegakan hukum perikanan dan kelautan	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
Terdiri dari data Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan dan pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Perikanan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.06 perikanan	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang menangani kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kelautan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.07.04 kelautan	Terbatas
Terdiri dari data Pemasaran Pariwisata yang menangani Informasi Pemasaran Pariwisata, Promosi Pariwisata dan Analisa Pasar Pariwisata	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang menangani Sarana Prasarana, Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Industri Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif dan Jaringan Pemasaran.	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
	Pengelolaan Data Pariwisata yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.02.11 pariwisata	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Bina Marga yang menangani perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan umum dan teknis kegiatan bina marga , kegiatan pembangunan dan laboratorium teknik dan Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
Terdiri dari data Pembangunan Sumber Daya air dan Irigasi yang menangani pelaksanaan Perencanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya air dan irigasi, Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan irigasi dan Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sumber daya air	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
Terdiri dari data Pengoperasian Sumber daya air dan irigasi yang menangani Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi, Operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan Operasi prasarana sumber daya air	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
Terdiri dari data Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah yang menangani Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, Pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan Pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan Cipta Karya yang menangani perencanaan dan melaksanakan Perencanaan dan pengendalian kegiatan cipta karya, Penataan Bangunan gedung dan lingkungan dan Penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
	Pengelolaan Data Pekerjaan Umum yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.01 pekerjaan umum	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pembangunan dan pengelolaan Perumahan dan Permukiman yang menangani Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian perumahan dan permukiman, Penyediaan perumahan dan Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan	Pengelolaan Data Perumahan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.04 perumahan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perumahan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.04 perumahan	Terbatas
	Pengelolaan Data Perumahan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.04 perumahan	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Penyelenggaraan lalu lintas jalan yang menangani Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi, Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan provinsi dan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Persetujuan Andalalin Serta Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Penyelenggaraan angkutan jalan yang menangani Penetapan : kawasan perkotaan, jaringan trayek, wilayah operasi, kuota dantarif kelas ekonomi angkutan umum lintas kab./kota dalam provinsi, Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Penyediaan Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Lintas Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi NTT, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
Terdiri dari data Pengelolaan perkeretaapian jalan yang menangani Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Ka Umum Dan Khusus; Jaringan Pelayanan; Dan Kelas Stasiun Ka Umum Pada Lintasan Dalam Provinsi, Penerbitan Izin Usaha; Izin Pembangunan; Izin Operasional Sarana Dan Prasarana Ka Umum Dan Khusus Pada Lintasan Dalam Provinsi.	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas

TABEL 5

Terdiri dari data Pengelolaan angkutan pelayaran yang menangani Penerbitan : Izin Usaha Angkutan Laut, Pelayaran Rakyat, Trayek Angkutan Sungai dan Danau, Terkait Bongkar Muat Barang, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan dan jasa Angkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal, dan Penetapan : Lintas Penyeberangan untuk Kapal dalam jaringan jalan provinsi atau jaringan jalur kereta api provinsi, Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Antar Pelabuhan dalam Provinsi dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam provinsi.	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
11	12	13	14

TABEL 5

	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
11	12	13	14

TABEL 5

Terdiri dari data Pengelolaan kepelabuhan yang menangani Penerbitan Izin : Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional , Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kab./Kota dalam Prov, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangn Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional selama 24 Jam, Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pembangunan : Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Kab. Kota Dalam Provinsi..	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas
11	12	13	14
	Pengelolaan Data Transportasi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.03.03 transportasi	Terbatas



TABEL 5

Terdiri dari data Penyediaan data/dokumen kependudukan dan catatan sipil yang menangani Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kependudukan.	Pengelolaan Data Informasi Kependudukan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.09.03 informasi	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Peningkatan sdm kesehatan yang menangani Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dan Legalisasi Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Diklat dan Pengembangan SDM Kesehatan	Pengelolaan Data Aparatur Negara yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.09.06 aparatur negara	Terbatas
	Pengelolaan Data Aparatur Negara yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.09.06 aparatur negara	Terbatas
	Pengelolaan Data Aparatur Negara yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.09.06 aparatur negara	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan kesehatan masyarakat yang menangani Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penurunan Stunting dan AKI/AKB, dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas

TABEL 5

	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
11	12	13	14
Terdiri dari data Pencegahan dan pengendalian penyakit yang menangani Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dan Surveilens dan Imunisasi	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
Terdiri dari data Peningkatan pelayanan kesehatan yang menangani Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Upaya Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional dan Ketersediaan layanan farmasi dan alkes serta perbekalan kesehatan	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas
	Pengelolaan Data Kesehatan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	RAD.04.01 kesehatan	Terbatas

TABEL 5

Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab	Interoperabilitas	ID metadata terkait
15	16	17	18	19
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.1
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.2
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.3
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.4
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.5

Ng

TABEL 5

DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.6
15	16	17	18	19
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.7
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.8
DATA PERTANIAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERTANIAN	DAD-P.9
DATA PERKEBUNAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERKEBUNAN	DAD-P.10
DATA PERKEBUNAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERKEBUNAN	DAD-P.11
DATA PERKEBUNAN	Tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DATA PERKEBUNAN	DAD-P.12

TABEL 5

DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.13
15	16	17	18	19
DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.14
DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.15
DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.16
DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.17
DATA INDUSTRI	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA INDUSTRI	DAD-P.18

TABEL 5

DATA PERDAGANGAN	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA PERDAGANGAN	DAD-P.19
DATA PERDAGANGAN	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA PERDAGANGAN	DAD-P.20
DATA PERDAGANGAN	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA PERDAGANGAN	DAD-P.21
15	16	17	18	19
DATA PERDAGANGAN	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA PERDAGANGAN	DAD-P.22
DATA PERDAGANGAN	Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DATA PERDAGANGAN	DAD-P.23
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.24

TABEL 5

DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.25
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.26
15	16	17	18	19
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.27
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.28
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.29

TABEL 5

DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.30
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.31
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.32
15	16	17	18	19
DATA PETERNAKAN	Tahunan	Dinas Peternakan	DATA PETERNAKAN	DAD-P.33

My

TABEL 5

DATA KOPERASI	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA KOPERASI	DAD-P.34
DATA KOPERASI	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA KOPERASI	DAD-P.35
DATA UKM	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA UKM	DAD-P.36
15	16	17	18	19
DATA UKM	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA UKM	DAD-P.37

TABEL 5

DATA UKM	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA UKM	DAD-P.38
DATA UKM	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA UKM	DAD-P.39
DATA KETENAGAKERJAAN	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA KETENAGAKERJAAN	DAD-P.40
15	16	17	18	19
DATA KETENAGAKERJAAN	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA KETENAGAKERJAAN	DAD-P.41

TABEL 5

DATA KETENAGAKERJAAN	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA KETENAGAKERJAAN	DAD-P.42
DATA TRANSMIGRASI	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA TRANSMIGRASI	DAD-P.43
DATA TRANSMIGRASI	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA TRANSMIGRASI	DAD-P.44
DATA TRANSMIGRASI	Tahunan	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DATA TRANSMIGRASI	DAD-P.45
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.46

TABEL 5

15	16	17	18	19
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.47
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.48
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.49
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.50
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.51
15	16	17	18	19

TABEL 5

DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.52
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.53
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.54
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.55
DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.56

TABEL 5

DATA PERIKANAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA PERIKANAN	DAD-P.57
15	16	17	18	19
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.58
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.59
DATA KELAUTAN	Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	DATA KELAUTAN	DAD-P.60
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.61

TABEL 5

DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.62
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.63
15	16	17	18	19
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.64
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.65
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.66
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.67



TABEL 5

DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.68
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.69
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.70
15	16	17	18	19
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.71
DATA PARIWISATA	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DATA PARIWISATA	DAD-P.72
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.73



TABEL 5

DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.74
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.75
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.76
15	16	17	18	19
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.77
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.78
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.79

TABEL 5

DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.80
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.81
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.82
15	16	17	18	19
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.83
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.84
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.85

TABEL 5

DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.86
DATA PEKERJAAN UMUM	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PEKERJAAN UMUM	DAD-P.87
15	16	17	18	19
DATA PERUMAHAN	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PERUMAHAN	DAD-P.88
DATA PERUMAHAN	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PERUMAHAN	DAD-P.89
DATA PERUMAHAN	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DATA PERUMAHAN	DAD-P.90

TABEL 5

DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.91
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.92
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.93
15	16	17	18	19
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.94

Handwritten signature

TABEL 5

DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.95
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.96
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.97
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.98
15	16	17	18	19
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.99

TABEL 5

DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.100
15	16	17	18	19

TABEL 5

DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.101
15	16	17	18	19

TABEL 5

DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.102
15	16	17	18	19
DATA TRANSPORTASI	Tahunan	Dinas Perhubungan	DATA TRANSPORTASI	DAD-P.103

Handwritten signature

TABEL 5

DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN	DAD-P.104
15	16	17	18	19
DATA APARATUR NEGARA	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA APARATUR NEGARA	DAD-P.105
DATA APARATUR NEGARA	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA APARATUR NEGARA	DAD-P.106
DATA APARATUR NEGARA	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA APARATUR NEGARA	DAD-P.107
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.108
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.109

TABEL 5

DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.110
15	16	17	18	19
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.111
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.112
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.113
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.114
DATA KESEHATAN	Tahunan	DINAS KESEHATAN	DATA KESEHATAN	DAD-P.115

REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN

TABEL 6

Usulan Referensi Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE
Tingkat Tiga dan Empat untuk Keperluan Internal Asdep SPBE KemenPANRB

Tk. 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat n
1	2	3	4	5
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	RAL 01.01.01 Pertahanan Siber		
		RAL 01.01.02 Kerja Sama Internasional Pertahanan dan Keamanan		
		Pertahanan Negara		
		RAL 01.01.03 Intelejen		
		RAL 01.01.04 Koordinasi Intelijen		
		RAL 01.01.05 Ketahanan Nasional		
		RAL 01.01.06 Penanggulangan Ancaman		
		RAL 01.01.07 Instalasi Strategis dan Potensi Pertahanan		
		RAL 01.01.08 Penelitian Ketahanan Nasional		
	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	RAL 01.02.01 Diplomasi Internasional		
		RAL 01.02.02 Misi Kemanusiaan		
		RAL 01.02.03 Misi Perdamaian Dunia		
		RAL 01.02.04 Politik Luar Negeri		
		RAL 01.02.05 Kerja Sama International		
	RAL 01.03. Kenegaraan	RAL 01.03.01 Kelembagaan Negara		
		RAL 01.03.02 Nilai-nilai Kebangsaan		

U6

TABEL 6

		RAL 01.03.03 Pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila		
		RAL 01.03.04 Pembangunan Manusia Indonesia		
		RAL 01.03.05 Politik		
		RAL 01.03.06 Penyerapan Aspirasi Masyarakat		
		RAL 01.03.07 Program Prioritas Nasional		
	RAL 01.04. Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro		
		RAL 01.04.02 Kebijakan Perekonomian		
		RAL 01.04.03 Litigasi Perekonomian		
	RAL 01.05. Industri	RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri	
		RAL 01.05.02 Pengembangan Ekonomi Digital		
		RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai		
		RAL 01.05.04 Pelayanan PNPB		
		RAL 01.05.05 Industri Maritim		
		RAL 01.05.06 Ketahanan Industri		
		RAL 01.05.07 Peneraan/Kalibrasi		
		RAL 01.05.08 Pengembangan Industri		
		RAL 01.05.09 Pengembangan Industri Hijau		
		RAL 01.05.10 Pengembangan Industri Strategis		
		RAL 01.05.11 Pengembangan Produk Kreatif		
		RAL 01.05.12 Standar Nasional Indonesia		

MC

TABEL 6

	RAL 01.06. Perdagangan	Ekspor dan Impor		
		Penggunaan Produk Dalam Negeri		
		Perdagangan Berjangka Komoditi		
		Perdagangan Domestik		
		Perlindungan Konsumen		
	RAL 01.07. Pertanian	Pertanian		
		Ketahanan Pangan		
	RAL 01.08. Perkebunan	Benih dan Bibit Perkebunan		
		pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan		
		pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan		
		kebijakan perkebunan		
	RAL 01.09. Peternakan	Benih dan Bibit Ternak		
		kebijakan peternakan		
		pascapanen peternakan		
		peningkatan kesehatan masyarakat veteriner		
		penyehatan hewan		
	RAL 01.10. Perikanan	Perikanan Budi Daya		
		Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya		
		kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya		
	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	Bisnis Strategis		
		keberlanjutan BUMN/BUMD		
		pengembangan usaha BUMN/BUMD		
		penguatan daya saing BUMN/BUMD		
		peningkatan kinerja BUMN/BUMD		
	RAL 01.12. Investasi	penyelesaian isu investasi		
		perencanaan penanaman modal nasional		

NG

TABEL 6

		promosi penanaman modal		
		pengembangan sektor usaha		
		penanaman modal		
		penanaman modal nasional		
		pembinaan pelaksanaan penanaman modal		
		pelayanan fasilitas penanaman modal		
		kebijakan pelayanan penanaman modal		
	RAL 01.13. Koperasi	Koperasi dan Usaha Mikro		
	RAL 01.14. Usaha Kecil Dan Menengah	Dukungan Bisnis		
		Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
	RAL 01.15. Pariwisata	Pengembangan Kepariwisataaan		
		Pengembangan Lembaga Kepariwisataaan		
		Pengembangan Objek Wisata		
	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Akreditasi Lembaga Kesuaian/Peneraan		
		Akreditasi Lembaga Sertifikasi		
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		Perizinan Penanaman Modal		
		Perizinan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia		
	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Strategis		
	RAL 01.18. Transmigrasi			
	RAL 01.19. Transportasi	Kemananan dan Keselamatan Transportasi		
		Pelayanan Transportasi		
	RAL 01.20. Perumahan	Infrastruktur Permukiman		
		Kawasan Permukiman		

Ne

TABEL 6

		Perumahan Rakyat		
	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Pengembangan Daerah Tertentu		
	RAL 01.22. Pertanahan			
	RAL 01.23. Kependudukan	Pengendalian Penduduk		
		Kebijakan Kependudukan		
		Pencatatan Sipil		
		Keluarga Berencana		
	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Keikutsertaan Masyarakat		
		Otonomi Daerah		
		Administrasi Kewilayahan		
		Pengayoman Masyarakat		
		Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat		
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
	RAL 01.25. Kesehatan	Farmasi dan Alat Kesehatan		
		Kesehatan Masyarakat		
		Pemberdayaan Tenaga Kesehatan		
		Penanggulangan Narkotika		
		Pengawasan Obat dan Makanan		
		Pengendalian Penyakit		
		Pengujian Bahan Adiktif		
		Rehabilitasi		
	RAL 01.26. Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial		
		Penanganan Fakir Miskin		
	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Kesetaraan Gender		
		Perlindungan Anak		
		Perlindungan Hak Perempuan		
	RAL 01.28. Hukum	Keimigrasian		
		Lembaga Pemasyarakatan		

TABEL 6

	RAL 01.29. Keamanan	Penegakan Hukum		
		Pengadilan		
		Peningkatan Lembaga Rehabilitasi		
		Intelijen Keamanan		
			penyuluhan potensi terorisme	
		Keamanan dan Ketertiban Umum		
		Pengelolaan Lalu Lintas		
		Penanggulangan Ancaman Terorisme		
		Pemupukan Jiwa Korsa		
	RAL 01.30. Hak Asasi Manusia	Perlindungan HaKI		
		Kepustakaan		
	RAL 01.31. Pendidikan	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		Pendidikan Anak Usia Dini		
		Pendidikan Dasar		
		Pendidikan Khusus		
		Pendidikan Menengah		
		Pendidikan non-Formal		
		Pendidikan Tinggi		
		Pembinaan Kepustakaan		
	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Keselamatan Kerja		
		Pengelolaan Ketenagakerjaan		
		Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia		
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		
		Penempatan Tenaga Kerja		
	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan Pengembangan Sektor Tertentu		
		Alih Teknologi		
		Inovasi Teknologi		

NG

TABEL 6

		Kemitraan Teknologi		
		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan		
		Teknologi Nuklir		
		Pengkajian dan Penerapan Teknologi		
		y		
		Teknologi Penerbangan dan Antariksa		
		Teknologi Penginderaan Jauh		
	RAL 01.34. Pemuda	Pemberdayaan Pemuda		
	RAL 01.35. Olahraga	kebijakan di bidang pembudayaan olahraga		
		kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga		
	RAL 01.36. Pertambangan			
	RAL 01.37. Energi	Energi Baru		
		Energi Fosil		
		Energi Nuklir		
		Energi Terbarukan		
		Kelistrikan		
		Konservasi Energi		
		Bio Energi		
	RAL 01.38. Kehutanan	Kebakaran Hutan dan Lahan		
		kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari		
		kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan secara berkelanjutan		
		kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan		
		penyuluhan di bidang kehutanan		
	RAL 01.39. Kelautan	Perikanan Tangkap		
		keamanan hasil perikanan tangkap		

TABEL 6

		kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan		
		pengendalian mutu hasil perikanan tangkap		
	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Dampak Perubahan Iklim		
		Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem		
		Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		
		Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam		
		Perkarantinaaan		
		Penanggulangan Bencana		
		Pencarian dan Pertolongan		
		Observasi		
	RAL 01.41. Agama	Haji dan Umroh		
		Kebijakan Hidup Beragama		
		Produk Halal		
	RAL 01.42. Kebudayaan	kebijakan kebudayaan		
		Perfilman dan Kesenian		
		Sastra dan Bahasa Indonesia		
		Cagar Budaya		
	RAL 01.43. Informasi	Informasi Geospasial		
		Informasi Statistik		
		Pelayanan Informasi		
		penyelenggaraan penyiaran radio publik		
		penyelenggaraan penyiaran televisi publik		
		Kearsipan Nasional		
		Hubungan Masyarakat		
	RAL 01.44. Komunikasi	Pos		

TABEL 6

		Sistem Komunikasi Publik		
		Sistem Komunikasi Tertentu		
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.01. Dalam Negeri			
	RAL 02.02. Keuangan	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara		
		Pencarian Sumber-sumber Pembiayaan		
		Perbendaharaan		
		Penganggaran		
		Pengelolaan Barang Milik Negara		
		Rekomendasi Fiskal		
		Rekomendasi Keuangan		
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
		Pengelolaan Keuangan		
	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Pembangunan Nasional		
		Penyusunan Perencanaan		
		Koordinasi Perencanaan		
		Evaluasi Perencanaan		
		Penyusunan RAPBN		
		Rencana Pembangunan Nasional		
		Pengalokasian Dana Pembangunan		
		Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional		
		Koordinasi Pembangunan Nasional		

TABEL 6

	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen Kepegawaian		
		RAL 02.04.02. Pembinaan Jabatan Fungsional		
		RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian		
		RAL 02.04.04. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan		
		RAL 02.04.05. Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan		
		RAL 02.04.06. Pengkajian Manajemen ASN		
		RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi		
		RAL 02.04.08. Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
		RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi		
		RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS		
	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Pemerintahan Umum		
	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	dukungan kerumahtanggaan Presiden		
		dukungan teknis Presiden		
		dukungan administrasi Presiden		
		Sistem Pelaporan		
		Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan		
		Bantuan Hukum		



TABEL 6

		Dukungan Administasi Organisasi		
		Dukungan Finansial		
		Dukungan Substantif Organisasi		
		Sarana dan Prasarana		
		Keprotokolan		
		Dukungan Teknis Operasional		
		Dukungan Penerjemahan		
		Dukungan Logistik		
		Dukungan Persidangan		
		Dukungan Keahlian		
		Koordinasi Pengembangan Kapasitas		
		Dukungan Kearsipan		
	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Kegiatan Pengawasan		
		Pengawasan Kinerja		
	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Pengawasan Fungsi Organisasi		
		Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		
		Pembinaan Organisasi		
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi		
		Pembinaan Teknis		
		Kerja Sama antar Instansi		
		Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama		
	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika		
		Penyelenggaraan Informatika		
		Pengelolaan Data dan Informasi		
		Pengelolaan Sistem Informasi		

TABEL 6

		Statistik Dasar		
		Statistik Sektoral		
		Statistik Khusus		
	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Tata Kelola SPBE		
		Manajemen SPBE		
		Layanan SPBE		
		Infrastruktur SPBE		
		Aplikasi SPBE		
		Keamanan SPBE		
		Audit TIK		
		Pengintegrasian Pelaksanaan Kegiatan/Program		

llk

ANALISIS LAYANAN

TABEL 7

Analisa Layanan

No	Probis Terkait	Nama Layanan	RAL Level 1	RAL Level 2
1	2	3	4	5
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Pembangunan Sumber Daya Industri	Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
2		Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
3		Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
4	Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
5		Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri



TABEL 7

6		Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
7		Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
8		Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri
9	Pengembangan Perdagangan	Layanan Pengembangan Perdagangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan
10		Layanan Pengembangan Perdagangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan
11		Layanan Pengembangan Perdagangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan
12	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Layanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan
13		Layanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan
1	2	3	4	5



TABEL 7

2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holikikutura	Layanan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holikikutura	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
2			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
3			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
5			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
6			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian



TABEL 7

7	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Layanan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
8			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
9			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07.01 Pertanian
10	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan
11			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan
12			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan
13			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.08 Perkebunan



TABEL 7

1	2	3	4	5
3	DINAS PETERNAKAN			
1	Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak	Layanan Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
2			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
3			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
4	Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar	Layanan Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
5			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan

TABEL 7

6			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
7	Peningkatan Jumlah Ternak Yang Sehat	Layanan Peningkatan Jumlah Ternak Yang Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
8			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
9	Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar	Layanan Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standa	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
10			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan
1	2	3	4	5
4	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
1	Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing	Layanan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi

TABEL 7

2			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi
3			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah
4	Menumbuhkembangkan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing	Layanan pengembangan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah
5			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah
6			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah



TABEL 7

7	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	Layanan Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan
8			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan
9			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan
10	Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat	Layanan Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi

TABEL 7

11			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi
12			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi
1	2	3	4	5
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Layanan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan
2			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan
3			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan
4			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan



TABEL 7

4	Perikanan Tangkap	Layanan Perikanan Tangkap	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
5			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
6			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Layanan Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
8			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
9			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan



TABEL 7

10	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Layanan Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
11			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
12			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan
13	Layanan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Layanan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan
14			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan



TABEL 7

15			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.39 Kelautan
1	2	3	4	5
6	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	Pemasaran Pariwisata	Layanan Pemasaran Pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
2			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
3			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
4	Destinasi Pariwisata	Layanan Destinasi Pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
5			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
6			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata



TABEL 7

7	Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
8			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
9			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
10	Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
11			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata
12			RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata



TABEL 7

RAL Level 3	Usulan RAL Level 3	Usulan RAL Level 4	Usulan RAL Level 5	Usulan RAL Level 6	Instansi
6	7	8	9	10	11
RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	RAB.02.01.01.01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.05.02 Pengembangan Ekonomi Digital					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.05.04 Pelayanan PNB					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.05.05 Industri Maritim					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TABEL 7

RAL 01.05.06 Ketahanan Industri					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.05.07 Peneraan/Kalibrasi					
RAL 01.05.08 Pengembangan Industri					
RAL 01.06.01 Ekspor dan Impor					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL 01.06.02 Penggunaan Produk Dalam Negeri					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL.01.06.03 Perdagangan Berjangka Komoditi					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL.01.06.04 Perdagangan Domestik					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RAL.01.06.05 Perlindungan Konsumen					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	7	8	9	10	11



TABEL 7

					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.01 Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.01 Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.01 Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.01 Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.01 Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN



TABEL 7

RAL.01.07.02 Ketahanan Pangan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.02 Ketahanan Pangan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL.01.07.02 Ketahanan Pangan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL 01.08.01 Benih dan Bibit Perkebunan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL 01.08.02 Bpembinaan usaha perkebunan berkelanjutan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL 01.08.03 pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan					DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
RAL 01.08.04 kebijakan perkebunan					



TABEL 7

6	7	8	9	10	11
RAL.01.09.01 Benih dan Bibit Ternak				DAB-DISNAK-01.01	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.02 kebijakan peternakan				DAB-DISNAK-01.02	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.03 pascapanen peternakan				DAB-DISNAK-	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner				DAB-DISNAK-01.04	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.05 penyehatan hewan				DAB-DISNAK-01.05	DINAS PETERNAKAN

TABEL 7

RAL.01.09.01 Benih dan Bibit Ternak				DAB-DISNAK-01.06	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.01 Benih dan Bibit Ternak				DAB-DISNAK-01.07	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.02 kebijakan peternakan				DAB-DISNAK-01.08	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner				DAB-DISNAK-01.09	DINAS PETERNAKAN
RAL.01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner				DAB-DISNAK-01.10	DINAS PETERNAKAN
6	7	8	9	10	11

RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro				DAB-KTKT.01.01	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
---------------------------------------	--	--	--	----------------	--

TABEL 7

RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro				DAB-KTKT.01.02	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis				DAB-KTKT.01.	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis				DAB-KTKT.01.03	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis				DAB-KTKT.01.04	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.14. 01 Dukungan Bisnis				DAB-KTKT.01.05	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



TABEL 7

RAL 01.32. 04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				DAB-KTKT.01.06	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.32. 01 Keselamatan Kerja				DAB-KTKT.01.07	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.32. 02 Pengelolaan Ketenagakerjaan				DAB-KTKT.01.	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.18. Transmigrasi				DAB-KTKT.01.09	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



TABEL 7

RAL 01.18. Transmigrasi				DAB-KTKT.01.09	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RAL 01.18. Transmigrasi				DAB-KTKT.01.10	DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	7	8	9	10	11

RAL.01.39.01 Perikanan Tangkap				DAB-DKP.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.39.02 kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari				DAB-DKP.01.02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.39.03 kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan				DAB-DKP.01.03	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.39.04 kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan					

TABEL 7

RAL.01.10.01 Perikanan Budi Daya				DAB-DKP.01.0 4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya				DAB-DKP.01.0 5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.03 kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya				DAB-DKP.01.0 6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.03 kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya				DAB-DKP.01.0 7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.01 Perikanan Budi Daya				DAB-DKP.01.0 8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya				DAB-DKP.01.0 9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



TABEL 7

RAL.01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya				DAB- DKP.01.1 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya				DAB- DKP.01.1 1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAL.01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya				DAB- DKP.01.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya				DAB- DKP.01.1 3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya				DAB- DKP.01.1 4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TABEL 7

kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya				DAB-DKP.01.1 5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	7	8	9	10	11

RAL.01.15.01 Pengembangan Kepariwisataaan				DAB-PAREKR AF.01.01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.01 Pengembangan Kepariwisataaan				DAB-PAREKR AF.01.02	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.01 Pengembangan Kepariwisataaan				DAB-PAREKR AF.01.03	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.03 Pengembangan Objek Wisata				DAB-PAREKR AF.01.04	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.03 Pengembangan Objek Wisata				DAB-PAREKR AF.01.05	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.03 Pengembangan Objek Wisata				DAB-PAREKR AF.01.06	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



TABEL 7

RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.07	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.08	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.09	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.10	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.11	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAL.01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataa				DAB- PAREKR AF.01.12	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



TABEL 7

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana
12	13	14	15	16	17
DAB-PERINDAG-01.01	Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yang menangani Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi dan Sumber Daya Alam dan Pengawasan dan Pengendalian.			
DAB-PERINDAG-01.02	Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri				
DAB-PERINDAG-01.03	Layanan Pengembangan Sumber Daya Industri				
DAB-PERINDAG-01.04	Layanan Pengembangan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri yang menangani Pembangunan IKM, Pembangunan IKM dan Pengolahan Data dan Informasi Industri			
DAB-PERINDAG-01.05	Layanan Pengembangan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri				



TABEL 7

DAB-PERINDAG-01.06	Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri				
DAB-PERINDAG-01.07	Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri				
DAB-PERINDAG-01.08	Layanan Pengembangan Sarana Prasana dan Pemberdayaan Industri				
DAB-PERINDAG-01.09	Layanan Pengembangan Perdagangan	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Perdagangan yang menangani Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengembangan perdagangan luar negeri			
DAB-PERINDAG-01.10	Layanan Pengembangan Perdagangan				
DAB-PERINDAG-01.11	Layanan Pengembangan Perdagangan				
DAB-PERINDAG-01.12	Layanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang menangani Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Pendataan Pasar Tertib Ukur			
DAB-PERINDAG-01.13	Layanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
12	13	14	15	16	17



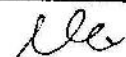
TABEL 7

DISTANKP-01	Layanan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holikikutura	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani Peningkatan Produksi Serealia, Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian dan Peningkatan Produksi Hortikultura			
DISTANKP-02					
DISTANKP-03					
DISTANKP-04	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang menangani Pengelolaan Lahan dan Air, Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian			
DISTANKP-05					
DISTANKP-06					



TABEL 7

DISTANKP-07	Layanan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang menangani Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan dan Penyuluhan			
DISTANKP-08					
DISTANKP-09					
DISTANKP-10	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang menangani Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan, Peningkatan Produksi Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi Tan. Rempah & Penyegar			
DISTANKP-11					
DISTANKP-12					



TABEL 7

12	13	14	15	16	17
DISNAK-01	Layanan Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan populasi pertumbuhan ternak yang menangani : 1. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan. 2. Pengendalian dan pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. 3. Serta Pakan serta Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
DISNAK-02					
DISNAK-03					
DISNAK-04	Layanan Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar yang menangani Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung, dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			
DISNAK-05					



TABEL 7

DISNAK-06					
DISNAK-07	Layanan Peningkatan Jumlah Ternak Yang Sehat	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan jumlah ternak yang sehat yang menangani Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan			
DISNAK-08					
DISNAK-09	Layanan Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standa	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar yang menangani Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan			
DISNAK-10					
12	13	14	15	16	17

KTKT.01.	Layanan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi melalui Rehabilitasi dan Reorientasi Koperasi Aktif dan berdaya saing				
----------	---	--	--	--	--

TABEL 7

KTKT.02					
KTKT.03					
KTKT.04	Layanan pengembangan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Menumbuhkembangkan UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Usaha Kecil menengah yang berdaya saing yang menangani UMKM Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Peran SDM Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengembangan Kompetensi & Kualitas PLUT-UMKM			
KTKT.05					
KTKT.06					

TABEL 7

KTKT.07	Layanan Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja yang menangani pengembangan ketrampilan, pelatihan kerja, produktivitas dan penempatan, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dan Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum			
KTKT.08					
KTKT.09					
KTKT.10	Layanan Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan program Transmigrasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang menangani Penyiapan Permukiman Transmigrasi, Penempatan Pemindahan dan Sarpras dan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi dan sekitarnya			

TABEL 7

KTKT.11					
KTKT.12					
12	13	14	15	16	17

DKP.01	Layanan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya , Merencanakan operasional Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya .			
DKP.02					
DKP.03					
DKP.04					



TABEL 7

DKP.05	Layanan Perikanan Tangkap	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap yang menangani kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Merencanakan operasional Perikanan Tangkap			
DKP.06					
DKP.07					
DKP.08	Layanan Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Merencanakan operasional Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan dan penegakan hukum perikanan dan kelautan			
DKP.09					
DKP.10					



TABEL 7

DKP.11	Layanan Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang menangani mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan dan pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal			
DKP.12					
DKP.13					
DKP.14	Layanan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang menangani kegiatan pengelolaan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil			
DKP.15					



TABEL 7

12	13	14	15	16	17
	Layanan Pemasaran Pariwisata	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Pemasaran Pariwisata yang menangani Informasi Pemasaran Pariwisata, Promosi Pariwisata dan Analisa Pasar Pariwisata			
	Layanan Destinasi Pariwisata	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Destinasi Pariwisata yang menangani Sarana Prasarana, Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan			



TABEL 7

	Layanan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Industri Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif dan Jaringan Pemasaran.			
	Layanan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan ini berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata			

Me

ANALISIS APLIKASI

TABEL 8

Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi

No	Nama Aplikasi	RAA Level 1	RAA Level 2
1	2	3	4
1	Website Provinsi NTT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
2	E-NADI	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
3	E-Absensi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
4	Website Diskominfo	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
6	E-Money Performance	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
7	SDGS CHILDREN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
8	BASEPANGAN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
9	JURNAL LITBANG	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
10	E-PLANNING	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
11	Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan



TABEL 8

12	SIRUP/Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
13	SIPORA	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
14	SI IKAN MAS	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
15	Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online (ekinerja)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
16	SIMPEG	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
17	SIMAE	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
18	Website Dinas Kesehatan NTT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Ne

TABEL 8

19	ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
20	SIAM	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
21	SIAP	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

Nc

TABEL 8

22	Keluarga Sehat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
23	E-Renggar	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
24	E-Planning	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
25	E-Verifikasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
26	E-Monev	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
27	E-Monev DAK	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
28	RKAKL	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
29	Komdat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
30	SPM	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
31	E-Musrembang	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
32	PWS Imunisasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
33	SITT Program TB	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
34	Aplikasi Kusta	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik



TABEL 8

35	SIHA - HIV_AIDS	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
36	E-Sismal	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
37	Aplikasi Surveilans FKTP dan Posbindu	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
38	Siskohatkes (Program Kesehatan Haji)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
39	ISPA - DIARE Aplikasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
40	FILAKIASIS	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
41	SAS (Aplikasi APBN)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
42	SIMAK (Aplikasi APBN)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
43	SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
44	SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
45	Dashboard Keuangan Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan



TABEL 8

46	Medifirst2001	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
47	INACBGs	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
48	website RS	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
49	SIREK PT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
50	SIMDA BMN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
51	SAMSAT ONLINE	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
52	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPTK)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
53	Sistem Informasi Sekolah Terpadu	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

NB

TABEL 8

54	Portal Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
55	Backbone Dapodik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
56	RKAKL DIPA	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
57	SAS (sistem Akuntansi Satker)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
58	PP3G Online	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
59	Pendataan Ujian Nasional	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
60	Website BPSDMD NTT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
61	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
62	SMART	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
63	ISIKHNAS	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

TABEL 8

64	website BPMPTSP NTT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
65	website resmi Dinas PUPR Provinsi NTT	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
66	e-filing	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
67	e-monitoring	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
68	e-konstruksi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
69	Database Kepegawaian	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
70	www.parekraf.nttprov.go.id	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik



TABEL 8

71	Aplikasi Keuangan dan APBN (Simak BMN SIPD dan lain-lain)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
72	Website	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
73	ILDIS (JDIH)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
74	Aplikasi E-Library Aksara	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
75	Aplikasi Modul Sirkulasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
76	Aplikasi Modul OPAC	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
77	Aplikasi Modul Keanggotaan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
78	Aplikasi Modul Buku Tamu	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
79	Aplikasi Modul Pendaftaran Online	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
80	Aplikasi Modul Executive Information System (EIS)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik



TABEL 8

81	Aplikasi Manajemen Alih Media	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
82	Aplikasi Cetak Kartu Katalog	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
83	Aplikasi Pengunjung Buku Hitam, Putih/Berwarna	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
84	Aplikasi Katalog Induk Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
85	Aplikasi Penelusuran OPAC KID	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
86	Aplikasi Penelusuran OPAC BID	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
87	Aplikasi E-Library Inislite	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
88	Aplikasi e-Library Qails	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
89	Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
90	Aplikasi Alih Media	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
91	Aplikasi e-Book	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
92	Aplikasi Audio COE	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik



TABEL 8

93	Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
94	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
95	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik



TABEL 8

Usulan RAA Level 3	Usulan RAA Level 4	Usulan RAA Level 5	Usulan RAA Level 6	Instansi
5	6	7	8	9
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas Kominfo Provinsi NTT
RAA.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola				Dinas Kominfo Provinsi NTT
RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja				Dinas Kominfo Provinsi NTT
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas Kominfo Provinsi NTT
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Bappelitbangda
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Bappelitbangda
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Bappelitbangda
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Bappelitbangda
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Bappelitbangda
RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

TABEL 8

RAA.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan

16

TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan

Ne

TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan



TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Dinas Kesehatan
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Badan Keuangan Daerah
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Badan Keuangan Daerah
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				Badan Keuangan Daerah

Me

TABEL 8

RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan				RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
RAA.01.01.10 Aplikasi Perikanan				Dinas Perikanan dan Kelautan
RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan				Badan Pendapatan dan Aset Daerah
RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan				Badan Pendapatan dan Aset Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NG

TABEL 8

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional				Dinas Peternakan
RAA.01.01.09 Aplikasi Peternakan				Dinas Peternakan
RAA.01.01.09 Aplikasi Peternakan				Dinas Peternakan



TABEL 8

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum				Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum				Dinas PUPR
RAA.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum				Dinas PUPR
RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara				Dinas PUPR
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



TABEL 8

RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
RAA.01.01.28 Aplikasi Hukum				Biro Hukum Setda Prov NTT
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah



TABEL 8

RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan				Badan Perpustakaan Daerah



TABEL 8

RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RAA.01.01.23 Aplikasi Kependudukan				Biro Pemerintahan

[Signature]

TABEL 8

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi
10	11	12
Website nttprov	Website nttprov	Website provinsi Nusa Tenggara Timur
e-nadi	e-nadi	Aplikasi tata naskah dinas elektronik
e-Absensi	e-Absensi	Aplikasi absensi elektronik
website	website	
e-money performance	e-money performance	
SDGS CHILDREN	SDGS CHILDREN	
BASEPANGAN	BASEPANGAN	
JURNAL LITBANG	JURNAL LITBANG	
E-PLANNING	E-PLANNING	
Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak)	Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak)	Sumber rujukan terkait pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

TABEL 8

SIRUP/Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	SIRUP/Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Belanja Modal
SIPORA	SIPORA	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program dan Kegiatan
SI IKAN MAS	SI IKAN MAS	Sistem Informasi Indeks Kepuasan
Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online	Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online	Aplikasi untuk menginput SKP, pelaporan SKP, perilaku, tugas tambahan, kreatifitas bulanan dengan output nilai prestasi kerja bulanan dan tahunan
SIMPEG	SIMPEG	Aplikasi untuk mengelola data kepegawaian
SIMAE	SIMAE	Aplikasi untuk mengelola dokumen digital PNS
Website Dinas Kesehatan NTT	Website Dinas Kesehatan NTT	Publikasi data kesehatan



TABEL 8

ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Membantu inventarisasi dan pemetaan SPA, memberikan panduan dan pembinaan dalam pengawasan terhadap pemenuhan SPA oleh pemerintah pusat dan daerah, mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar, ijin operasional, penetapan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan
SIAM	SIAM	Portal Tableau - Dukcapil. Menyediakan data dan informasi mengenai jumlah penduduk dan keadaan penduduk provinsi dan daerah yang akurat, lengkap dan mutakhir
SIAP	SIAP	Sistem Informasi Akreditasi FKTP. Memudahkan Kab/Kota dalam proses pengusulan akreditasi FKTP, mempermudah provinsi, Kab/Kota maupun FKTP dalam monitoring usulan akreditasi, memudahkan pelaksanaan survei dan pelaporan hasil survei oleh surveior, memudahkan proses verifikasi oleh verifikator di Komisi, komunikasi komisi dengan surveior, antar surveior maupun antar anggota komisi, komunikasi dit. mutu dan akreditasi dan PJ akreditasi FKTP provinsi dan Kab/Kota dan kepala puskesmas, memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akreditasi sesuai RPJMN dan Renstra



TABEL 8

Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Mempercepat dan mempermudah pencatatan, pengolahan dan analisa data keluarga sehat hasil kunjungan keluarga yang dilakukan oleh surveyor puskesmas
E-Renggar	E-Renggar	Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK
E-Planning	E-Planning	Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK
E-Verifikasi	E-Verifikasi	Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK
E-Monev	E-Monev	Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK
E-Monev DAK	E-Monev DAK	Evaluasi Perencanaan DAK
RKAKL	RKAKL	Perencanaan dan Revisi Sumber Dana Dekon
Komdat	Komdat	Informasi Data Kemenkes RI
SPM	SPM	Informasi Data Kemenkes RI
E-Musrembang	E-Musrembang	Perencanaan Pagu Indikatif Untuk Musrembang Provinsi dan Nasional
PWS Imunisasi	PWS Imunisasi	Analisa Data Cakupan
SITT Program TB	SITT Program TB	Surveilans TB dan Analisa
Aplikasi Kusta	Aplikasi Kusta	Surveilans Kusta dan Analisa

TABEL 8

SIHA - HIV_AIDS	SIHA - HIV_AIDS	Surveilans HIV_AIDS dan Analisa
E-Sismal	E-Sismal	Surveilans Malaria dan Analisa
Aplikasi Surveilans FKTP dan Posbindu	Aplikasi Surveilans FKTP dan Posbindu	Surveilans PTM dan Analisa
Siskohatkes (Program Kesehatan Haji)	Siskohatkes (Program Kesehatan Haji)	Surveilans Haji dan Analisa
ISPA - DIARE Aplikasi	ISPA - DIARE Aplikasi	Surveilans ISPA, Diare dan Analisa
FILAKIASIS	FILAKIASIS	Hasil Survey
SAS (Aplikasi APBN)	SAS (Aplikasi APBN)	Penegelolaan Keuangan
SIMAK (Aplikasi APBN)	SIMAK (Aplikasi APBN)	Pengelolaan Keangan
SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Merupakan aplikasi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban serta informasi aplikasi lainnya yang saling terintegrasi
SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	Sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe
Dashboard Keuangan Daerah	Dashboard Keuangan Daerah	Merupakan sistem informasi monitoring dari APBD - Realisasi dan target pendapatan



TABEL 8

Medifirst2000	Medifirst2000	Aplikasi SIMRS untuk mencatat semua kegiatan transaksi rumah sakit, rekam medis pasien dan informasi
INACBGs	INACBGs	aplikasi bantu untuk klaim BPJS
website RS	website RS	website informasi RS
SIREK PT	SIREK PT	Aplikasi yang digunakan untuk penerbitan surat rekomendasi teknis dari DKP Prov NTT
SIMDA BMN	SIMDA BMN	aplikasi desktop yang digunakan mendata barang milik daerah secara elektronik
SAMSAT ONLINE	SAMSAT ONLINE	aplikasi online untuk pengurusna ijin kendaraan bermotor
Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPTK)	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPTK)	Aplikasi untuk merekap data pendidik dan tenaga kependidikan secara online dan akan ditampung dalam satu database yang terdistribusi, serta mempermudah bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dalam perekapan data secara realtime
Sistem Informasi Sekolah Terpadu	Sistem Informasi Sekolah Terpadu	aplikasi membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan manajemen data guru dan tenaga kependidikan kaitan dengan keadaan GTK setiap bulan, daftar hadir GTK setiap hari, PAK (Penetapan Angka Kredit) Guru PNS secara online

TABEL 8

Portal Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah	Portal Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah	Aplikasi untuk menyeleksi tenaga kontrak baru tahun 2020, mulai dari tahapan seleksi administrasi hingga seleksi tertulis dan pengumuman terakhir
Backbone Dapodik	Backbone Dapodik	Data Pokok Pendidikan
RKAKL DIPA	RKAKL DIPA	Anggaran Dekonsentrasi
SAS (sistem Akuntansi Satker)	SAS (sistem Akuntansi Satker)	Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi
PP3G Online	PP3G Online	Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi
Pendataan Ujian Nasional	Pendataan Ujian Nasional	Pendataan Peserta Ujian Nasional
Website BPSDMD NTT	Website BPSDMD NTT	Website digunakan untuk mempublikasikan berita kegiatan dan program pada BPSDMD NTT
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Aplikasi yang memuat tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
SMART	SMART	Aplikasi keuangan
ISIKHNAS	ISIKHNAS	Sistem Informasi kesehatan hewan nasional

UG

TABEL 8

website BPMPTSP NTT	website BPMPTSP NTT	Website digunakan untuk mempublikasikan berita kegiatan dan program pada BPMPTSP NTT
website resmi Dinas PUPR Provinsi NTT	website resmi Dinas PUPR Provinsi NTT	Untuk memberikan informasi terkait pekerjaan dalam lingkup dinas PUPR Prov NTT
e-filing	e-filing	aplikasi yang digunakan untuk menejemen surat masuk, surat keluar dan nota dinas secara elektronik pada dinas PUPR Prov NTT
e-monitoring	e-monitoring	aplikasi yang digunakan untuk monitoring realisasi keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pendapatan asli daerah secara realtime pada Dinas PUPR prov NTT
e-konstruksi	e-konstruksi	aplikasi yang digunakan untuk manajemen data paket-paket konstruksi dan melakukan pengarsipan dokumen kontrak, addendum kontrak, PHO, MC, FHO untuk masing-masing paket pekerjaan pada Dinas PUPR Prov. NTT
Database Kepegawaian	Database Kepegawaian	Aplikasi yang digunakan untuk manajemen data PNS, Pegawai harian (Non PNS), Pengarsipan dokumen-dokumen secara elektronik untuk masing-masing pegawai pada Dinas PUPR prov NTT
www.parekraf.nttprov.go.id	www.parekraf.nttprov.go.id	informasi pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi Nusa Tenggara Timur



TABEL 8

Aplikasi Keuangan dan APBN (Simak BMN SIPD dan lain-lain)	Aplikasi Keuangan dan APBN (Simak BMN SIPD dan lain-lain)	
Website	Website	Website Dinas
ILDIS (JDIH)	ILDIS (JDIH)	Aplikasi untuk Pendataan Database Peraturan Daerah (JDIH)
Aplikasi E-Library Aksara	Aplikasi E-Library Aksara	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi Modul Sirkulasi	Aplikasi Modul Sirkulasi	
Aplikasi Modul OPAC	Aplikasi Modul OPAC	
Aplikasi Modul Keanggotaan	Aplikasi Modul Keanggotaan	
Aplikasi Modul Buku Tamu	Aplikasi Modul Buku Tamu	
Aplikasi Modul Pendaftaran Online	Aplikasi Modul Pendaftaran Online	
Aplikasi Modul Executive Information System (EIS)	Aplikasi Modul Executive Information System (EIS)	



TABEL 8

Aplikasi Manajemen Alih Media	Aplikasi Manajemen Alih Media	
Aplikasi Cetak Kartu Katalog	Aplikasi Cetak Kartu Katalog	
Aplikasi Pengunjung Buku Hitam, Putih/Berwarna	Aplikasi Pengunjung Buku Hitam, Putih/Berwarna	
Aplikasi Katalog Induk Daerah	Aplikasi Katalog Induk Daerah	
Aplikasi Penelusuran OPAC KID	Aplikasi Penelusuran OPAC KID	
Aplikasi Penelusuran OPAC BID	Aplikasi Penelusuran OPAC BID	
Aplikasi E-Library Inislite	Aplikasi E-Library Inislite	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi e-Library Qails	Aplikasi e-Library Qails	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan	Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi Alih Media	Aplikasi Alih Media	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi e-Book	Aplikasi e-Book	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan
Aplikasi Audio COE	Aplikasi Audio COE	Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan



TABEL 8

Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	Aplikasi data bencana agar tersedianya Basis Data kebenaran (Pra Bencana dan Pasca Bencana)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	entry RKA Tahunan, entri SPJ
SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Pemanfaatan dan Pendataan Informasi Kependudukan



TABEL 8

Fungsi Aplikasi	Kode Model Referensi SPBE	Layanan yang Didukung	Data yang Digunakan	Luaran	Basis Aplikasi
13	14	15	16	17	18
Website provinsi Nusa Tenggara Timur					Postgre SQL
Aplikasi tata naskah dinas elektronik					My SQL
Aplikasi absesnsi elektronik					My SQL
Sumber rujukan terkait pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak					



TABEL 8

Belanja Modal					
Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program dan Kegiatan					DBMS My Sql
Sistem Informasi Indeks Kepuasan					DBMS My Sql
Aplikasi untuk menginput SKP, pelaporan SKP, perilaku, tugas tambahan, kreatifitas bulanan dengan output nilai prestasi kerja bulanan dan tahunan					Postgre sql
Aplikasi untuk mengelola data kepegawaian					DBMS My Sql
Aplikasi untuk mengelola dokumen digital PNS					DBMS My Sql
Publikasi data kesehatan					Database MySQL



TABEL 8

Membantu inventarisasi dan pemetaan SPA, memberikan panduan dan pembinaan dalam pengawasan terhadap pemenuhan SPA oleh pemerintah pusat dan daerah, mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar, ijin operasional, penetapan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan					
Portal Tableau - Dukcapil. Menyediakan data dan informasi mengenai jumlah penduduk dan keadaan penduduk provinsi dan daerah yang akurat, lengkap dan mutakhir					
Sistem Informasi Akreditasi FKTP. Memudahkan Kab/Kota dalam proses pengusulan akreditasi FKTP, mempermudah provinsi, Kab/Kota maupun FKTP dalam monitoring usulan akreditasi, memudahkan pelaksanaan survei dan pelaporan hasil survei oleh surveior, memudahkan proses verifikasi oleh verifikator di Komisi, komunikasi komisi dengan surveior, antar surveior maupun antar anggota komisi, komunikasi dit. mutu dan akreditasi dan PJ akreditasi FKTP provinsi dan Kab/Kota dan kepala puskesmas, memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akreditasi sesuai RPJMN dan Renstra					



TABEL 8

Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Mempercepat dan mempermudah pencatatan, pengolahan dan analisa data keluarga sehat hasil kunjungan keluarga yang dilakukan oleh surveyor puskesmas					
Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK					
Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK					
Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK					
Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK					
Evaluasi Perencanaan DAK					
Perencanaan dan Revisi Sumber Dana Dekon					
Informasi Data Kemenkes RI					
Informasi Data Kemenkes RI					
Perencanaan Pagu Indikatif Untuk Musrenbang Provinsi dan Nasional					
Analisa Data Cakupan					
Surveilans TB dan Analisa					
Surveilans 'Kusta dan Analisa					



TABEL 8

Surveilans HIV_AIDS dan Analisa					
Surveilans Malaria dan Analisa					
Surveilans PTM dan Analisa					
Surveilans Haji dan Analisa					
Surveilans ISPA, Diare dan Analisa					
Hasil Survey					
Peneglolaan Keuangan					
Pengelolaan Keangan					
Merupakan aplikasi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban serta informasi aplikasi lainnya yang saling terintegrasi					Tidak dapat informasi karena aplikasi terpusata
Sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe					SQL SERVER 2008 - R2
Merupakan sistem informasi monitoring dari APBD - Realisasi dan target pendapatan					SQL SERVER 2008 - R2



TABEL 8

Aplikasi SIMRS untuk mencatat semua kegiatan transaksi rumah sakit, rekam meds pasien dan informasi					SQL Server 2016 r2
aplikasi bantu untuk klaim BPJS					mysql
website informasi RS					mysql
Aplikasi yang digunakan untuk penerbitan surat rekomendasi teknis dari DKP Prov NTT					MySQL
aplikasi desktop yang digunakan mendata barang milik daerah secara elektronik					SQLServer
aplikasi online untuk pengurusna ijin kendaraan bermotor					SQLServer
Aplikasi untuk merekap data pendidik dan tenaga kependidikan secara online dan akan ditampung dalam satu database yang terdistribusi, serta mempermudah bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dalam perekapan data secara realtime					MySQL 10.2
aplikasi membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan manajemen data guru dan tenaga kependidikan kaitan dengan keadaan GTK setiap bulan, daftar hadir GTK setiap hari, PAK (Penetapan Angka Kredit) Guru PNS secara online					MySQL 10.2



TABEL 8

Aplikasi untuk menyeleksi tenaga kontrak baru tahun 2020, mulai dari tahapan seleksi administrasi hingga seleksi tertulis dan pengumuman terakhir					MySQL 10.2
Data Pokok Pendidikan					Mysql
Anggaran Dekonsentrasi					Mysql
Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi					Mysql
Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi					Mysql
Pendataan Peserta Ujian Nasional					Mysql
Website digunakan untuk mempublikasikan berita kegiatan dan program pada BPSDMD NTT					MariaDB Versi 10
Aplikasi yang memuat tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah					MySQL
Aplikasi keuangan					
Sistem Informasi kesehatan hewan nasional					

N6

TABEL 8

Website digunakan untuk mempublikasikan berita kegiatan dan program pada BPMPTSP NTT					Database pada server
Untuk memberikan informasi terkait pekerjaan dalam lingkup dinas PUPR Prov NTT					MySQL version 5.1.41
aplikasi yang digunakan untuk menejemen surat masuk, surat keluar dan nota dinas secara elektronik pada dinas PUPR Prov NTT					MySQL version 5.1.41
aplikasi yang digunakan untuk monitoring realisasi keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pendapatan asli daerah secara realtime pada Dinas PUPR prov NTT					MySQL version 5.1.41
aplikasi yang digunakan untuk manajemen data paket-paket konstruksi dan melakukan pengarsipan dokumen kontrak, addendum kontrak, PHO, MC, FHO untuk masing-masing paket pekerjaan pada Dinas PUPR Prov. NTT					MySQL version 5.1.41
Aplikasi yang digunakan untuk memanajemen data PNS, Pegawai harian (Non PNS), Pengarsipan dokumen-dokumen secara elektronik untuk masing-masing pegawai pada Dinas PUPR prov NTT					MySQL version 5.1.41
informasi pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi Nusa Tenggara Timur					MySql versi 5



TABEL 8

Website Dinas					Mysql
Aplikasi untuk Pendataan Database Peraturan Daerah (JDIH)					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql, Oracle,
					Postgre SQL,
					Microsoft SQL Server

166

TABEL 8

Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql
Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan					Mysql

Handwritten signature

TABEL 8

Aplikasi data bencana agar tersedianya Basis Data kebenaran (Pra Bencana dan Pasca Bencana)					My SQL versi 5
entry RKA Tahunan, entri SPJ					
Pemenfaatan dan Pendataan Informasi Kependudukan					

NC

TABEL 8

Server/Cloud Aplikasi	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Basis Data	Unit Pengembang
19	20	21	22	23	24
Server dedicated (ID Web Host)	Opensource	PHP 8	-	My SQL	Dinas Kominfo Provinsi NTT
Dinas Kominfo Provinsi NTT	Opensource	PHP Versi 6	-	My SQL	Kemenkumham RI
Dinas Kominfo Provinsi NTT	Opensource	PHP	-	My SQL	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
	Opensource		-		
	Opensource		-		
	Opensource		-		
	Opensource		-		
	Opensource		-		
	Opensource		-		
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI (Biro Perencanaan dan Data)	Opensource		-		Pemerintah Prov. Jawa Tengah

TABEL 8

Shared hosting	Opensource	PHP	-	DBMS My Sql	Periantu M. Sabuna, S.Kom
Shared hosting	Opensource	PHP	-	DBMS My Sql	Periantu M. Sabuna, S.Kom
Ruang Server Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Opensource	Phyton	-	Postgre sql	BKD Provinsi Jawa Barat
Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTT	Opensource	PHP5.6.38-3 (Kondisi Terbaru)	-	DBMS My Sql	MSM
Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTT	Opensource	PHP5.6.38-3 (Kondisi Terbaru)	-	DBMS My Sql	Terasoft
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Opensource	PHP (Hypertext Preprocessor)	-	Database MySQL	Dinas Kesehatan Provinsi NTT bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

TABEL 8

Kemkes RI	Opensource		-		Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kementrian dalam negeri / Ditjen DUKCAPIL	Opensource		-		Kementrian Dalam Negeri / Ditjen DUKCAPIL
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes RI	Opensource		-		Dir. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes RI

TABEL 8

Pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemenkes RI	Opensource		-		Pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemenkes RI
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Bappeda/Bappenas	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				

TABEL 8

Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kemenkes RI	Opensource				
Kementrian dalam negeri	Opensource	Tidak dapat informasi karena aplikasi terpusata	-	Tidak dapat informasi karena aplikasi terpusata	Kementrian Dalam Negeri
Badan Keuangan Daerah Prov NTT lantai 4	Opensource	C#.nett	-	SQL SERVER 2008 - R2	Kementrian Dalam Negeri
Badan Keuangan Daerah Prov NTT lantai 4	Opensource	Php native, JQuery, CSS	-	SQL SERVER 2008 - R2	Badan Keuangan Daerah Prov NTT

TABEL 8

RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Opensource	web	-	SQL Server 2016 r2	PT. Jasamedika Saranatama
RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Opensource	web	-	mysql	Kementrian Kesehatan
RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Opensource	wordpress	-	mysql	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
Singapura	Opensource	Javascript dan PHP	-	MySQL	Frederika Rambu Ngana, M. Eng
Kota Kupang	Opensource	Javascript dan PHP	-	SQLServer	BPKP Perwakilan NTT
Kota Kupang	Opensource	Javascript dan PHP	-	SQLServer	BPKP Perwakilan NTT
Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Opensource	PHP 7.4.11	-	MySQL 10.2	Petrus Parawin Atasoge, S.Kom., dkk
Singapura	Opensource	PHP 7.4.11	-	MySQL 10.2	Luhut Sinaga, S.Pd., MA dan Joly Hans Frankle

TABEL 8

Singapura	Opensource	PHP 7.4.11	-	MySQL 10.2	Luhut Sinaga, S.Pd., MA dan Joly Hans Frankle
-	Opensource	PHP	-	Mysql	PDSPK-Kemendikbud
-	Proprietary	Fox Pro	-	Mysql	Kemenkeu
-	Proprietary	FoxPro	-	Mysql	Kemenkeu
-	Opensource	PHP	-	Mysql	Bappenas
-	Proprietary	Foxpro	-	Mysql	Puspendik Kemendikbud
DKI Jakarta (IDCLOUDHOST.COM)	Opensource	PHP versi 7	-	MariaDB Versi 10	CV. TerraSoft pada tahun anggaran 2018
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta	Opensource	Java, html, php, mysql	-	MySQL	Kementrian dalam Negeri
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Jl. Lapangan	Opensource	Java, html, php, mysql	-		Kementrian Keuangan
Indonesia	Opensource	Java, html, php, mysql	-		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

TABEL 8

	Opensource		-	Database pada server	Kementrian Kominfo Ri
Komputer Server pada Dinas PUPR Prov NTT	Opensource	PHP Version 5.3.1	-	MySQL version 5.1.41	Staf IT pada Dinas PUPR Prov NTT
Komputer Server pada Dinas PUPR Prov NTT	Opensource	PHP Version 5.3.1	-	MySQL version 5.1.41	CV. Digital Sense
Komputer Server pada Dinas PUPR Prov NTT	Opensource	PHP Version 5.3.1	-	MySQL version 5.1.41	CV. 2R Software House
Komputer Server pada Dinas PUPR Prov NTT	Opensource	PHP Version 5.3.1	-	MySQL version 5.1.41	CV. Brusel
Komputer Server pada Dinas PUPR Prov NTT	Opensource	PHP Version 5.3.1	-	MySQL version 5.1.41	CV. Brusel
Jakarta (indowebiste.co.id)	Opensource	PHP versi 7	-	MySql versi 5	Dinas Pariwisata bekerja sama dengan STIKOM UYELINDO

NB

TABEL 8

-	Opensource		-		-
Newark, New Jersey	Opensource	PHP : Hypertext Preprocessor, Javascript	-	Joomla!, WordPress	Webtocrat, Surabaya
Diskominfo Prov NTT	Opensource	PHP dan MySql versi 5.6	-	PHP my admin versi 5.6	BPHM
	Opensource	RFID, Esri, Microsoft ASP.Net,		Mysql, Oracle,	
	Proprietary	Windows Server, jQuery, PHP,		Postgre SQL,	
	Proprietary			Microsoft SQL Server	
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				

TABEL 8

	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource				
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	
	Opensource	Jquery, PHP		Mysql	

MC

TABEL 8

Singapore	Opensource	Drupal versi 8 dan PHP versi 7	-	My SQL versi 5	Dedi Tanoni, ST
					Kemendagri

Vfe

TABEL 8

Unit Operasional Teknologi	ID Metadata Terkait (SPLP/API)
25	26
Dinas Kominfo Provinsi NTT	
Dinas Kominfo Provinsi NTT	
Dinas Kominfo Provinsi NTT	
P2TP2A NTT (Sebagai operator)	

lll

TABEL 8

Internal BKD, melibatkan semua sub bagian	
BKD	
BKD Provinsi Jabar, BKD Provinsi NTT, Dinas Kominfo, Biro PBJ, Arsenet	
Sub bidang SIMPEG BKD NTT	
Sub bidang SIMPEG BKD NTT	
Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	



TABEL 8

Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi, Kab/Kota, BPFK/Institusi Penguji, Rumah Sakit/Puskesmas dan Labkes yang harus memiliki account yang disediakan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
Dukcapil Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota	
Administrator Pusat / Subdit Mutu dan Akreditasi Yankes PJ Siaf Provinsi dan Kabupaten/Kota	

MC

TABEL 8

Administrator pusat - pengumpul data	

TABEL 8

Semua perangkat daerah sebagai pengguna	
Semua perangkat daerah sebagai pengguna	
Masyarakat dan perangkat daerah	

Me

TABEL 8

BPJS, Dukcapil, Kemenkes (Bridging System)	
BPJS	
Infokom Prov NTT sebagai penyedia domain	
Admin dan petugas SIREK PT	
Admin, Petugas SIMDA BMN	
Admin, Petugas Samsat Online	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dikoordinir oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Tim IT SMKN 1 Kupang	
Bidang Pembinaan Ketenagaan	



TABEL 8

Bidang Pembinaan Ketenagaan	
-	
-	
-	
-	
-	
Dikelola oleh admin yakni PNS pada BPSDMD NTT dan maintenance websitenya menjadi tanggung jawab CV. TerraSoft	
Semua opd	
Semua opd	
opd yang berkaitan dengan isikhnas	

NG

TABEL 8

Admin yakni Kabid dan Operator	
Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi NTT	

UG

TABEL 8

Admin Website	
Biro Hukum	

MG

TABEL 8

Handwritten signature

TABEL 8

Dikelola oleh PNS pada BPBD NTT dan maintenance websitenya menjadi tanggung jawab Dedi Tanoni, ST	

Handwritten signature

DOMAIN KEAMANAN

Questionnaire Subtansi Domain Keamanan

1	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya:					
	TRUE	Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang SMKI				
	Standar dan Prosedur Keamanan SPBE					
	TRUE	Perban BSSN No 4 Tahun 2021				
	FALSE					
	FALSE					
	Standar internasional terkait keamanan informasi:					
	FALSE	The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)				
	FALSE	OWASP-MASVS: Mobile Application Security Verification Standard				
	FALSE	The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS): API & Web Service Security				
	TRUE	ISO 27001-Information Security Management				
	FALSE	ISO 27002-Information Technology				
	FALSE	ISO/IEC 27033- IT Network Security Standard				
	FALSE	Center For Information Security (CIS): Secure Configuration for Network Devices				
	FALSE	TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers				
	FALSE	SNI 8799-1:2019 Teknologi Informasi – Pusat Data				
		Standar internasional lainnya :				
	FALSE					
	FALSE					
	Regulasi Lainnya					
	TRUE	Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang SMKI				
	FALSE					
	FALSE					
	FALSE					
2	Hasil dari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE untuk Aplikasi dan Infrastruktur SPBE: (dalam kurun waktu 2 tahun terakhir)		Aplikasi / Infrastruktur	Hasil Audit	internal / eksternal	dd-mm-yy
	Belum pernah dilaksanakan Audit Keamanan SPBE					

3	Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam			
	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE:			dd-mm-yy
	Bimtek Sertifikat Elektronik	tanggal		
	Bimbingan Teknis Penerapan SMK	tanggal		16 Juni 2021
	Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber	tanggal		19 - 21 Mei 21
	Sosialisasi Penanganan Insiden Siber			Juni 202
	Bimtek Penerapan JKS melalui Esanapati			
	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE			dd-mm-yy
	Aplikasi Web Portal NTT	tanggal		5 s.d 10 Okt 20
	Aplikasi e-Nadi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT	tanggal		5 s.d 10 Okt 20
	Aplikasi e-Absensi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT	tanggal		5 s.d 10 Okt 20
	Web Portal SIM RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	tanggal		7 s.d 11 Des 20
	Aplikasi PPK Online Provinsi NTT - BKD Provinsi NTT	tanggal		7 s.d 11 Des 20
	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Si Ikan Mas) - BKD Provinsi NTT	tanggal		7 s.d 11 Des 20
	Aplikasi SIEP NTT - Dinas Kominfo Prov NTT	tanggal		
	Aplikasi E-Nadi Terintegrasi - Dinas Kominfo Prov NTT	tanggal		
		tanggal		
		tanggal		
	Peningkatan Keamanan SPBE			dd-mm-yy
	Hardening Web Portal SIM RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	tanggal		10-Nov-2021
	Hardening Aplikasi PPK Online Provinsi NTT - BKD Provinsi NTT	tanggal		11-Nov-2021
	Hardening Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Si Ikan Mas) - BKD Provinsi NTT	tanggal		11-Nov-2021
	Hardening Aplikasi e-Nadi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT	tanggal		12-Nov-2021
	Hardening Aplikasi e-Absensi NTT - Dinas Kominfo Provinsi NTT	tanggal		12-Nov-2021
		tanggal		
		tanggal		
		tanggal		
		tanggal		
		tanggal		
	Penanganan insiden Keamanan SPBE			dd-mm-yy
	Penanganan Insiden Web Portal NTT	tanggal		1-Nov-2021

[illegible]

Metada Manajemen Keamanan SPBE	
	1;1;1;
	Perban BSSN No 4 Tahun 2021,ISO 27001-Information Security Management,Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang SMKI,;
	0,0,0,0,0,0,0,0;0,0,0,0,0,0,0,0;
	00-01-00,00-01-00;
	rendah;rendah;tinggi;rendah;
	#VALUE!
	Pemprov DKI
Data "Sangat Rahasia" =	#VALUE!
Data "Rahasia" =	#VALUE!
Data "Terbatas" =	#VALUE!
Data "Publik/Ummum" =	#VALUE!
tanggal pengisian :	6-Jul-2022
	6-Jul-2021
edukasi kesadaran :	0
penilaian kerentanan :	0
peningkatan keamanan :	5
penanganan insiden :	1

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

TABEL 9

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 72 TAHUN 2022
 TANGGAL : 9 Juni 2022

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika						
Indikator	Persentase Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah				80	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE PEMROV. NTT : Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah						
Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
	B	Pedoman Rencana Induk Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi NTT)	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

		-	Penyusunan Pedoman Rencana Induk Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi NTT)	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penetapan Pedoman Rencana Induk Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTT (Blue Print Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi NTT)	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
2	Manajemen						
	A		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM di bidang Jaringan	Badan Kepegawaian Daerah & Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
		-	Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM di bidang Jaringan				
3	Layanan						
	A		Layanan Internet terintegrasi untuk 33 PD	Dinas Kominfo Prov. NTT	33 PD	33 PD	33 PD
		-	Penerapan Sistem Internet terintegrasi		33 PD	33 PD	33 PD
	B		Layanan Manajemen Bandwith, Pemantauan, Pemeliharaan dan Pengendalian Layanan Internet	Dinas Kominfo Prov. NTT	39 PD	39 PD	39 PD
		-	Penerapan Manajemen Bandwith, Pemantauan, Pemeliharaan dan Pengendalian Layanan Internet		39 PD	39 PD	39 PD
		-	Pengembangan Layanan Manajemen Bandwith, Pemantauan, Pemeliharaan dan Pengendalian Layanan Internet		39 PD	39 PD	39 PD
	C		Layanan Internet terintegrasi untuk Backup Internet	Dinas Kominfo Prov. NTT	39 PD	39 PD	39 PD

TABEL 9

		-	Penerapan Layanan Internet terintegrasi untuk Backup Internet		39 PD	39 PD	39 PD
		-	Layanan Internet terintegrasi untuk Backup Internet		39 PD	39 PD	39 PD
4	Aplikasi						
	A		Aplikasi Pendukung Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah	Dinas Kominfo Prov. NTT	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Penukung Layanan Penyelenggaraan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah			√	
5	Infrastruktur						
	A		Penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung dan landscape Pusat Pengendalian dan Layanan SPBE Provinsi NTT	Dinas Kominfo Prov. NTT			
		-	Pembangunan Gedung dan landscape Pusat Pengendalian dan Layanan SPBE Provinsi NTT				
6	Keamanan						
	A		Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah	Dinas Kominfo Prov. NTT	25%	100%	100%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah			100%	100%
7	Audit TIK						
	A		Penyelenggaraan Audit Internal Layanan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah	Dinas Kominfo Prov. NTT dan Inspektorat NTT	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal sistem jaringan Intra Pemerintah daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat sistem jaringan Intra Pemerintah daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan sistem jaringan Intra Pemerintah daerah			√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline		Target		
				2021	2022	2023	2024	2025
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Indikator	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis				50	50	100	100
Indikator	Jumlah sarana dan prasarana SPBE				10	10	39	39
Indikator	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				10	10	39	39
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE PEMROV. NTT : Layanan yang Terintegrasi								
1 Tata Kelola								
	A	Kebijakan Layanan yang berbasis elektronik	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan yang berbasis elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan yang berbasis elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
	B	Pedoman Implementasi Layanan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT		Belum Ada	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan Pedoman Implementasi Layanan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT		Belum Ada	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penetapan Pedoman Implementasi Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT		Belum Ada	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur SPBE Pemrov. NTT untuk Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT		Belum Ada	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

		-	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT		Belum Ada	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		2 Manajemen							
	A		Peningkatan Kapabilitas SDM penunjang SPBE	Badan Kepegawaian Daerah & Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
		-							
		3 Layanan							
	A		Layanan Administrasi Perkantoran elektronik	Dinas Kominfo Prov. NTT dan PD terkait		20 PD	39 PD	39 PD	39 PD
		-	Penerapan sistem Administrasi Perkantoran elektronik yang terintegrasi			20 PD	39 PD	39 PD	39 PD
	B		Layanan Publik elektronik	Dinas Kominfo Prov. NTT dan PD terkait		20 PD	39 PD	39 PD	39 PD
		-	Penerapan Layanan Publik Online			20 PD	39 PD	39 PD	39 PD
		-	Pengembangan Layanan Publik online			20 PD	39 PD	39 PD	39 PD
		4 Aplikasi							
	A		Aplikasi Administrasi Perkantoran	Dinas Kominfo Prov. NTT dan PD terkait		√	√	√	√
		-	Pembangunan Aplikasi Perkantoran			√	√	√	
		-	Integrasi Data dan Aplikasi Perkantoran			√	√	√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Perkantoran			√	√	√	√
	A		Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kominfo Prov. NTT dan PD terkait		√	√	√	√
		-	Pembangunan Aplikasi Layanan Publik			√	√	√	
		-	Integrasi Data dan Aplikasi Layanan Publik			√	√	√	√

		-	Pengembangan Aplikasi Perkantoran Online			√	√	√	√
5 Infrastruktur									
	A		Pusat Data Administrasi Perkantoran dan Layanan Publik	Dinas Kominfo Prov. NTT dan PD terkait					
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung administrasi perkantoran dan Layanan Publik yang berbasis elektronik						√
6 Keamanan									
	A		Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo Prov. NTT		25%	25%	100%	100%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik			25%	25%	100%	100%
7 Audit TIK									
	A		Penyelenggaraan Audit Internal	Team Audit Internal		√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Aplikasi			√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Infrastruktur			√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Keamanan			√	√	√	√
	B		Penyelenggaraan Audit Eksternal	Team Audit Eksternal					√
		-	Pelaksanaan Audit Aplikasi				√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Infrastruktur				√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Keamanan				√	√	√

No	Project/Activities		UIC	Baseline		Target		
				2021	2022	2023	2024	2025
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Komunikasi dan Informatika								
Indikator	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate		Dinas Komunikasi dan Informatika		68,2	100	100	100
Indikator	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika		100	100	100	100
Indikator	Indeks Kematangan Keamanan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika		4-4,9	5	5	5
Indikator	Indeks Penyelenggaraan SPBE		Dinas Komunikasi dan Informatika		2,5	2,7	2,7	2,7
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi								
D Tata Kelola								
	A	Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			√	√	√	√
		- Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			√	√	√	√
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			√	√	√	√
	B	Pedoman Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
		- Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			√	√	√	√

	C	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
		- Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi			√	√	√	√
		- Identifikasi Layanan Data & Informasi			√	√	√	√
		- Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE			√	√	√	√
2 Manajemen								
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM di Bidang TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika dan BKD		√	√	√	√
		- Pelatihan di bidang TIK untuk peningkatan keahlian			√	√	√	√
		- Bimbingan Teknis bidang TIK secara teratur			√	√	√	√
		- Peningkatan Formasi CPNS di bidang TIK			√	√	√	√
3 Layanan								
	1	Layanan Administrasi Pemerintahan secara Online	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
		- Penerapan Sistem informasi Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi			√	√	√	√
	2	Layanan Penyediaan Informasi Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral secara Online	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
		- Penerapan Penyediaan Informasi Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral yang Terintegrasi			√	√	√	√

		-	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Keamanan Data dan informasi SPBE secara terintegrasi				√	√	√
6 Keamanan									
	A		Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Publik dan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	75%	85%	85%
		-	Penerapan Keamanan Data dan Informasi pada Layanan Data dan Informasi Publik dan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			√	75%	85%	85%
7 Audit TIK									
	A		Penyelenggaraan Audit Internal Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT	Team Audit		√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√
	B		Penyelenggaraan Audit External Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT	Team Audit		√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit External Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√

	3	Layanan Penyediaan Keamanan dan Persandian secara Online	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
	-	Penerapan Penyediaan Keamanan dan Persandian yang Terintegrasi			√	√	√	√
	4	Layanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik secara Online	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
	-	Penerapan Penyediaan Informasi dan komunikasi kepada Publik yang Terintegrasi			√	√	√	√
4 Aplikasi								
	-	Aplikasi SPBE yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
	-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi secara terintegrasi				√	√	√
5 Infrastruktur								
	A	Infrastruktur jaringan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√
	-	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi				√	√	√
	B	Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informatika		Belum Ada	√	√	√
	-	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Data secara terintegrasi				√	√	√
	B	Pusat Keamanan Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√	√

		-	Pelaksanaan Audit External Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit External Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT			√	√	√	√

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target		
				2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Indikator	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis elektronik				100	100	
Indikator	Jumlah sarana dan prasarana SPBE				39	39	
Indikator	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Office)				39	39	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE PEMROV. NTT : Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan administrasi perkantoran yang berbasis elektronik		Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan administrasi perkantoran yang berbasis elektronik		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penetapan Kebijakan Layanan administrasi perkantoran yang berbasis elektronik		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik		1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
	B	Pedoman Implementasi Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik		Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan Pedoman Implementasi Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penetapan Pedoman Implementasi Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

	C	Penyusunan Arsitektur SPBE Pemrov. NTT untuk Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik Terintegrasi			Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman	
		-	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik			Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov. NTT	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
2	Manajemen								
	A	Peningkatan Kapabilitas SDM penunjang SPBE			Badan Kepegawaian Daerah & Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
		-							
3	Layanan								
	A	Layanan Surat Menyurat dan tanda tangan elektronik			Dinas Kominfo Prov. NTT	39 PD	39 PD	39 PD	
		-	Penerapan sistem surat menyurat dan tandatangan elektronik terintegrasi				39 PD	39 PD	39 PD
	B	Layanan Arsip Online			Dinas Arsipus Prov. NTT	39 PD	39 PD	39 PD	
		-	Penerapan Arsip Online				39 PD	39 PD	39 PD
		-	Pengembangan Layanan Arsip online				39 PD	39 PD	39 PD
	C	Layanan Absensi Eletronik (e-absensi)			Dinas Kominfo Prov. NTT	39 PD	39 PD	39 PD	
		-	Penerapan Absensi Elektronik terintegrasi				39 PD	39 PD	39 PD
		-	Integrasi Layanan data absensi dan data Kinerja				39 PD	39 PD	39 PD

TABEL 9

4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Rekam Medis Online		Dinas Kominfo Prov. NTT	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan Aplikasi Perkantoran			√	
		-	Integrasi Data dan Aplikasi Perkantoran			√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Perkantoran Online			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data Perkantoran		Dinas Kominfo Prov. NTT			
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung administrasi perkantoran yang berbasis elektronik				
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo Prov. NTT	25%	100%	100%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik			100%	100%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo Prov. NTT dan Inspektorat NTT	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Perkantoran			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Perkantoran			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Perkantoran Berbasis Elektronik			√	√

NG

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pengelolaan Pendidikan						
Indikator	Jumlah platform layanan pendidikan berbasis teknologi				√	√
Indikator	Jumlah konten digital pendidikan.				√	√
Indikator	Persentase data dan informasi yang dapat digunakan				50%	100%
Indikator	Jumlah Kebijakan yang berkualitas				√	√
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : Layanan Pendidikan Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pendidikan Berbasis Elektronik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pedoman Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Pendidikan Terintegrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum Ada	√	√
		- Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		- Reviuw Arsitektur SPBE				√
2	Manajemen					

NG

TABEL 9

	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√
	-	Pelatihan Proses Pembelajaran Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Pendidikan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Pelatihan Proses Pembelajaran Berbasis Elektronik bagi Siswa/i				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Standarisasi Kurikulum pada institusi Pendidikan				√	√
3	Layanan						
	A	Layanan Data dan Informasi Pendidikan secara Online		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Penerapan data dan informasi pendidikan yang terintegrasi dengan data kependudukan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	B	Layanan Konten Digital Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Penerapan Proses Pembelajaran secara digital				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Pengembangan Layanan Konten Digital					√
	C	Layanan administrasi elektronik bagi tenaga pendidik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60%	80%	100%
	-	Penerapan administrasi elektronik				80%	100%
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Proses Pembelajaran Online		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
	-	Pembangunan Aplikasi Proses Pembelajaran Online				√	√
	-	Pengembangan Aplikasi Proses Pembelajaran Online				√	√

TABEL 9

5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Pendidikan		Dinas Kominfo	Belum Ada	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	50%	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi Proses Pembelajaran Berbasis Elektronik			75%	85%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo, Inspektorat dan BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Proses Pembelajaran Online			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pendidikan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pendidikan Berbasis Elektronik			√	√

NG

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Perizinan dan pendaftaran perusahaan						
Indikator	Persentase Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online				50%	100%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Layanan Perdagangan Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Implementasi Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pedoman Layanan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online			1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

		C	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online Terintegrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	√	√
			- Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
			- Reviuw Arsitektur SPBE				√
	2	Manajemen					
		-	Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online untuk petugas pelayanan Perindustrian			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	3	Layanan					
		A	Layanan Data dan Informasi Perdagangan secara Online	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi perdagangan yang terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		B	Layanan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pengembangan Layanan Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online				√
	4	Aplikasi					

TABEL 9

		A	Aplikasi Sistem Perijinan Usaha dan Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	√	√
			- Pembangunan Aplikasi Sistem Perijinan Usaha dan Investasi Online			√	√
			- Pengembangan Aplikasi Sistem Perijinan Usaha dan Investasi online			√	√
	5	Infrastruktur					
		A	Pusat Data dan Informasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Kominfo	Belum Ada	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
			- Perluasan Infrastruktur Pendukung			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	6	Keamanan					
		A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
			- Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik			75%	85%
	7	Audit TIK					
		A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Perdagangan Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
			- Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Sistem Perijinan Usaha dan Investasi online			√	√



TABEL 9

			-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Perindustrian dan Perdagangan			√	√
			-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Perindustrian dan Perdagangan Berbasis Elektronik			√	√

Me

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target		
				2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Perencanaan dan pembangunan industri							
Indikator	Jumlah Industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri				50%	100%	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Layanan Perindustrian Terintegrasi							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penetapan Kebijakan Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pembangunan industri pengolahan berbasis elektronik		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pembangunan industri pengolahan berbasis elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

	C	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Reviuw Arsitektur SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Perindag, BKD, Dinas Kominfo dan BPSDM	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik untuk petugas pelayanan Perindustrian			√	√
3	Layanan						
	A	Layanan Data dan Informasi Perindustrian secara Online		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi perindustrian yang terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	B	Layanan Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota



TABEL 9

		-	Pengembangan Layanan Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik		Dinas Perindag dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik			√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan industri pengolahan berbasis eletronik yang terintegrasi			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan		Dinas Kominfo	Belum Ada	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						

TABEL 9

	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Perindustrian Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Pembangunan industri pengolahan berbasis elektronik			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Perindustrian dan Perdagangan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Perindustrian dan Perdagangan Berbasis Elektronik			√	√

NB

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Indikator	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi				50%	100%
Indikator	Persentase Rumah Layak Huni				50%	100%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT : Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

		-	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	D	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Reviu Arsitektur SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Perindag, BKD, Dinas Kominfo dan BPSDM	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik untuk petugas pelayanan Perumahan Rakyat			√	√
3	Layanan						
	A	Layanan Data dan Informasi Perumahan Rakyat secara Online		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi Perumahan Rakyat yang terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	B	Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota



TABEL 9

		-	Pengembangan Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis elektronik		Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis elektronik			√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan Perumahan Rakyat berbasis elektronik yang terintegrasi			√	√
	B	Aplikasi Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik		Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik yang terintegrasi			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%

TABEL 9

		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A		Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik berbasis elektronik			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pembangunan Rumah Layak Huni berbasis elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem						
Indikat	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate				80%	100%
Indikat	Jumlah KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata				80%	100%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Layanan Pekerjaan Umum						
Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Jalan Berbasis Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
	-	Penyusunan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Jalan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
	-	Penetapan Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Jalan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
	-	Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Jalan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
	-	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Kebijakan Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
	-	Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
	-	Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan

TABEL 9

		- Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	C	Pedoman Pembangunan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	D	Penyusunan Arsitektur SPBE Layanan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Ada	√	√
		- Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		- Reviu Arsitektur SPBE				√
2	Manajemen					
		- Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Perindag, BKD, Dinas Kominfo dan BPSDM	√	√	√
		- Pelatihan Layanan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik untuk petugas pelayanan Pekerjaan Umum			√	√
3	Layanan					
	A	Layanan Data dan Informasi Perumahan Rakyat secara Online	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		- Penerapan data dan informasi Perumahan Rakyat yang terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota



TABEL 9

	B	Layanan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		- Penerapan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		- Pengembangan Layanan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4 Aplikasi						
	A	Aplikasi Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik	Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik			√	√
		- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Penyelenggaraan Jalan berbasis elektronik yang terintegrasi			√	√
	B	Aplikasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik	Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			√	√
		- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik yang terintegrasi			√	√
5 Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Pekerjaan Umum	Dinas PUPR dan Dinas Kominfo	Belum Ada	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		- Perluasan Infrastruktur Pendukung			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
6 Keamanan						

TABEL 9

	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Pekerjaan Umum Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
	-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Pekerjaan Umum Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Pekerjaan Umum Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
	-	Pelaksanaan Audit Internal Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			√	√
	-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			√	√
	-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Penyelenggaraan Jalan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Indikator	Prosentase Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			84,9	100	100
Indikator	Persentase kualitas layanan UKM dan UKP			66,7	100	100
Indikator	Persentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)			71,4	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KESEHATAN : Layanan Kesehatan Terintegrasi						
1 Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada		1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	
		- Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
		- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
	B	Pedoman Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana prasarana dan alkes	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada		1 Pedoman
		- Penyusunan Pedoman Implementasi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana prasarana dan alkes			1 Pedoman	
		- Penetapan Pedoman Implementasi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana prasarana dan alkes				1 Pedoman
	C	Pembaruan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Dinas Kesehatan dan Dukcapil untuk Layanan Kesehatan Terintegrasi	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada		√

NG

TABEL 9

		-	Identifikasi Data & Informasi Layanan Kesehatan Terintegrasi			√	√
		-	Inovasi terhadap Arsitektur Proses Bisnis SPBE Dinas Kesehatan			√	√
2 Manajemen							
	A	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Kesehatan dan Dukcapil	√	√	√
		-	Pelatihan Health Informatics untuk petugas pelayanan kesehatan			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Pelatihan Health Informatics bagi Publik			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Standarisasi Kurikulum Health Informatics pada institusi Pendidikan			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
3 Layanan							
	A	Layanan Rujukan Online		Dinas Kesehatan dan Dukcapil	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Penerapan sistem rujukan terintegrasi			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Pengembangan Layanan Rujukan Online			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Integrasi Fasilitas Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta				√
	B	Layanan Telemedicine		Dinas Kesehatan dan Dukcapil	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Penerapan telemedicine			22 Kab./Kota	22 Kab./Kota
		-	Pengembangan Layanan Telemedicine				√
	C	Layanan Rekam Medis		Dinas Kesehatan dan Dukcapil	60%	80%	100%
		-	Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi			80%	100%
	D	Layanan Personal Health Record		Dinas Kesehatan dan Dukcapil	30%	40%	50%
		-	Integrasi Layanan Personal Health Record			40%	50%

TABEL 9

4 Aplikasi						
	A	Aplikasi Rekam Medis Online		Dinas Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo	Belum Ada	√
		-	Pembangunan Aplikasi Rekam Medis Online			√
		-	Integrasi Data dan Aplikasi Rekam Medis Online dengan Dukcapil Online			√
		-	Pengembangan Aplikasi Rekam Medis Online			√
	B	Sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah		Dinas Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo	Belum Ada	√
		-	Pengintegrasian Sistem Informasi kesehatan pusat dan daerah		√	√
5 Infrastruktur						
	A	Pusat Data Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo	Belum Ada	√
		-	Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Pendukung Telemedicine		√	√
6 Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo		75%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			85%
						75%
						85%
7 Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo dan BKD	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Telemedicine Kemenkes		√	√

TABEL 9

		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Modern Bidang Kesehatan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			√	√

Me

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Indikator	Persentase kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib			97	100	100
Indikator	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			76,9	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KESEHATAN DAN DUKCAPIL : Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pedoman Layanan administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Layanan administrasi Kependudukan Terintegrasi	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	Belum Ada	√	√
		- Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	

TABEL 9

		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE				√
	D		Penguatan data rutin dan inovasi serta penerapan Big Data	Dinas Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
		-	Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	√	√	√
		-	Pelatihan penerapan sistem single entry Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Dukcapil			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan sistem single entry Berbasis Elektronik bagi Petugas Dukcapil			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	A		Layanan Data dan Informasi Kependudukan secara Online	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan data kependudukan			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	B		Layanan administrasi Kependudukan	Dinas Kesehatan dan Dukcapil	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan sistem single entry			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penguatan data rutin dan inovasi serta penerapan Big Data				√
4	Aplikasi						

TABEL 9

	A	Aplikasi sistem informasi kesehatan	Dinas Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo	Belum Ada		√
		- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan			√	√
		- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan			√	√
5	Infrastruktur					
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Dukcapil	Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		- Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Kependudukan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Kependudukan Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Kependudukan Berbasis Elektronik	Kesehatan dan Dukcapil, Dinas Kominfo, Inspektorat	√	√	√
		- Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi kesehatan dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi Kependudukan			√	√

TABEL 9

		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Kesehatan dan Dukcapil			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan Berbasis Elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target		
					2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Perlindungan dan Jaminan Sosial								
Indikator	Persentase Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS				90	100	100	
Indikator	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				90	100	100	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS SOSIAL : Layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial Terintegrasi								
1 Tata Kelola								
	A	Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik			Dinas Sosial	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik				1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penetapan Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik				1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik				1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Bantuan Sosial Berbasis Elektronik			Dinas Sosial	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik				1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE Layanan data kesejahteraan sosial terpadu yang Terintegrasi			Dinas Sosial	Belum Ada	√	√

Nb

TABEL 9

		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE				√
	D	Pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu		Dinas Sosial	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Data SPBE				√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Sosial, BKD dan BPSDM	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Dinas Sosial			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan data kesejahteraan sosial terpadu Berbasis Elektronik bagi Petugas Dinas Sosial			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3 Layanan							
	A	Layanan Bantuan Sosial secara Online		Dinas Sosial	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi data kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan data kependudukan			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	B	Layanan administrasi Kependudukan		Dinas Sosial	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan sistem single entry			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota

TABEL 9

		-	Penguatan data rutin dan inovasi serta penerapan Big Data				√
4 Aplikasi							
	A	Aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial		Dinas Sosial dan Dinas Kominfo	Belum Ada		√
		-	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi kesejahteraan sosial			√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi kesejahteraan sosial			√	√
5 Infrastruktur							
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Kesejahteraan Sosial		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6 Keamanan							
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Elektronik			75%	85%
7 Audit TIK							
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Elektronik		Dinas Sosial, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi kesehatan dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi Kesejahteraan Sosial			√	√

TABEL 9

		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Sosial			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						
Indikator	Persentase Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun			100	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Elektronik	Badan Kesbangpol	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Berbasis Elektronik	Badan Kesbangpol	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat Dan Daerah		Badan Kesbangpol	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Badan Kesbangpol, BKD dan Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Kesbangpol			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan data Layanan Penyelesaian Konflik Sosial terpadu Berbasis Elektronik bagi Petugas Kesbangpol			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3 Layanan							
	-	Layanan Penyelesaian Konflik Sosial secara Online		Badan Kesbangpol	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4 Aplikasi							

TABEL 9

	A	Aplikasi sistem informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Kesbangpol dan Dinas Kominfo	Belum Ada		√
		-	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi			√	√
5 Infrastruktur							
	A	Pusat Data dan Informasi Bidang Kesatuan bangsa dan politik		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6 Keamanan							
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Kemanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Berbasis Elektronik			75%	85%
7 Audit TIK							

TABEL 9

	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		- Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			√	√
		- Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Kesbangpol			√	√
		- Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Berbasis Elektronik			√	√

VB

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum						
Indikator	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun		Biro Hukum	100	100	100
Indikator	Persentase penyelesaian kasus hukum setiap tahun		Biro Hukum	100	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE BIRO HUKUM : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis Elektronik	Biro Hukum	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik	Biro Hukum	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

NG

TABEL 9

		-	Penyusunan dan Penetapan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C		Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat Dan Daerah	Biro Hukum	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2 Manajemen							
	-		Peningkatan Kapabilitas SDM	Biro Hukum, BKD	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Biro Hukum			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan data Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu terpadu Berbasis Elektronik bagi Petugas Biro Hukum			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3 Layanan							
	1		Layanan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu secara Online	Biro Hukum	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota

NB

TABEL 9

		-	Penerapan data dan informasi Penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	2	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Online		Biro Hukum	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan data dan informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi sistem informasi penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu		Biro Hukum dan Dinas Kominfo	Belum Ada		√
		-	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu			√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Hukum		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						



TABEL 9

	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi penanganan perkara tindak pidana terpadu			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Hukum			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi penanganan perkara tindak pidana terpadu Berbasis Elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian						
Indikator	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak di NTT dan di kantong kemiskinan dan Stunting serta Pariwisata estate,		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	7	8
Indikator	Persentase penggunaan benih bersertifikat		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	7	8
Indikator	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	7	8
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN : Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan berbasis Elektronik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman penggunaan benih bersertifikat Berbasis Elektronik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

Ne

TABEL 9

		-	Penyusunan dan Penetapan penggunaan benih bersertifikat Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pertanian Yang Terintegrasi		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BKD dan Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan penggunaan benih bersertifikat Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Pertanian			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan data Layanan penggunaan benih bersertifikat Berbasis Elektronik bagi Petugas Pertanian			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan Inovasi Teknologi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian Berbasis Elektronik bagi Petugas Pertanian			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Sarana Prasarana Penunjang Pertumbuhan Produksi Pertanian secara Online		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota

nb

TABEL 9

		1	Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		2	Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Hortikultura Tanaman Pangan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		3	Penerapan Sistem informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Perkebunan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		4	Penerapan Inovasi Teknologi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian yang terintegrasi		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kominfo	Belum Ada		√
		-	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian			√	√
		-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Pertanian			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%

nb

TABEL 9

		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A		Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Berbasis Elektronik			√	√

NB

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target		
				2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya							
Indikator	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	6	7	
Indikator	Persentase Penurunan Kasus UU Fishing		Dinas Kelautan dan Perikanan	32	0	0	
Indikator	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan		Dinas Kelautan dan Perikanan	9,52	8,70	8	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN : Layanan Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan yang terintegrasi							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan berbasis Elektronik		Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan

NB

TABEL 9

		-	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman pengelolaan sumber daya perikanan Berbasis Elektronik		Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan sumber daya perikanan Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Pedoman pengelolaan sumber daya perikanan Berbasis Elektronik		Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan sumber daya perikanan Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	D	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Kelautan dan Perikanan Yang Terintegrasi		Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Kelautan dan Perikanan, BKD dan Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pelatihan Layanan Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Perikanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota

NB

TABEL 9

		-	Pelatihan Layanan Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Perikanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan Layanan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Berbasis Elektronik untuk petugas pelayanan Perikanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan data Layanan bidang Kelautan dan Perikanan Berbasis Elektronik bagi Petugas Perikanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Pelatihan penerapan Pengelolaan Inovasi Teknologi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Berbasis Elektronik bagi Petugas Perikanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Sarana Prasarana Penunjang Pertumbuhan Produksi Perikanan secara Online		Dinas Kelautan dan Perikanan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		1	Penerapan Sistem informasi Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		2	Penerapan Sistem informasi Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya dan pengelolaan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		3	Penerapan Sistem informasi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota



TABEL 9

		4	Penerapan Inovasi Teknologi Sarana Prasarana Pertumbuhan Produksi Perikanan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi		Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan			√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						

TABEL 9

	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pengelolaan Kelautan dan Perikanan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Kesehatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						
Indikator	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial		Dinas Kehutanan	10,32	11,25	11,25
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN : Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Elektronik	Dinas Kehutanan	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis Elektronik	Dinas Kehutanan	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

pl

TABEL 9

		-	Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Yang Terintegrasi		Dinas Kehutanan	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
		-	Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Kehutanan, BKD dan Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk petugas pelayanan Kehutanan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Online		Dinas Kehutanan dan Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		1	Penerapan Sistem informasi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		2	Penerapan Sistem informasi luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						

TABEL 9

	A	Aplikasi Sistem Informasi pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial yang terintegrasi		Dinas Kehutanan dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Kehutanan		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasipengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial			√	√

TABEL 9

		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan pengelolaan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial Berbasis Elektronik			√	√
--	--	---	--	--	--	---	---

Nb

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja di Bidang Tenaga Kerja						
Indikator	Persentase Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan		Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	80	90	90
Indikator	Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja		Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	55	60	60
Indikator	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	50	55	55
Indikator	Persentasi meningkatnya PMI prosedural		Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	75	85	85
Indikator	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi		Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	70	90	90
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi : Layanan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi yang terintegrasi						
D	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja berbasis Elektronik	Dinas Koperasi danTenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan

NC

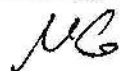
TABEL 9

		-	Penetapan Kebijakan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
		-	Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan BKD serta Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja untuk petugas pelayanan Tenaga Kerja		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						

26

TABEL 9

	-	Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja secara Online	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
	-	Penerapan Sistem informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi					
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja yang terintegrasi	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
	-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja			√	√
5	Infrastruktur					
	A	Pusat Data dan Informasi Teanaga Kerja	Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
	-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan					
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
	-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK					



TABEL 9

	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi pengelolaan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pelatihan kerja, produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Elektronik			√	√

Handwritten signature/initials

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target		
				2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
Indikator	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	25	25	75	
Indikator	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	100	100	100	
Indikator	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	100	100	100	
Indikator	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	100	100	100	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu : Layanan Penanaman Modal yang terintegrasi							
D Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Penanaman Modal berbasis Elektronik		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Penanaman Modal Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan

ll

TABEL 9

		-	Penetapan Kebijakan Layanan Penanaman Modal Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		-	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Penanaman Modal Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Berbasis Elektronik		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Terintegrasi		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu, BKD, Dinas Kominfo	√	√	√

nb

TABEL 9

		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal untuk petugas pelayanan Penanaman Modal		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3 Layanan							
	-	Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal secara Online		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu, dan Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		1	Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4 Aplikasi							
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terintegrasi		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu, dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			√	√
5 Infrastruktur							
	A	Pusat Data dan Informasi Kehutanan		Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6 Keamanan							
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%

NC

TABEL 9

		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal Berbasis Elektronik			75%	85%
7 Audit TIK							
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Penanaman Modal			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Penanaman Modal			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Penanaman Modal Berbasis Elektronik			√	√

Me

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Keuangan Daerah						
Indikator	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang –undangan		Badan Keuangan Daerah	100	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Keuangan Derah : Layanan Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan yang terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik	Badan Keuangan Daerah	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Berbasis Elektronik	Badan Keuangan Daerah	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Penyampaian Dokumen Keuangan Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman



TABEL 9

	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Bidang Keuangan Yang Terintegrasi		Badan Keuangan Daerah	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Badan Keuangan, BKD, Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan untuk petugas pelayanan Dokumen Keuangan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan secara Online		Bakeuda, dan Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi		Bakeuda, dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan			√	√
5	Infrastruktur						

TABEL 9

	A	Pusat Data dan Informasi Keuangan		Bakeuda, dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Keuangan Daerah Berbasis Elektronik		Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Keuangan Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Keuangan Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Keuangan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Keuangan			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik			√	√



TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Barang Milik Daerah						
Indikator	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah		Badan Aset Daerah	100	100	100
Indikator	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah		Badan Aset Daerah	100	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Aset Derah : Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi						
D	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah berbasis Elektronik	Badan Aset Daerah	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik	Badan Aset Daerah	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman

TABEL 9

	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Bidang Aset Daerah Yang Terintegrasi		Badan Aset Daerah	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Badan Aset, BKD, Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah untuk petugas pelayanan Aset Daerah		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah secara Online		Badan Aset, Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			√	√
5	Infrastruktur						

TABEL 9

	A	Pusat Data dan Informasi Barang Milik Daerah		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Data dan Informasi Aset Daerah Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi BMD Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Aset Daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Elektronik			√	√

106

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Indikator	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		Badan Aset Daerah	34,04	37,56	40
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE Badan Aset Derah : Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Elektronik	Badan Aset Daerah	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik	Badan Aset Daerah	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		- Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Terintegrasi	Badan Aset Daerah	Belum Ada	√	√

NG

TABEL 9

		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi Terintegrasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Data SPBE				√
2	Manajemen						
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Badan Aset, BKD, Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah petugas pelayanan Aset Daerah		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-	Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Online		Badan Aset, Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						

TABEL 9

	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik		Badan Aset, Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Elektronik			√	√

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)						
Indikator	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM		Dinas Kopnakertrans	83	100	100
Indikator	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha dan Pelatihan Kewirausahaan		Dinas Kopnakertrans	82	85	90
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : Layanan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) berbasis Elektronik	Dinas Kopnakertrans	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Pedoman Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik	Dinas Kopnakertrans	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman

Ne

TABEL 9

		-	Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C		Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Yang Terintegrasi	Dinas Kopnakertrans	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE				√
2	Manajemen						
	-		Peningkatan Kapabilitas SDM	Dinas Kopnakertrans, BKD, Dinas Kominformasi	√	√	√
		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) petugas UMKM		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3	Layanan						
	-		Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) secara Online	Dinas Kopnakertrans, Dinas Kominformasi	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Sistem informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A		Aplikasi Sistem Informasi Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang terintegrasi	Dinas Kopnakertrans dan Dinas Kominformasi	Belum Ada	√	√

16

TABEL 9

		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			√	√
5	Infrastruktur						
	A		Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dinas Kopnakertrans dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						
	A		Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik	Dinas Kopnakertrans dan Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A		Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Bidang Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			√	√

TABEL 9

		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Layanan Pengelolaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Berbasis Elektronik			√	√
--	--	---	---	--	--	---	---

Handwritten signature

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
Indikator	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	56,67	56,67	60
Indikator	Pesentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79,17	100	100
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI DAN KREATIF : Layanan Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Terintegrasi						
1 Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berbasis Elektronik	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum Ada	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Penetapan Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	1 Kebijakan
		- Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Berbasis Elektronik			1 kegiatan	1 kegiatan

NG

TABEL 9

	B	Pedoman Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum Ada	1 Pedoman	1 Pedoman
		-	Penyusunan dan Penetapan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik			1 Pedoman	1 Pedoman
	C	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis dan Data SPBE Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terintegrasi		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum Ada	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi			√	
		-	Review Arsitektur Proses Bisnis SPBE				√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BKD, Dinas Kominfo	√	√	√
		-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif petugas Parekraf		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
3 Layanan							

TABEL 9

	-	Layanan Sistem Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara Online		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kominfo	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
		-	Penerapan Sistem informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi			22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
4	Aplikasi						
	A	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Pusat Data dan Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kominfo	Belum Ada	√	√
		-	Perluasan Infrastruktur Pendukung			√	√
6	Keamanan						



TABEL 9

	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kominfo	Belum Ada	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur Untuk Layanan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik			75%	85%
7	Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal Layanan Data dan Informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Elektronik		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi sistem informasi Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Pusat Data Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			√	√

NG

TABEL 9

PETA RENCANA SPBE PROVINSI NTT

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : Pengelolaan Komunikasi dan Informatika						
Indikator	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate		Dinas Komunikasi dan Informatika	68,2	100	100
Indikator	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100
Indikator	Indeks Kematangan Keamanan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika	4-4,9	5	5
Indikator	Indeks Penyelenggaraan SPBE		Dinas Komunikasi dan Informatika	2,5	2,7	2,7
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√	√
		- Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√	√

TABEL 9

		-	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√	√
	B	Pedoman Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√
		-	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Layanan Publik dan Adminitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√	√
	C	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√
		-	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemrov. NTT Yang Terintegrasi		√	√	√
		-	Identifikasi Layanan Data & Informasi		√	√	√
		-	Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE		√	√	√
2 Manajemen							
	-	Peningkatan Kapabilitas SDM di Bidang TIK		Dinas Komunikasi dan Informatika dan	√	√	√
		-	Pelatihan di bidang TIK untuk peningkatan keahlian		√	√	√
		-	Bimbingan Teknis bidang TIK secara teratur		√	√	√
		-	Peningkatan Formasi CPNS di bidang TIK		√	√	√

TABEL 9

3 Layanan						
	1	Layanan Administrasi Pemerintahan secara Online		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√
		-	Penerapan Sistem informasi Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi		√	√
	2	Layanan Penyediaan Informasi Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral secara Online		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√
		-	Penerapan Penyediaan Informasi Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral yang Terintegrasi		√	√
	3	Layanan Penyediaan Keamanan dan Persandian secara Online		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√
		-	Penerapan Penyediaan Keamanan dan Persandian yang Terintegrasi		√	√
	4	Layanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik secara Online		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√
		-	Penerapan Penyediaan Informasi dan komunikasi kepada Publik yang Terintegrasi		√	√
4 Aplikasi						
	-	Aplikasi SPBE yang terintegrasi		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√

NG

TABEL 9

		-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi secara terintegrasi			√	√
5	Infrastruktur						
	A	Infrastruktur jaringan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi			√	√
	B	Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum Ada	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Data secara terintegrasi			√	√
	B	Pusat Keamanan Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√
		-	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Keamanan Data dan informasi SPBE secara terintegrasi			√	√
6	Keamanan						
	A	Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan Data dan Informasi Publik dan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Dinas Komunikasi dan Informatika	√	75%	85%
		-	Penerapan Keamanan Data dan Informasi pada Layanan Data dan Informasi Publik dan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		√	75%	85%
7	Audit TIK						



TABEL 9

	A	Penyelenggaraan Audit Internal Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT		Inspektorat, Dinas Kominfo, BKD	√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT		√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT		√	√	√
		-	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemrov. NTT		√	√	√

pl

**PETA RENCANA MANAJEMEN SPBE
PROVINSI NTT**

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
	2 Manajemen							
	B Manajemen Layanan SPBE							
1	Penyediaan platform layanan perizinan online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
2	Penyediaan platform layanan kepegawaian online Badan Kepegawaian Daerah							
3	Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan layanan Rumah Sakit Umum Daerah							
4	Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online							
5								

16

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Perubahan Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	D Manajemen Perubahan SPBE						
1	Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi	Menyusun Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE	Menyusun SOP manajemen perubahan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

NG

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen SDM SPBE Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	E. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE						
1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyusun Peta Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyusun Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
4	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

NC

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Pengetahuan Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	G. Manajemen Pengetahuan						
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyusun dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Pelaksanaan Program Kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (Data, Informasi, aplikasi, dan Infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika	Menginventarisasi aset SPBE (Data, Informasi, aplikasi, dan Infrastruktur) dan mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat keamanan resiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

NB

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Aset TIK Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	A Manajemen Aset TIK						
1	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) Dinas Komunikasi dan Informatika	Menginventarisasi aset SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
4	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

NG

Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	C. Manajemen Keamanan Informasi						
1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan Informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen perencanaan program kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Pelaksanaan program kerja SPBE : menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan Infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika	Menginventarisasi seluruh aset SPBE dan pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta tingkat keamanan resiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
4	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
5	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

NG

TABEL 10

Peta Rencana Manajemen Data Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	B. Manajemen Data						
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada Pemrov. NTT	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Prov. NTT	Penyusunan Arsitektur Data Pemrov. NTT	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Perencanaan data induk dan data referensi	Penyusunan Perencanaan data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
4	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan data induk	Bappelitbangda	v	v	v	v
5	Pemeriksaan data induk dan data referensi	Pemeriksaan data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappelitbangda	v	v	v	v
6	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappelitbangda		v	v	v
7	Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	Review Data Induk dan Data Referensi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappelitbangda	v	v	v	v

NG

TABEL 10

8	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Beppelitbangda		v	v	v
9	Perencanaan kualitas data meliputi Daftar Data, Data Prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Perencanaan kualitas data	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Beppelitbangda		v	v	v

16

TABEL 10

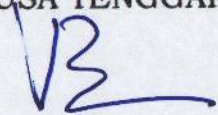
Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE Pemrov. NTT

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen						
	A Manajemen Risiko SPBE						
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
3	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD Penetapan konteks risiko SPBE	Rapat berkala, rapat insidental, FGD Penetapan konteks risiko SPBE dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
4	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
5	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko SPBE	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

TABEL 10

6	Penyusunan evaluasi Risiko SPBE	evaluasi Risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
7	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
8	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
9	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
10	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 R VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT